



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memberikan arah dan target secara transparan kepada organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Strategis periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai indikator target pertahunnya.

Guna pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan maka disusun dokumen Laporan Kinerja, dalam hal ini adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini disusun sebagai upaya pemantauan dan monitoring berkala terhadap capaian kinerja secara periode triwulan untuk memperoleh data analisa dan evaluasi guna memberikan masukan dan arahan terhadap perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun berjalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini sebagai bagian dari langkah dan strategi untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada khususnya untuk mencapai target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan RidhoNya dalam memberikan bimbingan dan arahan guna terwujudnya konektivitas, aksesibilitas serta peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran transportasi laut.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Jakarta, 19 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capi. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.
NIP. 19730808 1999903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Struktur Organisasi Dan Tugas Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 4
C. Sumber Daya Manusia	I - 34
D. Isu Strategis Dan Permasalahan Yang Dihadapi	I - 36
BAB II PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	II - 1
A. Perencanaan Strategis.....	II - 1
B. Perjanjian Kinerja	II - 17
BAB III CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	III - 1
A. Capaian Kinerja.....	III - 1
B. Kontribusi Terhadap Capaian Indikator Kegiatan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 44
C. Realisasi Anggaran	III - 45
BAB IV PENUTUP	IV - 1
A. Kesimpulan	IV - 1
B. Langkah Kedepan	IV - 3

DAFTAR TABEL

I.3.1	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan...	I	-	34
I.3.2	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan.....	I	-	35
II.1.1	Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020 – 2024.....	II	-	4
II.1.2	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.....	II	-	6
II.1.3	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024.....	II	-	7
II.1.4	Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024.....	II	-	9
II.1.5	Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024	II	-	13
II.1.6	Deskripsi Major Project (MP) 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Integrated Port Network).....	II	-	15
II.1.7	Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional Bidang Transportasi Laut dalam RPJMN 2020-2024	II	-	16
II.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	II	-	18
II.2.2	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut....	II	-	19
III.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	III	-	4
III.1.2	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	III	-	6
III.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP 1) Kesatu (1).....	III	-	8
III.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1).....	III	-	9
III.1.5	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur.....	III	-	9
III.1.6	Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur Tahun 2023	III	-	11
III.1.7	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2).....	III	-	13
III.1.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2).....	III	-	13
III.1.9	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul....	III	-	14
III.1.10	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3).....	III	-	16

III.1.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3).....	III - 19
III.1.12	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut.....	III - 19
III.1.13	Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2023.....	III - 22
III.1.14	Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2023.....	III - 22
III.1.15	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4).....	III - 25
III.1.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4).....	III - 26
III.1.17	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut.....	III - 26
III.1.18	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program Kelima (5).....	III - 29
III.1.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5).....	III - 30
III.1.20	Tingkat Keandalan Kenavigasian.....	III - 30
III.1.21	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6).....	III - 33
III.1.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6).....	III - 34
III.1.23	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M).....	III - 34
III.1.24	Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan dan Jumlah Kapal > 400 GT Terdaftar.....	III - 35
III.1.25	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7).....	III - 38
III.1.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7).....	III - 38
III.1.27	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan.....	III - 39
III.1.28	Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi.....	III - 41
III.1.29	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8).....	III - 42

III.1.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8).....	III - 43
III.2.1	Kontribusi Terhadap Capaian IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023.....	III - 44
III.3.1	Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2023....	III - 45
III.3.2	Realisasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2023.....	III - 49
III.3.3	Rincian Anggaran Yang Tidak Terserap Tahun 2023.....	III - 50
III.3.4	Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	III - 51
III.3.5	Realisasi Belanja Per Program.....	III - 51
III.3.6	Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023.....	III - 52

DAFTAR GRAFIK

III.1.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional.....	III - 7
III.1.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk (Loop) Secara Teratur	III - 10
III.1.3	<i>Persentase On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama	III - 15
III.1.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut.....	III - 20
III.1.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut.....	III - 27
III.1.6	Tingkat Keandalan Kenavigasian.....	III - 31
III.1.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M).....	III - 35
III.1.8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi.....	III - 40

DAFTAR GAMBAR

I.1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	I	-	4
I.2.1	Mekanisme Koordinasi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT).....	I	-	19
I.2.2	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama	I	-	21
I.2.3	Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan	I	-	23
I.2.4	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.....	I	-	25
I.2.5	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.....	I	-	27
I.2.6	Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)	I	-	28
I.2.7	Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi.....	I	-	31
I.2.8	Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.....	I	-	32
I.2.9	Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.....	I	-	33
II.1.1	Peta Strategi Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024.....	II	-	3



BAB 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Capaian Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit Eselon I sampai dengan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dimutakhirkan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2023 secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan laporan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya strategik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran dalam kerangka pemenuhan Sasaran Program yang telah ditetapkan.



Sasaran Strategis serta Sasaran Program organisasi telah dibakukan di dalam suatu dokumen Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 (lima) tahun tersebut, di dalam mendukung capaian sasaran strategis ditetapkan sejumlah Indikator Keluaran Program. Pemenuhan atas sasaran strategik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan strategik organisasi di akhir tahun kelima.

Selanjutnya ukuran kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ditelaah dan direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
10. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Instansi Pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



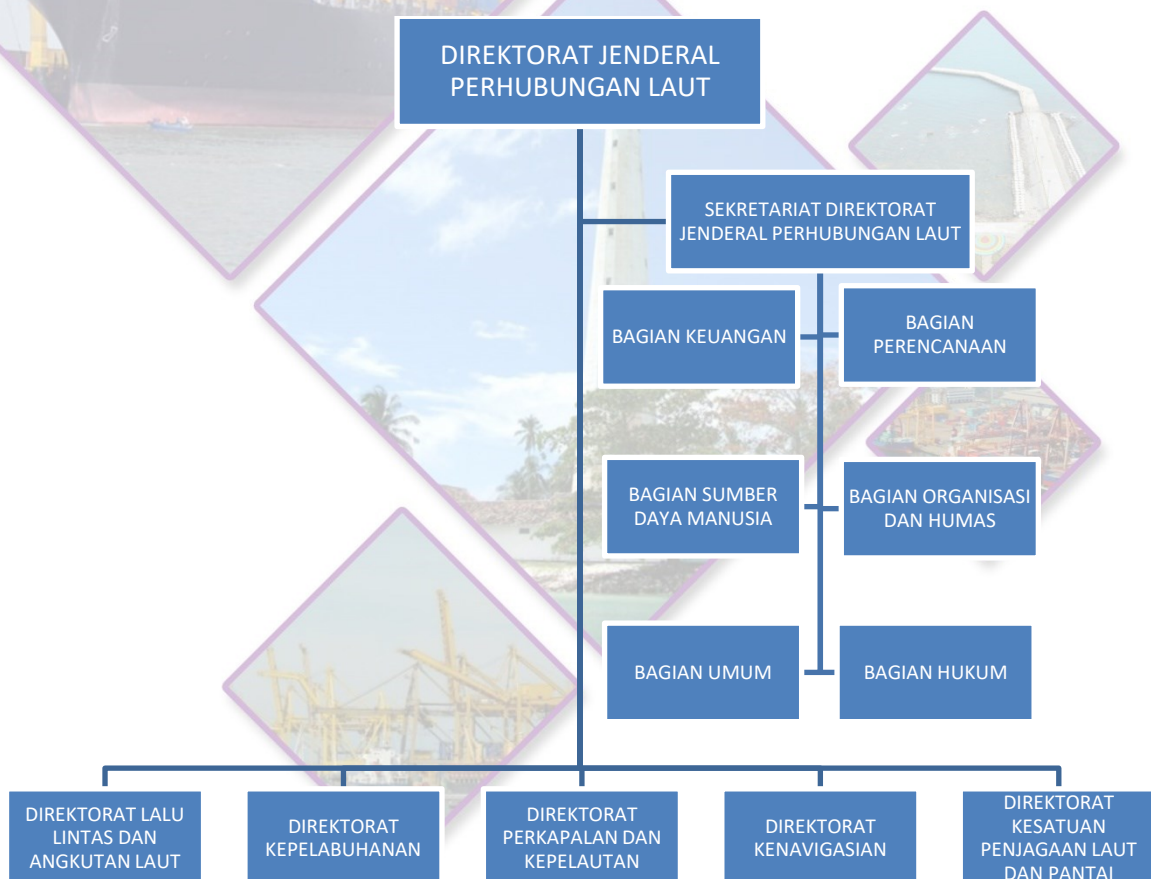
B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu :

- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- Direktorat Kepelabuhanan;
- Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- Direktorat Kenavigasian;
- Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.



Gambar I.1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



2. Tugas dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1) Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Perhubungan, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang transportasi laut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- a) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut; kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- d) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



b. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi tersebut, yaitu:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- i. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
- ii. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- iii. Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
- iv. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- v. Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
- vi. Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



c) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- i. Bagian Perencanaan;
- ii. Bagian Keuangan;
- iii. Bagian Sumber Daya Manusia;
- iv. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- v. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- vi. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

i. Bagian Perencanaan

i). Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

ii). Fungsi Bagian Perencanaan

- Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



ii. Bagian Keuangan

i) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

ii) Fungsi Bagian Keuangan

- Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan revidi revisi anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan
- Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan revidi laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil revidi laporan keuangan.



iii. Bagian Sumber Daya Manusia

i). Tugas Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

ii). Fungsi Bagian Sumber Daya Manusia

- Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.

iv. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

i). Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.



ii). Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

- Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

v. Bagian Umum dan Perlengkapan

i). Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

ii). Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan

- Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan



- Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

vi. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

i). Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

ii). Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standardisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a. Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan.

b. Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;



- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- 6) Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

3) Direktorat Kepelabuhanan

a. Tugas Direktorat Kepelabuhanan

Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

b. Fungsi Direktorat Kepelabuhanan

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan



penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;

- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

a. Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaiklautan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, perlindungan lingkungan maritim dan kepelautan.



b. Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- 3) Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai



angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;

- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan 181 perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

5) Direktorat Kenavigasian

a. Tugas Direktorat Kenavigasian

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kenavigasian.

b. Fungsi Direktorat Kenavigasian

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan



pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;

- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

a. Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana.

b. Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, pelayaran di laut dan pantai,



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;

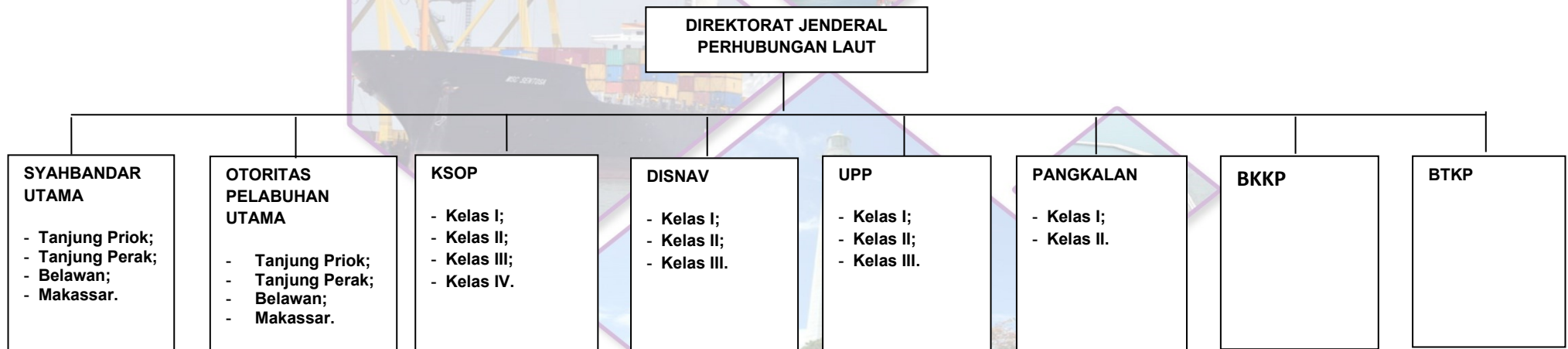
- 3) Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.





3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

MEKANISME KOORDINASI UNIT ESELON I DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DENGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)



Gambar I.2.1. Mekanisme Koordinasi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

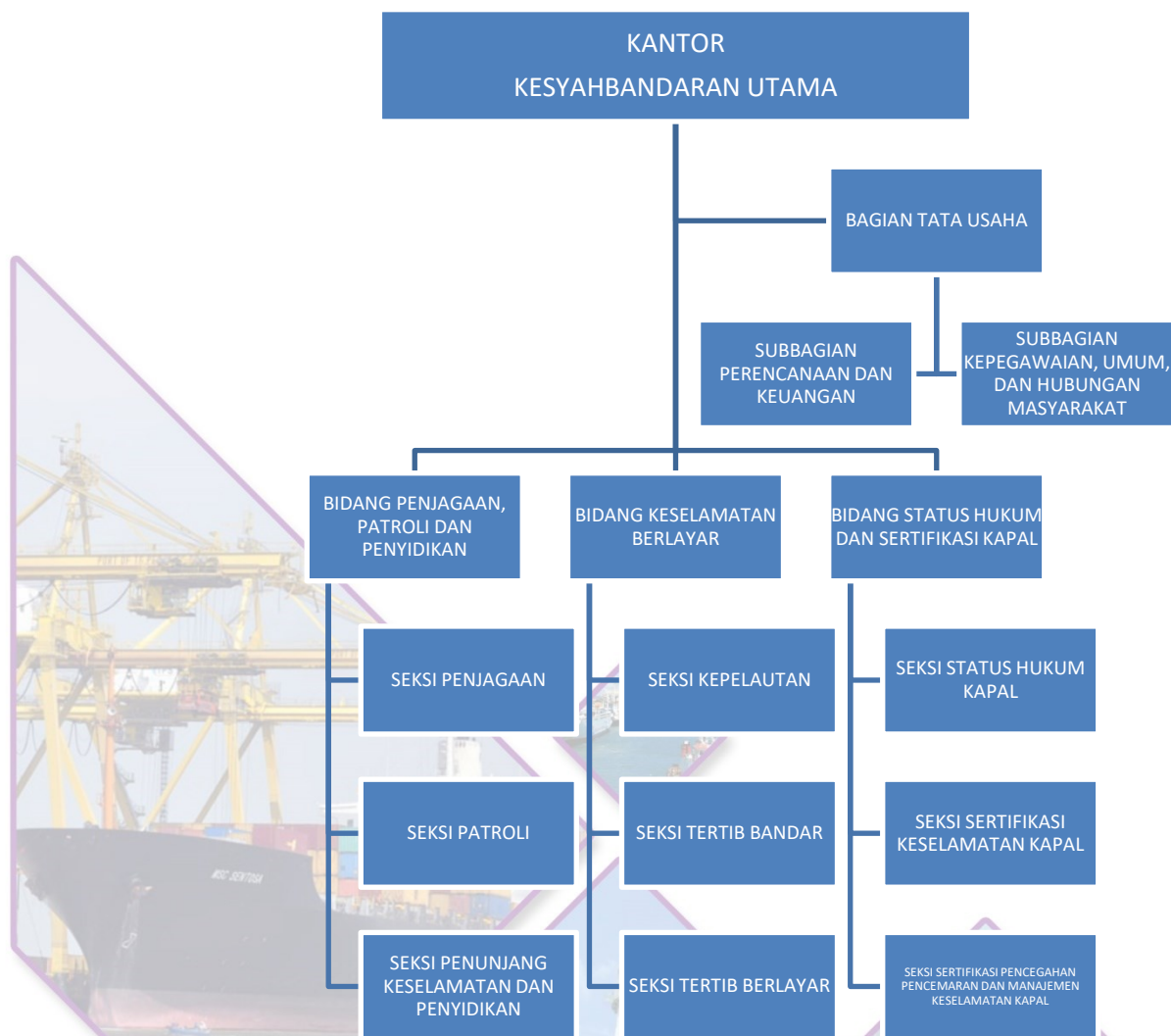


a. Tugas dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Ditjen Hubla

1) Kantor Kesyahbandaran Utama

Berdasarkan PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta peneritan Surat Persetujuan Berlayar;
- b) Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- c) Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal;
- d) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan disembarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
- e) Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/ SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime;
- f) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g) Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- i) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.



Gambar I.2.2. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama

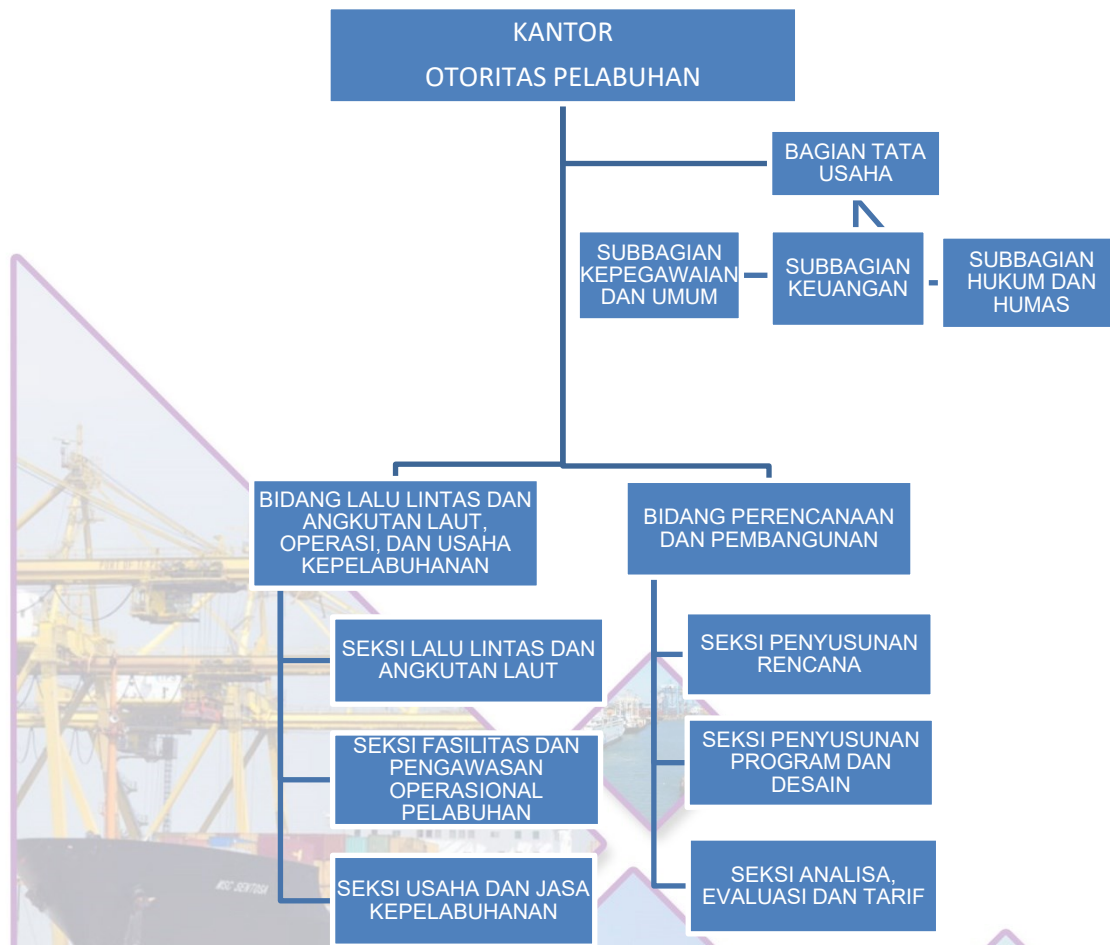
2) Otoritas Pelabuhan Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi serta jaringan jalan dan sarana bantu navigasi pelayaran, sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan;



- b) Penyusunan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- c) Penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- e) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- f) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- g) Pelaksanaan peran sebagai wakil Pemerintah dalam pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan;
- h) Pelaksanaan pembinaan usaha dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
- i) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.



Gambar I.2.3. Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan

3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
- Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;



- c) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- d) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f) Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tariff untuk ditetapkan Menteri;
- g) Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- h) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
- i) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
- j) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
- k) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hokum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelas, yaitu:

- a) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- b) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
- c) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
- d) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV



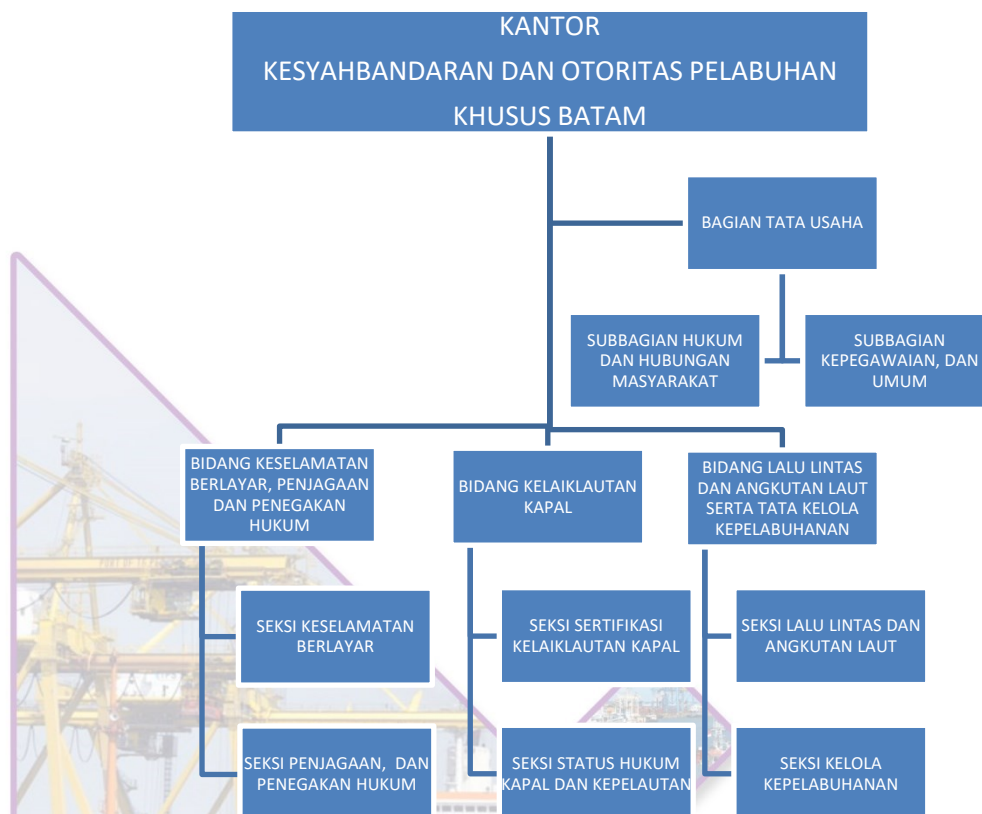
Gambar I.2.4. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

4) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran untuk memperlancar angkutan laut, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:



- a) Pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilaian, verifikasi dan sertifikasi surat dan dokumen di bidang kelaiklautan kapal;
- b) Pelaksanaan pengawasan tertib berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di perairan pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;
- c) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d) Pelaksanaan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, ke karantina, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- f) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam hal keamanan dan ketertiban di pelabuhan melalui pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) dan Petugas Keamanan Pelabuhan (*Port Security Officer*);
- g) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- h) Pelaksanaan pengawasan penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- i) Pelaksanaan penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri;
- j) Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- k) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;
- l) Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat; dan
- m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



Gambar I.2.5. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

5) Unit Penyelenggara Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

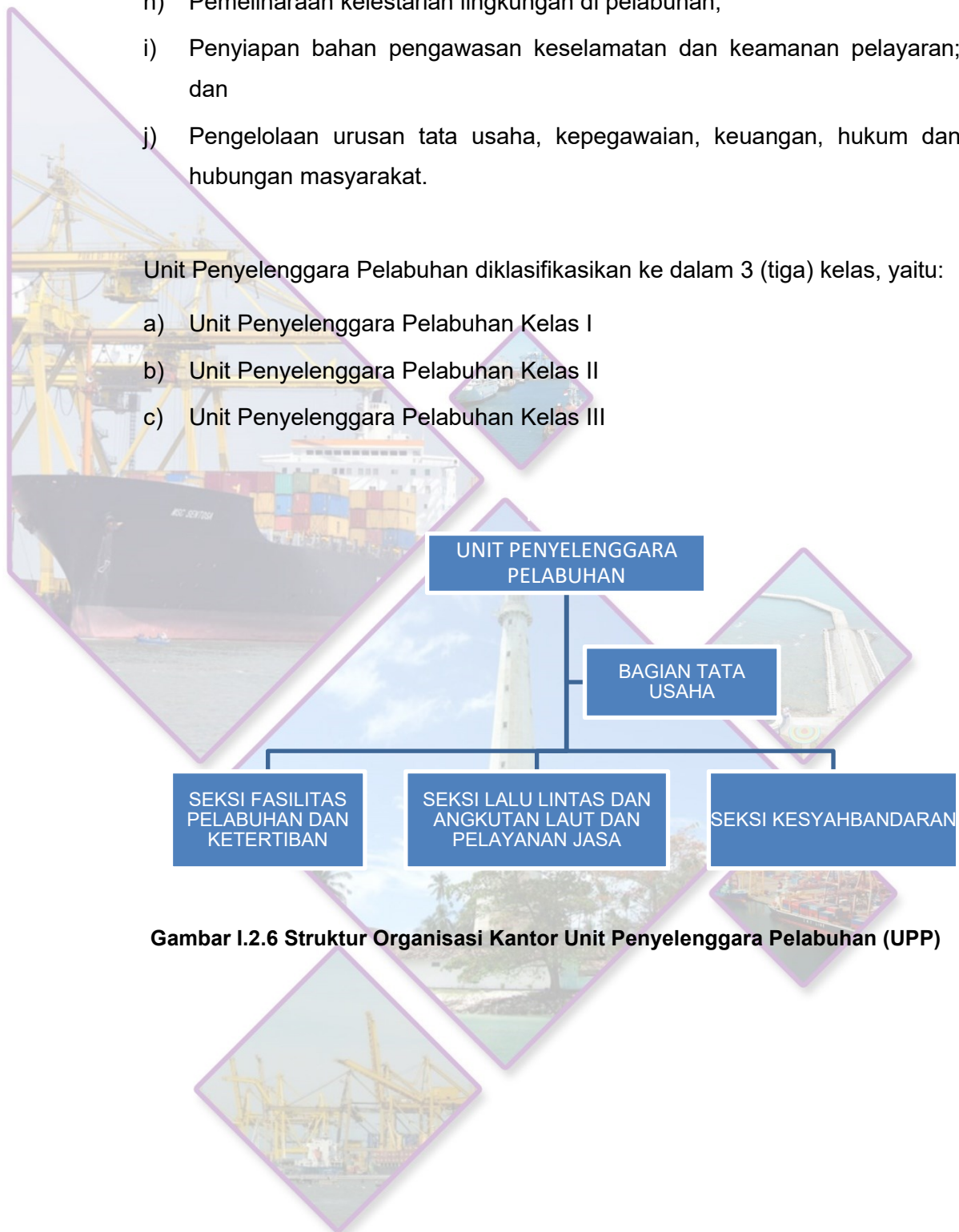
- Penyiapan bahan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP);
- Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
- Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan;



- e) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
- f) Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
- g) Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- h) Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- i) Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- j) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Unit Penyelenggara Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
- b) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
- c) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III



Gambar I.2.6 Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)



6) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai, melalui pelaksanaan fungsi berikut:

- a) Penyusunan rencana, program dan evaluasi;
- b) Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai;
- c) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/ eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air;
- e) Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran;
- f) Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan;
- g) Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi;
- h) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistic;
- i) Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan.

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai diklasifikasikan ke dalam 2 kelas, yaitu:

- a) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I;
- b) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II.



7) Distrik Navigasi

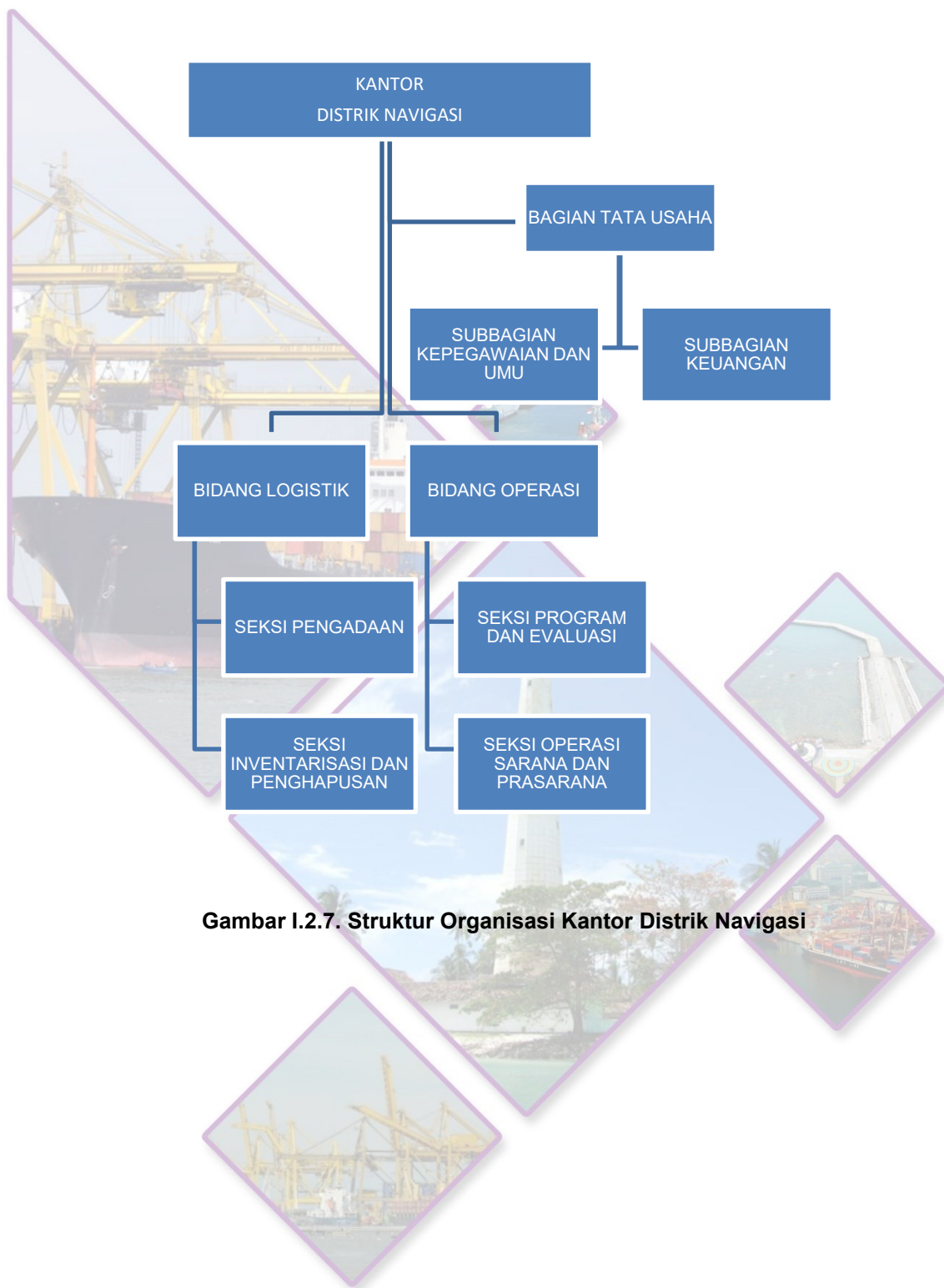
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Distrik Navigasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survey hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survey hidrografi serta pemantauan alur dan perlintasan;
- b) Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- c) Pelaksanaan program pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, dan fasilitas pangkalan serta bengkel;
- d) Pelaksanaan pengamatan laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- e) Pelaksanaan urusan logistic;
- f) Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- g) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.



Distrik Navigasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a) Distrik Navigasi Kelas I
- b) Distrik Navigasi Kelas II
- c) Distrik Navigasi Kelas III



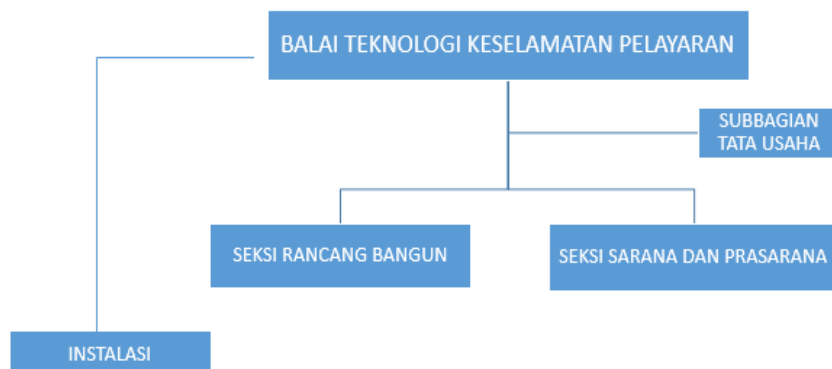
Gambar I.2.7. Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi



8) Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran serta Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- b) Melaksanakan rancang bangun dan pembuatan alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- c) Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- d) Melaksanakan survey pelayaran, posisi alat keselamatan pelayaran, penentuan kedalaman;
- e) Melaksanakan pemberitaan keselamatan pelayaran;
- f) Menetapkan rencana program kerja serta evaluasi;
- g) Melaksanakan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- h) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- i) Memelihara dan merawat sarana dan prasarana;
- j) Mengoperasikan sarana, prasarana dan instalasi.



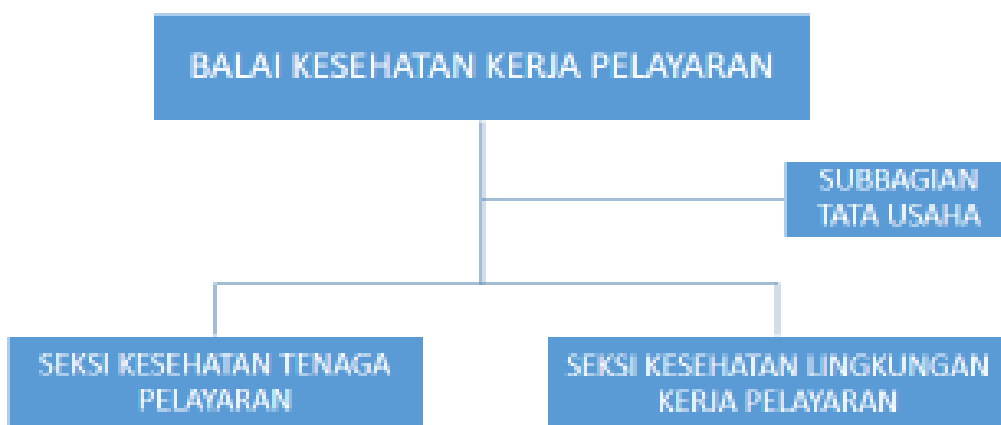
Gambar I.2.8. Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran



9) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pengujian, penilaian, dan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga fungsional pelayaran serta penilaian dan penilikan terhadap lingkungan kerja pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program serta evaluasi;
- b) Pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeliharaan kesehatan tenaga fungsional pelayaran;
- c) Pelaksanaan penilaian dan penilikan penerapan keselamatan kerja, gizi kerja, ergonomic, hygiene dan sanitasi;
- d) Pelaksanaan penilaian lingkungan kerja pelayaran;
- e) Penyiapan penyusunan pedoman pengujian kesehatan, pemeliharaan dan lingkungan kerja pelayaran;
- f) Penyiapan penyusunan standar kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- g) Pemberian sertifikasi kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- h) Penilaian rumah sakit untuk pengujian dan penilaian kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran;
- i) Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.



Gambar I.2.9. Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2023 yaitu 13.860 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.3.1
Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		2022	2023
1.	S3	12	18
2.	Spesialis	1	1
3.	S2	1.150	1336
4.	S1	3.908	4188
5.	D4	219	1074
6.	D3	1.332	1399
7.	D2	13	12
8.	D1	59	51
9.	SLTA atau Kurang	6.473	5736
TOTAL		13.167	13.860



2. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.3.2

Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		2022	2023
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	6	5
3.	IV/c	21	20
4.	IV/b	80	94
5.	IV/a	390	434
6.	III/d	1.691	1860
7.	III/c	1.822	1868
8.	III/b	3.182	3435
9.	III/a	2.473	2871
10.	II/d	1.443	1758
11.	II/c	1.404	928
12.	II/b	299	390
13.	II/a	342	94
14.	I/d	11	3
15.	I/c	1	2
16.	I/b	2	0
17.	I/a	0	1
TOTAL		13.167	13.860



D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk periode Rencana Strategi (Renstra) 2020 - 2024 yang bertujuan mewujudkan terpenuhinya Konektivitas Transportasi Laut (Tahun 2021 sebesar 0,91 Rasio), serta mewujudkan layanan prima terhadap kebutuhan masyarakat seefektif dan seefisien mungkin guna menurunkan biaya logistik nasional dan digitalisasi layanan.

Pada tahun 2023 terdapat beberapa program/ kegiatan yang disusun sebagai upaya dalam menghadapi isu-isu tersebut, antara lain:

1. Pembangunan Pelabuhan Patimban;
2. Proyek-proyek yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
3. Program pendukung Pariwisata (Labuhan Bajo, Sanur dan Likupang);
4. Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
5. Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Bidang Kepelabuhanan;
6. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
7. Program Pelayanan Pelayaran Perintis;
8. Program Pelayanan angkutan ternak (sebagai wujud menjawab isu *animal welfare*);
9. Penerapan Sistem *Inaportnet* secara bertahap pada 2024 pelabuhan komersil;
10. Pengembangan Sistem Informasi Kepelautan;
11. Pembangunan Menara Suar Tanjung Batu – Disnav Tarakan;
12. Pembangunan Kapal Patroli PLP Kelas III, IV dan V.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Program yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2020 – 2024) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024.

1. Rencana Kinerja 5 (lima) Tahun

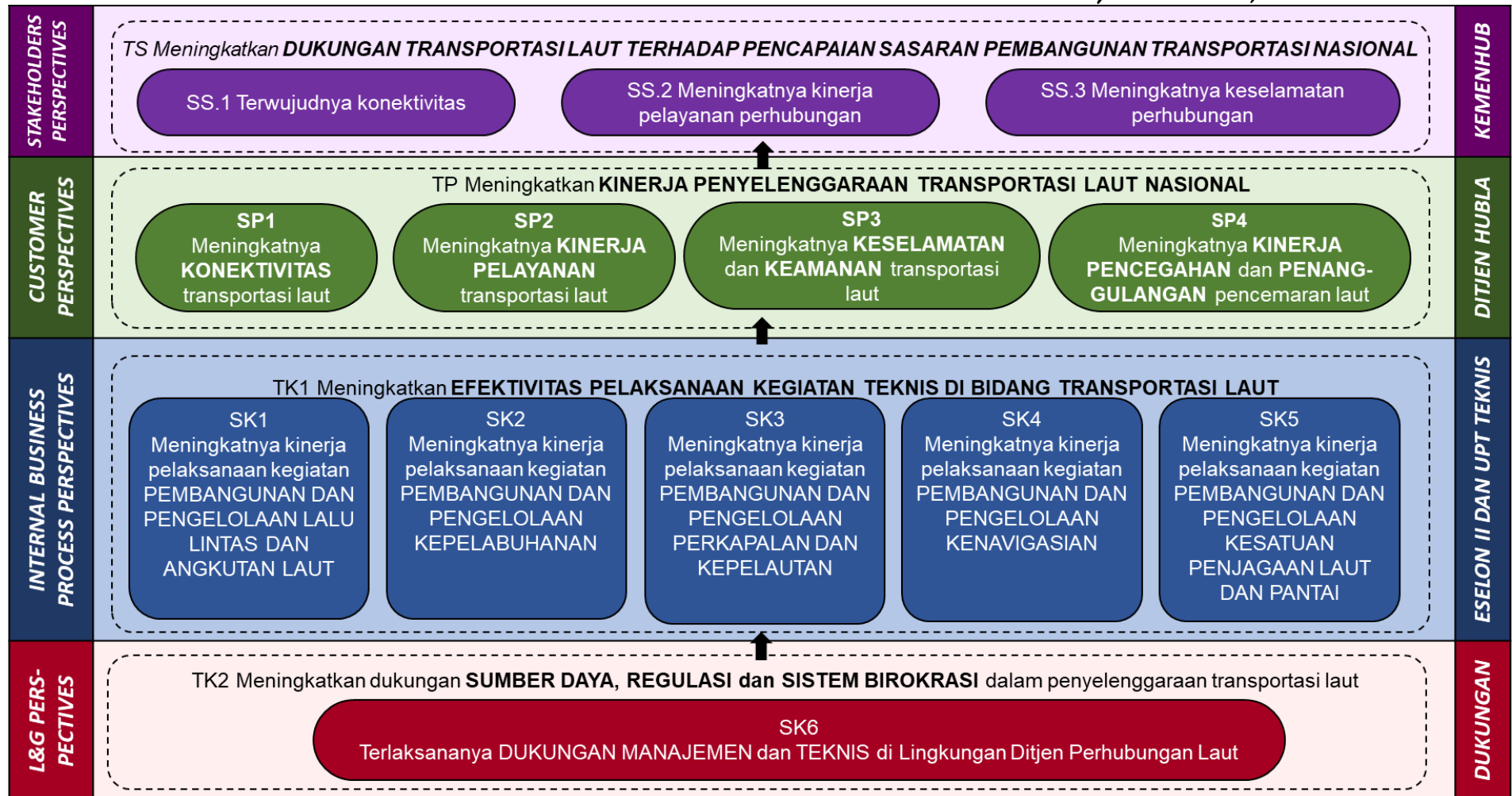
Indikator Kinerja (IK) adalah ukuran capaian kinerja dari sasaran. Adapun nomenklatur indikator kinerja yang digunakan sasaran tersebut diatas sesuai dengan PM No 45 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, terdiri dari:

- a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) atau sering juga disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representasi terukur dari Sasaran Strategis (SS). Secara hirarki target capaian IKSS merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan karena terkait dengan capaian sasaran prioritas Presiden.
- b. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP) sebagai representasi terukur dari Sasaran Program (SP). Secara hirarki target capaian IKP merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diberikan kewenangan untuk menjalankan Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.
- c. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) sebagai representasi terukur dari Sasaran Kegiatan (SK). Secara hirarki target capaian IKK merupakan tanggung jawab dari Unit Eselon II/UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di mana masing-masing merupakan pelaksana kegiatan yang tercakup di dalam Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

Adapun susunan dan rumusan tentang indikator kinerja program (IKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sedangkan penjelasan lebih lanjut tentang daftar Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk setiap kegiatan di yang termasuk ke dalam program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perhubungan Laut.



Gambar II.1.1 Peta Strategi Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024



1) Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020 - 2024

Tabel II.1.1. Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020 - 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN
TP Meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi laut	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1 Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	Jumlah pelabuhan yang telah dilayati angkutan laut (tahun n0) ditambah dengan Jumlah Penambahan rute pelayaran atau pelabuhan yg disinggahi angkutan laut (tahun n) dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut. Keterangan: jumlah lokasi pelabuhan laut yang digunakan angkutan laut sesuai dengan Sub Lampiran A1 dalam KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan dapat berubah jika terdapat Reviu RIPN.
		IKP2 Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop dibandingkan dengan jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner)
	SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3 Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	Persentase pelabuhan utama dan pengumpul yang telah mencapai target kinerja yang ditetapkan (WT, AT, ET/BT)
	SP3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	Rasio	Jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut per tahun dibandingkan jumlah SPB yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut dikali dengan 10.000 pelayaran
		IKP5 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	Rasio	Persentase penurunan kejadian gangguan keamanan transportasi laut (di atas kapal dan di pelabuhan, terhadap wilayah pelabuhan, kapal, penumpang, barang) per tahun dibandingkan baseline 2019 dikali dengan 100.000 pelayaran
		IKP6 Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	Rerata Tingkat kehandalan SBNP ditambah dengan tingkat kehandalan Telkompel
	SP4 Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	Jumlah sertifikat IAPP yang diterbitkan setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kapal yang kapasitasnya lebih dari 400 GT



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

		IKP8 Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	Persentase kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal yang berhasil ditanggulangi
--	--	---	---	---

Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



2) Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024

Tabel II.1.2. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024

NO	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Indikator Tujuan	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi laut	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	0,89	0,90	0,91	0,92
					Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk <i>loop</i> secara teratur	%	24	25	27	27	27
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi		Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	81	82	83	84	85
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi		Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	Rasio	1,23 per 10000 pelayaran	1.21 per 10000 pelayaran	1.09 per 10000 pelayaran	0.97 per 10000 pelayaran	0.85 per 10000 pelayaran
					Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	Rasio	0,30 per 10000 pelayaran	0,29 per 100000 pelayaran	0,28 per 100000 pelayaran	0,27 per 100000 pelayaran	0,26 10000 pelayaran
					Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	96,5	97,25	97,75	98,25	99

Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



2. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Muatan tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional untuk periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini disadur dari RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020.

a. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2020-2024

Arahan kebijakan umum pembangunan nasional untuk ke-7 agenda pembangunan nasional, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020) dirangkum pada berikut :

Tabel II.1.3. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan lptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Memperkuat moderasi beragama; dan 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	1) Reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)



b. Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

Tabel II.1.4. Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut								Rp10.956.672,747	Rp12.177.169,217	Rp13.587.856,481	Rp13.691.338,202	Rp13.814.963,353	
	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi laut												
	IKP1 Rasio konektivitas transportasi laut nasional		0,89	0,89	0,90	0,91	0,92						Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
	IKP2 Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur		24	25	27	27	27						Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
	SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut												
	IKP 3 Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul		81%	82%	83%	84%	85%						Direktorat Kepelabuhanan
	SP3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut												
	IKP4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut		1,23 per 10.00	1.21 per 10.000	1.09 per 10.000	0.97 per 10.000	0.85 per 10.000						Dit. KPLP



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
			0 pelayaran	pelayaran	pelayaran	pelayaran	pelayaran						
	IKP5 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut		0,30 per 100.000 pelayaran	0,29 per 100.000 pelayaran	0,28 per 100.000 pelayaran	0,27 per 100.000 pelayaran	0,26 per 100.000 pelayaran						Dit. KPLP
	IKP 6 Tingkat kehandalan Kenavigasian		96,5%	97,25 %	97,75 %	98,25 %	99%						Dit. Kenavigasian
	SP4 Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut												
	IKP 7 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)		0,2	0,4	0,6	0,8	1						Dit.Kappel
	IKP8 Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan		100%	100%	100%	100%	100%						Dit. KPLP

Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



c. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024

Secara keseluruhan untuk setiap kegiatan yang tercakup di dalam program penyelenggaraan transportasi laut tersebut diperlukan total pendanaan sekitar Rp 64.228.000.000,00 untuk 5 tahun dari Tahun 2020-2024, tercakup di dalamnya untuk jenis belanja modal maupun belanja barang, serta berbagai sumber pendanaan, baik Rupiah Murni, PHLN, SBSN, KPBU maupun swasta murni.

Sebagaimana diketahui bahwa pada periode Tahun 2020 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Program Penyelenggaraan Transportasi Laut yang terdiri dari 6 (enam) jenis kegiatan yang mencakup:

- 1) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- 2) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kepelabuhanan;
- 3) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Perkapalan dan Kelautan;
- 4) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kenavigasian;
- 5) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
- 6) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis.

Secara terperinci 6 (enam) kegiatan tersebut dalam Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dokumen penganggaran dibagi menjadi Output dan Sub output.

Pada periode Tahun 2021-2024 terdapat Restrukturisasi Program dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Infrastruktur Konektivitas;
 - i. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut;
 - ii. Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut;
 - iii. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Laut;
 - iv. Kegiatan Pelayanan Transportasi Laut.
- 2) Program Dukungan Manajemen;
 - i. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Laut;



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

- ii. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Laut;
- iii. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut;
- iv. Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut;
- v. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut;
- vi. Kegiatan Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Laut.



d. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024

Tabel II.1.5. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024

No	Kegiatan/Program	Kebutuhan Pendanaan Per Tahun (dalam Juta)						Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	
1	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Rp1.702.151,446	Rp2.220.5420,904	Rp2.805.738,123	Rp2.901.487,108	Rp3.108.440,099	Rp12.723.237,68	
2	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kepelabuhanan	Rp4.154.641,670	Rp3.583.020,673	Rp4.169.467,299	Rp3.314.8714,334	Rp2.854.041,059	Rp17.909.885,035	
3	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Perkapalan dan Kelautan	Rp53.162,035	Rp196.843,838	Rp158.638,538	Rp163.038,909	Rp167.561,994	Rp739.245,314	
4	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kenavigasian	Rp493.728,073	Rp1.247.016,155	Rp1.074.683,076	Rp1.578.216,389	Rp1.705.355,953	Rp6.098.999,646	
5	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Rp286.810,522	Rp437.468,238	Rp654.159,138	Rp823.951,611	Rp706.072,545	Rp.2.908.462,054	
6	Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Program Penyelenggaraan Transportasi Laut	Rp4.2566.179,001	Rp4.507.399,409	Rp4.725.170,307	Rp5.098.950,816	Rp5.273.491,703	Rp23.848.170,271	
TOTAL		Rp10.956.672,747	Rp12.177.169,217	Rp13.587.856,481	Rp13.691.338,202	Rp13.814.963,353	Rp64.228.000,000	

Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



**3. Pengembangan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (*Integrated Port Network*)
(Major Project RPJMN No. 22)**

- a.** Pengembangan jaringan pelabuhan utama terpadu atau sering disebut sebagai Integrated Port Network (IPN) merupakan upaya dasar untuk mengurangi biaya logistik laut (khususnya untuk distribusi barang dalam negeri).
- b.** Dengan standarisasi teknis dan standarisasi pelayanan pada sejumlah pelabuhan utama (untuk periode 2020-2024 ini difokuskan pada 7 pelabuhan: Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong) diharapkan rute utama antar pulau melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat dilayani dengan kapal-kapal besar melalui rute loop yang lebih efisien. Pengembangan IPN ini juga mendukung highlight Program Prioritas berdasarkan Kepulauan 2020-2024.



c. Deskripsi umum mengenai MP 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (IPN) sebagaimana tertuang di dalam table berikut ini :

Tabel II.1.6. Deskripsi Major Project (MP) 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Integrated Port Network)

Lokasi	Pelabuhan: Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong					
Latar Belakang	- Biaya Logistik Indonesia tertinggi dibandingkan sejumlah negara, termasuk India, Malaysia, Tiongkok, Thailand, dan Vietnam 28 pelabuhan utama dalam rencana induk pelabuhan belum terkonsolidasi 77% Rute pelayaran di Indonesia didominasi <i>port to port</i>, sedangkan rute <i>loop</i> hanya 23% - Belum adanya standarisasi pelabuhan utama (panjang dermaga, kedalaman dan area penumpukan), untuk dijadikan pelabuhan utama <i>transshipment</i> domestik.					
Manfaat	- Meningkatkan kinerja pelabuhan dengan adanya standarisasi pelabuhan utama (nilai <i>turn round time</i> maksimum 24 jam) - Meningkatkan efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk loop secara teratur menjadi 27% - Sebagai penunjang Kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan pelabuhan					
Durasi	Tahun 2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Indikasi Pendanaan
	1 pelabuhan utama	2 pelabuhan utama	4 pelabuhan utama	6 pelabuhan utama	7 pelabuhan utama	Rp 113 Triliun (BUMN/Swasta)
Pelaksana	Kementerian Perhubungan, BUMN, Swasta					
Highlight Proyek	- Standardisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan utama (pengembangan dermaga dan terminal peti kemas) - Pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, dan pembangunan breakwater - Pengadaan kapal besar kapasitas 3000-5000 TEUs - Pengembangan Kawasan Industri					

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)



d. Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2020-2024

Pada Lampiran III RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) disampaikan target pembangunan dan pendanaan Prioritas Nasional (PN) di bidang transportasi laut untuk periode 2020-2024. Adapun detail dari usulan proyek/kegiatan strategis lainnya di bidang Perhubungan Laut yang diusulkan di dalam Renstra Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024 disampaikan di

**Tabel II.1.7 Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional
Bidang Transportasi Laut dalam RPJMN 2020-2024**

No	Program/Kegiatan/Proyek Strategis	Satuan	Target Tahunan					Total Target	Indikasi Belanja Non Operasional 2020-2024 (Rp Milyar)
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kenavigasian								2.570,8
	Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)	Unit	67	70	73	75	77	362	1.118,2
	Penyediaan kapal navigasi	Unit	10	14	18	22	25	89	1.000,0
	Penyediaan vessel traffic services terintegrasi (VTS)	Unit	15	20	25	30	35	125	452,6
2	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut								10.267,4
	Subsidi Tol Laut	Trayek	21	22	23	24	25	25	2.398,0
	Subsidi Angkutan Laut Perintis	Trayek	113	113	113	113	113	113	6.498,9
	Pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu	Lokasi	20	22	24	19	20	105	1.332,0
	Penyediaan Moda Kapal Ternak di Belu	Rute	1	1	1	1	1	5	38,5
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan								12.482,7
	Pembangunan pelabuhan (Selesai)	Lokasi	-	-	1	1	3	5	5.072,2
	Pengembangan pelabuhan (Selesai)	Lokasi	10	9	2	15	21	57	3.034,6
	Rekonstruksi pelabuhan (Selesai)	Lokasi	-	-	3	-	-	3	1.044,0
	Pengadaan peralatan bongkar muat	Lokasi	8	8	8	8	8	40	2.000,0
	Penyelenggaraan pengerukan alur pelayaran	Lokasi	20	22	24	19	20	105	1.332,0

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)



B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla telah dirumuskan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2022 (yang sudah ditandatangani antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 disusun setelah DIPA Tahun 2022 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang memuat Pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:



1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tabel II.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,94
		IKP 2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk <i>Loop</i> Secara Teratur	%	27
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP 3	Persentase <i>On Time Performance</i> Pada Pelabuhan Utama Dan Pengumpul	%	84
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP 4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97
		IKP 5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27
		IKP 6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,75
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP 7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,9
		IKP 8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023



2. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tabel II.2.2. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,94
		IKP 2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP 3	Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama Dan Pengumpul	%	84
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP 4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97
		IKP 5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27
		IKP 6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,75
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP 7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,9
		IKP 8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100

Sumber : Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari target yang ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Kinerja.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Perencanaan Kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.



2. **Perjanjian Kinerja** adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
3. **Pengelolaan Data Kinerja** adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja.
4. **Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
6. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan draft RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Program yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- b. Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$



Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Tinjau Ulang draft RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 - 2024.

Target capaian kinerja yang telah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Program di dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja atau dokumen PK, di dalam dokumen PK menetapkan target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :





1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target PK Tahun 2023 dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kegiatan Program Tahun 2023

Tabel III.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM (3)		SATUAN (4)	TARGET 2023 (5)	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					CAPAIAN KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,94	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	100
		IKP 2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk <i>Loop</i> Secara Teratur	%	27	27	27	30	30	30	100
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP 3	Persentase <i>On Time Performance</i> Pada Pelabuhan Utama Dan Pengumpul	%	84	94	78	83	83	83	99
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP 4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	0,81	0,86	0,89	0,84	0,84	113,04
		IKP 5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27	0	0	0	0,18	0,18	133,33



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

		IKP 6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,75	96,33	96,36	95,08	95,13	95,13	97,32
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP 7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,9	0,796	0,856	0,923	0,933	0,933	103,67
		IKP 8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	100	100	100	100	100



a. SASARAN PROGRAM (1)

Sasaran Program **Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi Laut** dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) adalah **“Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional”**
 - a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) Kesatu (1) :**

Tabel III.1.2. Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,94	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Konektivitas Transportasi Laut pada Tahun 2023 sebesar 0,94. Jumlah pelabuhan yang penggunaannya untuk angkutan laut, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 432 Tahun 2017 tentang RIPN sebanyak 636 pelabuhan.

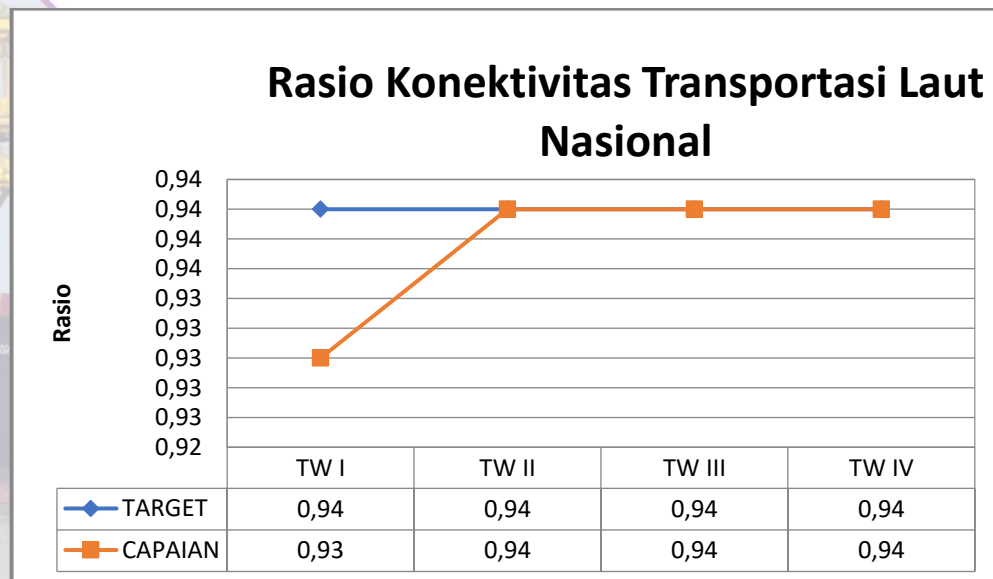
Pada Triwulan I di bulan Januari tahun 2023 terdapat penambahan 16 (enam belas) pelabuhan yang dilayani angkutan laut yaitu Pelabuhan Darume di Halmahera, Pelabuhan Gilimandangin di Madura, Pelabuhan Kadatua di Buton Selatan, Pelabuhan Kataloka di Buton Selatan, Pelabuhan Loleo Jaya di Halmahera, Pelabuhan Maidi di Tidore, Pelabuhan Mangga Dua di Ternate, Pelabuhan Mumugu di Ternate, Pelabuhan Nunbaun Sabu di Rote, Pelabuhan Pulau Sebesi di Sulawesi Selatan, Pelabuhan Papela di Rote, Pelabuhan Parit Rempak di Kepulauan Riau, Pelabuhan Pasean di Pamekasan, Pelabuhan Siompu di Buton Selatan, Pelabuhan Siwa di Sulawesi Barat dan Pelabuhan Tana Paser di Kalimantan Timur. Dengan demikian jumlah pelabuhan yang dilayani menjadi 592 pelabuhan, dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Januari sampai dengan Maret Tahun 2023 sebesar 0,93 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 98,94%.

Sampai dengan Triwulan II terdapat penambahan 3 pelabuhan yang dilayani angkutan laut yaitu Pelabuhan Sibigo di NAD, Pelabuhan Sungsang di Sumatera Selatan dan Pelabuhan Tanjung Berakit di Kepulauan Riau, sehingga pada Triwulan II terdapat 19 Pelabuhan.



Pada Triwulan III sampai dengan Triwulan IV tidak ada penambahan, sehingga total sampai dengan Triwulan IV sebanyak 19 pelabuhan. Dengan demikian jumlah pelabuhan yang dilayani angkutan laut menjadi 595 pelabuhan, dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 sebesar 0,94 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Grafik III.1.1. Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional



Rasio konektivitas transportasi laut nasional diukur dengan menghitung jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang diperuntukkan sebagai layanan angkutan laut, atau dengan rumus:

$$\text{Rasio konektivitas transportasi laut nasional} = \frac{\sum \text{jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut}}{\sum \text{jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut}}$$

$$\text{Rasio konektivitas transportasi laut nasional} = \frac{575 \text{ trayek}}{636 \text{ trayek}} = 0,94$$

Secara keseluruhan Rasio Konektivitas Transportasi Laut Tahun 2023 pada Triwulan I sebesar 0,93 sedangkan Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sebesar 0,94. Terlampir daftar pelabuhan yang sudah dan belum terlayani oleh kapal angkutan laut. Keberhasilan pencapaian target didukung oleh peran aktif pemerintah daerah dalam mempromosikan keunggulan komoditas. Selain itu para pemilik barang masih mengandalkan angkutan laut dalam mendistribusikan barang.



- b) **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) Kesatu (1) :**

Untuk IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional, target yang ditetapkan pada Tahun 2023 adalah sebesar 0,94 dengan realisasi rasio sebesar 0,94 (dari *benchmark* sebanyak 636 pelabuhan ditargetkan untuk mendukung konektivitas sebanyak 576 pelabuhan) sedangkan target Tahun 2022 sebesar 0,90 dengan realisasi rasio sebesar 0,91 (dari *benchmark* sebanyak 636 pelabuhan ditargetkan untuk mendukung konektivitas sebanyak 595 pelabuhan) sehingga melebihi dari target karena terdapat penambahan 5 Pelabuhan yang dilayani angkutan laut yaitu Pelabuhan Indari di Halmahera Selatan, Pelabuhan Koititi di Kepulauan Halmahera, Pelabuhan Matasiri dan Pelabuhan Marabatuan di Provinsi Kalimantan Selatan serta Pelabuhan Gudang Arang di Provinsi Maluku. Untuk Tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP 1) Kesatu (1)

IKP (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKP (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	Target	0,90	0,94
				Realisasi	0,91	0,94
				Kinerja (%)	101	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) Kesatu (1) :**

Untuk IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja sebesar 0,94 dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,91 sehingga pencapaian kinerjanya 103% dan melebihi target yang telah ditetapkan karena pada Tahun 2023 terdapat penambahan 19 pelabuhan (terlampir).



Tabel III.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,91	0,94	103

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

2) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2) adalah **“Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur”**.

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur (IKP 2) Kedua (2):

Tabel III.1.5. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur

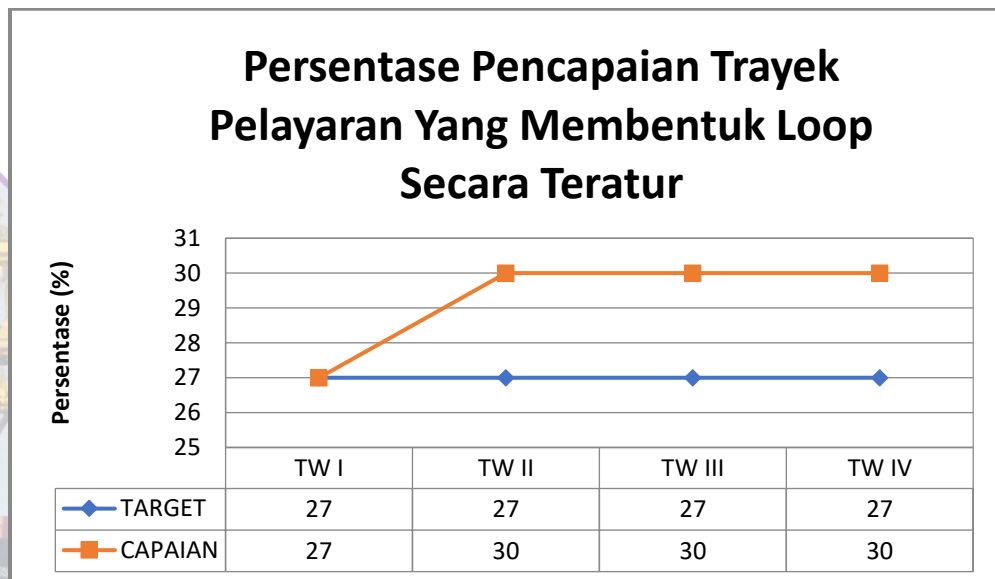
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk <i>Loop</i> Secara Teratur	%	27	27	30	30	30	30	111

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun target Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur Tahun 2023 sebesar 27% atau sebanyak 37 trayek dari 138 trayek tetap dan teratur. Pada triwulan I tahun 2023 telah diinventarisasi sebanyak 37 trayek tetap dan teratur angkutan peti kemas membentuk *loop service*. Sedangkan pada Triwulan II sampai dengan Triwulan IV mengalami peningkatan menjadi 30% atau sebanyak 41 trayek dari 138 trayek.



**Grafik III.1.2. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran
Yang Membentuk Loop Secara Teratur**



Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur diukur dengan menghitung jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop dibandingkan dengan jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner), atau dengan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop} = \frac{\sum \text{jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop}}{\sum \text{jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner)}} \times 100\%$$

x = Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur

$$\% \text{ pencapaian trayek loop} = \frac{41 \text{ trayek}}{138 \text{ trayek}} = 30\%$$

Tabel III.1.6. Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur Tahun 2023

NO.	JARINGAN TRAYEK
1	Bitung-Ulu Siau/Tagulandang-Tahuna-Lirung/Melonguane-Bitung
2	Makassar-Bungku-Kolonedale-Makassar
3	Merauke (Kelapa Lima) - Kimaam - Moor - Bade (Mapi)- Getentiri (Bovendigul) - Merauke (Kelapa Lima)
4	Tanjung Perak-Anggrek-Tanjung Perak
5	Tanjung Perak-Badas-Bima-Tanjung Perak
6	Tanjung Perak-Fak Fak-Kaimana-Elat-Dobo-Tanjung Perak
7	Tanjung Perak-Kisar-Leti-Moa-Mahaleta-Tanjung Perak
8	Tanjung Perak-Larantuka-Lembata-Kalabahi-Tanjung Perak
9	Tanjung Perak-Namlea-Tanjung Perak
10	Tanjung Perak-Nunukan-Tanjung Perak
11	Tanjung Perak-Pulau Obi-Piru-Bula-Larat-Tepa-Tanjung Perak
12	Tanjung Perak-Reo-Tanjung Perak



13	Tanjung Perak-Saumlaki-Dobo-Tanjung Perak
14	Tanjung Perak-Sorong-Tanjung Perak
15	Tanjung Perak-Tarakan-Tanjung Perak
16	Tanjung Perak-VVanci-Nam role (Leksula)-Tanjung Perak
17	Tanjung Perak-Wasior-Nabire-Serui-Tanjung Perak
18	Tanjung Perak-Wayaloar-Malbuta-Babang-Saketa-Gimea/Tapeleo-Tanjung Perak
19	Tanjung Priok-Pulau Baai-Tanjung Priok
20	Tanjung Priok-Teluk Bayur-Tanjung Priok
21	Bitung-Ulu Siau-Tagulandang-Tahuna-Marore-Miangas-Marampit-Lirung-Melonguane-Mangarang-Bitung
22	Makassar - Ereke - Raha - Sikeli - Selayar- Makassar
23	Tanjung Perak - Tidore (Soasio) - Morotai - Galela - Maba/Buli - Weda - Tanjung Perak
24	Tanjung Perak - Tarakan - Nunukan - Tanjung Perak
25	Tanjung Perak - Kupang - Tanjung Perak
26	Tanjung Perak - Lembata (Lewoleba) -Tabilota/ Larantuka - Tanjung Perak
27	Tanjung Perak - Makassar - Jailolo - Morotai (Daruba) - Tanjung Perak
28	Tanjung Perak - Merauke - Agats - Timika (Pomako) - Tanjung Perak
29	Tanjung Perak - Iiwaki-Kisar - Leti - Kaiwatu - Moa - Lelang/P. Sermata - Tepa - Larat - Tanjung Perak
30	Tanjung Perak - Wetar - Kisar - Leti - Moa - Sermata
31	Tanjung Perak - Bau-Bau/Murhum-Kendari /Bungkutoko-Tanjung Perak
32	Tanjung Perak - Makassar - Jailolo - Daruba-Galela-Tanjung Perak
33	Tanjung Perak - Makassar - Tahuna - Tanjung Perak
34	Tanjung Perak - Oransbari-Wasior - Nabire/Teluk Kimi - Serui - Waren - Sarmi - Tanjung Perak
35	Tanjung Perak - Rote - Sabu-Tanjung Perak
36	Tanjung Perak-Soasio-Galela-Daruba- Galela - Buli - Maba Pura- Weda - Tanjung Perak
37	Tanjung Priok - Wanci - Namrole - Pulau Obi - Tanjung Perak
38	Tanjung Priok- Lhokseumawe - Malahayati - Sabang - Tanjung Priok
39	Tanjung Priok - Patimban - Kijang - Letung - Tarempa - Pulau Laut - Selat Lampa - Subi - Serasan - Midai - Tanjung Priok
40	Tanjung Priok - Tanjung Perak - Tanjung Priok
41	Tanjung Priok - Kijang - Letung -Tarempa-Pulau Laut -Selat Lampa- Subi - Serasan-Midai-Tanjung Priok

 = Jaringan Trayek Kapal Peti Kemas Tol Laut

 = Jaringan Trayek Kapal Peti Kemas Swasta

Adapun capaian kinerja ini didukung oleh trayek tol laut sebanyak 20 trayek (49%) sedangkan kapal swasta hanya mencapai 21 trayek (51%). Hal ini menggambarkan bahwa pelayaran nasional swasta mulai tertarik kepada jaringan trayek dengan model *loop service*. Untuk lebih meningkatkan peranan pelayaran nasional swasta, Direktorat Jenderal Perhubungan laut telah melakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- i. Menghimbau kepada perusahaan pelayaran swasta melalui surat edaran kepada DPP INSA untuk meningkatkan jadwal pelayaran kapal-kapal petikemas secara lebih teratur;



- ii. Melakukan evaluasi pada saat rapat koordinasi nasional penyelenggaraan angkutan barang tol laut dalam rangka meningkatkan persentase pencapaian indikator trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) kedua (2) :

Untuk IKP 2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur, yaitu pada Tahun 2023 terdapat target sebesar 27% dengan realisasi sebesar 30% sehingga prosentase sebesar 111% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan karena ada penambahan 4 trayek loop service sedangkan Tahun 2022 target sebesar 27% dengan realisasi sebesar 27% sehingga persentase kinerja pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel III.1.7. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)

IKP (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKP (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur	%	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur	%	Target	27	27
				Realisasi	27	30
				Kinerja (%)	100	111

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) Kedua (2) :

Untuk IKP 2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur, pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja sebesar 30% dari target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 27% sehingga persentase pencapaiannya 111% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan karena ada penambahan 4 trayek loop service pada Tahun 2023.



**Tabel III.1.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024
pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk <i>Loop</i> secara Teratur	%	27	30	111

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

b. SASARAN PROGRAM (2)

Sasaran Program **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

3) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3) adalah **"Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul"**

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Program Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) :

Tabel III.1.9. Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul

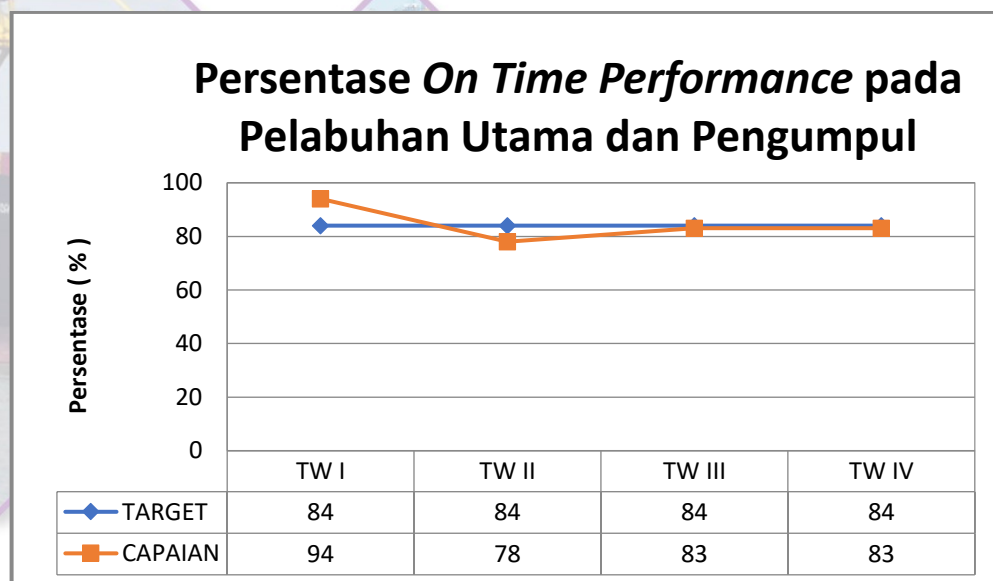
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	84	94	78	83	83	83	99

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan dan Aplikasi SIRANI, Ditjen. Perhubungan Laut.



Adapun target *Persentase On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul Tahun 2023 sebesar 84%. Pencapaian pada Triwulan I sebesar 94%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 94%. Pencapaian pada Triwulan II sebesar 78%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 93% pada Triwulan II sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian pada Triwulan III sebesar 83%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 98% pada Triwulan III. Pencapaian pada Triwulan IV sebesar 83%, sehingga prosentase pencapaian total terhadap target sebesar 99% pada Triwulan IV sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik III.1.3. *Persentase On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul



Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan merupakan nilai rata-rata dari pencapaian *Waiting Time* (WT), *Approach Time* (AT), *Effective Time: Berth Time* (BT) terhadap standar yang ditetapkan pada pelabuhan utama yang diusahakan secara komersial di pelabuhan. Pencapaian kinerja di pelabuhan terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan kapal (pencapaian *Waiting Time* (WT) dan pencapaian *Approach Time* (AT)) serta pencapaian kinerja di terminal (pencapaian *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)).

Kinerja di pelabuhan terdiri atas kinerja pelayanan kapal (*Waiting Time* (WT) dan *Approach Time* (AT)), untuk kinerja pelayanan di terminal berupa *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT).

- i. Kinerja pelayanan kapal terdiri dari :
 - ***Waiting Time* (WT)** merupakan selisih waktu antara waktu penetapan kapal masuk di area lego jangkar dengan waktu saat pandu naik ke atas kapal (*Pilot on Board/POB*) pada pelayanan kapal masuk ke pelabuhan. *Waiting Time* (WT) disajikan dalam satuan Jam.



- **Approach Time (AT)** merupakan waktu perjalanan untuk kapal masuk dan/atau kapal keluar dari dan/atau ke pelabuhan. Untuk kapal masuk ke pelabuhan dihitung saat kapal mulai bergerak dari lokasi lego jangkar sampai saat ikat tali di tambatan (*first line*), sedangkan untuk kapal keluar dari pelabuhan dihitung mulai lepas tali (*last line*) sampai kapal mencapai area ambang luar (keluar dari area lego jangkar). *Approach Time (AT)* disajikan dalam satuan Jam.

ii. Kinerja pelayanan di terminal berupa *Effective Time : Berthing Time (ET:BT)*

- **Effective Time : Berthing Time (ET:BT)** atau rasio waktu kerja kapal di tambatan merupakan perbandingan waktu kapal berkerja efektif di dermaga (terminal) dengan waktu kapal selama di tambatan dermaga (terminal). *Effective Time : Berthing Time (ET:BT)* disajikan dalam satuan Persentase (%).

Pencapaian kinerja di pelabuhan yang terdiri dari pencapaian *Waiting Time (WT)*, *Approach (AT)*, dan *Effective Time : Berthing Time (ET:BT)*, merupakan perbandingan capaian kinerja di pelabuhan dengan standar yang telah ditentukan. Adapun rumus untuk masing-masing unsur pencapaian kinerja sebagai berikut:

i. Pencapaian *Waiting Time (WT)*

$$\text{Pencapaian WT Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian WT pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar WT pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

ii. Pencapaian *Approach Time (AT)*

$$\text{Pencapaian AT Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian AT pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar AT pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

iii. Pencapaian *Effective Time : Berthing Time (ET:BT)*

$$\text{Pencapaian (ET:BT)} = \frac{\text{Capaian (ET:BT) pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar (ET:BT) pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

Dengan demikian, **Rumus Perhitungan Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan** merupakan rata-rata dari Capaian atas

Waiting Time (WT) + Approach Time (AT) + Effective Time : Berthing Time (ET:BT)



Nilai WT dan AT diperoleh dari realisasi pelayanan pemanduan di pelabuhan. Ketersediaan Tenaga Pandu dan kondisi geografis alur pelayaran mempengaruhi tingkat pelayanan pandu. Permintaan pemanduan secara bersamaan namun tidak didukung oleh ketersediaan tenaga pandu akan menghambat capaian WT, sedangkan kondisi alur pelayaran yang berkelok serta arus pasang surut juga dapat menghambat capaian AT. Nilai ET:BT merupakan perbandingan waktu kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal (ET) dengan waktu kapal tambat di dermaga (BT). Pencapaian ET:BT sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan tenaga kerja di pelabuhan. Saat terjadi hujan, maka aktifitas kegiatan bongkar muat akan dihentikan sementara. Penggunaan tenaga kerja di pelabuhan masih dominan, sehingga aktifitas bongkar muat di pelabuhan akan terhambat dengan menurunnya produktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan. Realisasi Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan terdiri dari:

$$\text{Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan} = \frac{\text{Pencapaian WT} + \text{Pencapaian AT} + \text{Pencapaian (ET:BT)}}{3}$$

Realisasi Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan Per Bulan (OTP) terdiri dari:

$$\text{Pencapaian AT Pelabuhan} = \frac{96\%}{84\%} \times 100\% = 114\%$$

$$\text{Pencapaian WT Pelabuhan} = \frac{71\%}{84\%} \times 100\% = 84\%$$

$$\text{Pencapaian (ET:BT) Pelabuhan} = \frac{82\%}{84\%} \times 100\% = 98\%$$

Sehingga diperoleh:

$$\text{OTP Transportasi Laut} = \frac{91\% + 93\% + 97\% + 66\% + 64\% + 58\% + 93\% + 93\% + 90\% + 82\% + 87\% + 79\%}{12} = 83\%$$

$$\text{Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan} = \frac{114\% + 84\% + 98\%}{3} = 99\%$$

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan upaya - upaya dalam rangka meningkatkan Persentase Pencapaian Kinerja Pelayanan Pelabuhan dimasa mendatang sebagai berikut :

- Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Kinerja Operasional Pelabuhan untuk meningkatkan angka realisasi yang tercatat;
- Menghimbau UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menerbitkan/merubah standar kinerja yang disesuaikan kondisi operasional pelabuhan;



- iii. Data diambil dari Aplikasi Sirani posisi 10 Januari 2024;
- iv. Melakukan penyesuaian terkait standarisasi layanan antar pelabuhan yang diberikan oleh pihak operator pelabuhan.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) Ketiga (3) :

Untuk IKP 3 Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul, yaitu pada Tahun 2023 terdapat target sebesar 84% dengan realisasi sebesar 83% sehingga persentase pencapaian sebesar 99% sehingga kurang dari target yang telah ditetapkan sedangkan Tahun 2022 target sebesar 83% dengan realisasi sebesar 79% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 95,18% dan sehingga kurang dari target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelayanan masing-masing terminal di pelabuhan yang menyebabkan adanya perubahan layanan yang diberikan.

Tabel III.1.10. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3)

IKU (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKP (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	Target	83	84
				Realisasi	79,00	83
				Kinerja (%)	95,18	99

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) Ketiga(3) :

Untuk IKP 3 Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul pada Tahun 2023 terdapat realisasi sebesar 83% dari target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 84% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 99% sehingga kurang dari target yang telah ditetapkan.



Tabel III.1.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	84	83	99

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut

c. SASARAN PROGRAM (3)

Sasaran Program **Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

4) Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4) adalah **“Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut”**

a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) :**

Tabel III.1.12. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	0,81	0,86	0,89	0,84	0,84	113,4

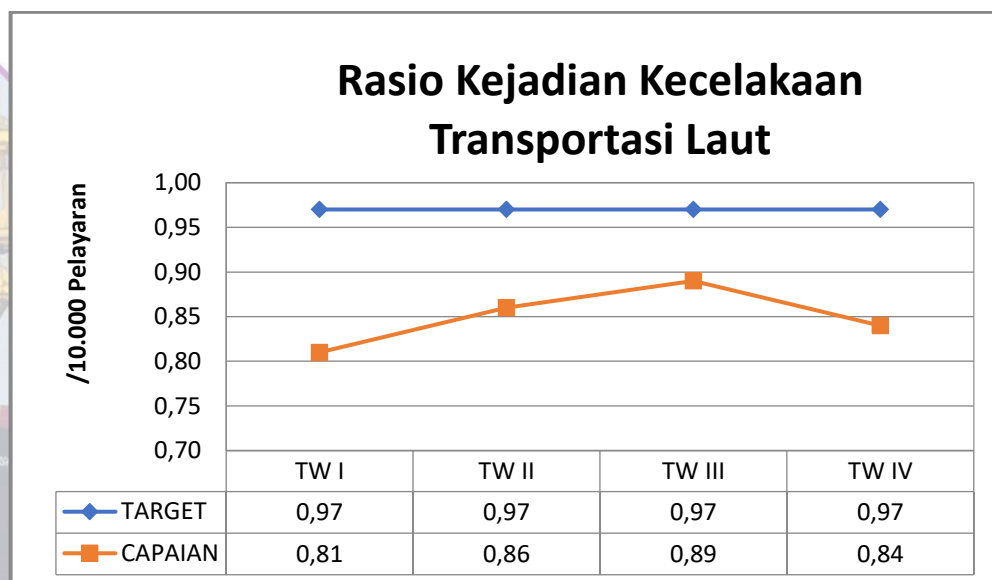
Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut target tahun 2023 sebesar 0,97/10.000 Pelayaran. Terlihat realisasi pada Triwulan I sebesar 0,81 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 3 orang), dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 116,15%. realisasi pada Triwulan II sebesar 0,86 dengan persentase pencapaian terhadap target



sebesar 111,34% dan realisasi pada Triwulan III sebesar 0,89 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 10 orang) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 108,25% dan realisasi pada Triwulan IV sebesar 0,84 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 10 orang) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 113,4%

Grafik III.1.4. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut



Realisasi capaian rasio kejadian kecelakaan ini dihitung berdasarkan perhitungan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut} = \frac{\Sigma \text{Kejadian Kecelakaan}}{\Sigma \text{SPB yang diterbitkan}} \times 10.000 \text{ Pelayaran}$$

$$\begin{aligned} \text{Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut} &= \frac{93}{1.111.319} \times 10.000 \\ &= 0,84 \end{aligned}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{(0,97 - (0,84 - 0,97))}{0,97} \times 100\% \\ &= 113,4 \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada Triwulan I sebanyak **370.010** dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 13 kejadian, manusia sebesar 7 kejadian dan teknis 10 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,81



Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 116,15%, sedangkan

Pada Triwulan II sebanyak **491.115** dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 17 kejadian, manusia sebesar 9 kejadian dan teknis 16 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,86 Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 111,34%.

Sampai dengan Triwulan III sebanyak **675.677** dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 25 kejadian, manusia sebesar 12 kejadian dan teknis 23 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,89 Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 108,25%.

Pada Triwulan IV sebanyak **1.111.319** dokumen SPB dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 51 kejadian, manusia sebesar 13 kejadian dan teknis 29 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,84 Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 113,4%.%

Dalam rangka mengurangi rasio kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor perhubungan laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut:

- i. Penerbitan maklumat pelayaran tentang peringatan cuaca *extrim* secara berkala;
- ii. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
- iii. Evaluasi Monitoring Perwira Jaga Dalam Penerbitan SPB;
- iv. Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla;
- v. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- vi. Pelaksanaan Kegiatan Uji Petik Pemeriksaan Kapal menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
- vii. Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana teknis;
- viii. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal Pelayaran rakyat



Tabel III.1.13. Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2023

NO	BULAN	FAKTOR PENYEBAB			TRIWULANAN	JUMLAH SPB 2023	
		ALAM	MANUSIA	TEKNIS		BULANAN	TRIWULANAN
1	Januari	7	1	3	30	96.723	370.010
2	Februari	3	4	4		149.379	
3	Maret	3	2	3		123.908	
4	April	0	2	0	12	36.409	121.105
5	Mei	11	0	4		41.062	
6	Juni	3	0	2		43.634	
7	Juli	1	0	1	18	50.041	184.562
8	Agustus	7	0	5		54.030	
9	September	0	3	1		80.491	
10	Oktober	7	0	2	33	144.917	435.642
11	November	5	0	4		144.195	
12	Desember	14	1	0		146.529	
	TOTAL	51	13	29	93		1.111.319

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Tabel III.1.14. Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2023

No	Lokasi Kecelakaan Kapal	Jumlah Kecelakaan	Penyebab	Tanggal Kejadian
1	Ksop Labuan Bajo	1	Alam	Januari
2	Ksop labuan Bajo	1	Alam	Januari
3	Upp Selayar	1	Alam	Januari
4	Upp Batang	1	Alam	Januari
5	Upp Nusa Penida	1	Alam	Januari
6	Upp Sungai Nyamuk	1	Manusia	Januari
7	Ksop Gresik	1	Teknis	Januari
8	Upp Bawean	1	Alam	Januari
9	Upp Labuhan	1	Alam	Januari
10	Ksop Bitung	1	Teknis	Januari
11	Ksop Tanjung Balai Karimun	1	Teknis	Januari
12	Ksop Gresik	1	Teknis	Februari
13	Ksop Tanjung Pinang	2	Teknis	Februari
14	Upp Lahewa	1	Alam	Februari
15	Ksop Banjarmasin	2	Manusia	Februari
16	Ksop Pekanbaru	2	Alam	Februari
17	Ksop Selat Panjang	1	Manusia	Februari
18	Ksop Merauke	1	Teknis	Februari
19	Upp Bawean	1	Alam	Februari
20	Upp Pulau Bunyu	1	Alam	Maret
21	Ksop Waingapu	1	Manusia	Maret
22	Ksop Waingapu	1	Alam	Maret
23	Ksop Probolinggo	3	Teknis	Maret



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

24	Ksop Pangkalbalam	1	Alam	Maret
25	Upp Pemenang	1	Manusia	Maret
26	Ksop Banjarmasin	1	Manusia	April
27	Upp Sungai Guntung	1	Manusia	April
28	Ksop Sunda Kelapa	1	Teknis	Mei
29	Ksop Probolinggo	1	Teknis	Mei
30	Upp Padang Tikar	1	Teknis	Mei
31	Upp Teminabuan	1	Alam	Mei
32	Ksop Tanjung Wangi	1	Teknis	Mei
33	Ksop Kepulauan Seribu	1	Teknis	Juni
34	Upp Bawean	1	Alam	Juni
35	Ksop Panarukan	1	Alam	Juni
36	Ksop Kotabaru	1	Teknis	Juni
37	Ksop Probolinggo	1	Alam	Juni
38	Ksop Kijang	1	Alam	Juli
39	Ksop Sampit	1	Teknis	Juli
40	Ksop Sampit	1	Teknis	Agustus
41	Ksop Labuhan Bajo	1	Alam	Agustus
42	Ksop Sorong	1	Alam	Agustus
43	Upp Singkil	1	Alam	Agustus
44	Upp Labuhan	1	Alam	Agustus
45	Ksop Kepulauan Seribu	1	Teknis	Agustus
46	Upp Sanana	1	Teknis	Agustus
47	Ksop Marunda	1	Alam	Agustus
48	Ksop Kendari	1	Alam	Agustus
49	Upp Pomako	1	Alam	Agustus
50	Ksop Sampit	1	Teknis	Agustus
51	Upp Bulukumba	1	Teknis	Agustus
52	Upp Branta	1	Teknis	September
53	Ksop Manokwari	1	Manusia	September
54	Ksop Teluk Bayur	1	Manusia	September
55	Upp Nusa Penida	1	Manusia	September
57	UPP Kelas II Tana Paser	1	Teknis	Oktober
58	UPP Kelas II Benete	1	Alam	Oktober
59	KSOP Kelas III Pekanbaru	1	Alam	Oktober
60	UPP Kelas II Nusa Penida	1	Teknis	Oktober
61	KSOP Kelas IV Bakauheni	1	Teknis	Oktober
62	UPP Kelas III Jailolo	1	Alam	Oktober
63	KSOP Kelas II Teluk Palu	1	Teknis	November
64	KSOP Kelas IV Nunukan	1	Teknis	November
65	UPP Kelas II Satui	1	Alam	November
66	KSOP Kelas I Bitung	1	Teknis	November
67	UPP Kelas II Raja Ampat	1	Teknis	November
68	UPP Kelas II Maccini Baji	1	Alam	Desember
69	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	1	Alam	Desember



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

70	KSOP Kelas I Palembang	1	Manusia	Desember
71	UPP Kelas II Raja Ampat	1	Teknis	November
72	KSOP Molawe	1	Alam	November
73	KSOP Bontang	1	Alam	November
74	KSOP Pontianak	1	Alam	November
75	UPP Susoh	1	Alam	November
76	UPP Kelas II Maccini Baji	1	Alam	Desember
77	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	1	Alam	Desember
78	KSOP Kelas I Palembang	1	Manusia	Desember
79	UPP Kelas II Tarempa	1	Alam	Desember
80	UPP Kelas II Luwuk	1	Alam	Desember
81	KSOP Kelas I Panjang	1	Alam	Desember
82	UPP Kelas II Masalembu	1	Alam	Desember
83	UPP Kelas II Benete	1	Alam	Desember
84	KSOP Kelas IV Selat Panjang	1	Alam	Desember
85	KSOP Banten	1	Alam	Desember
86	KSOP Ternate	1	Alam	Desember
87	KSOP Probolinggo	1	Alam	Desember
88	UPP Karimun Jawa	1	Alam	Desember
89	KSOP Kelas II Benoa	1	Alam	Desember
Total		93		

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Faktor Penyebab terjadinya kecelakaan :

- i. Faktor Manusia : Human Error, kesalahan menerapkan standar profesi kepelautan
- ii. Faktor Alam : Cuaca Buruk
- iii. Faktor Teknis : Konsleting kelistrikan, rusaknya kemudi kapal, kerusakan lambung kapal

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) Keempat (4) :

Untuk IKP 4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut, yaitu pada Tahun 2023 terdapat target sebesar 0,97/10.000 pelayaran dengan realisasi sebesar 0,84/10.000 pelayaran sehingga persentase pencapaian sebesar 113,4% sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar 1,09/10.000 pelayaran dengan realisasi sebesar 0,99/10.000 pelayaran sehingga persentase pencapaian sebesar 109,17% dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena menurunnya kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut (kejadian kecelakaan kapal yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan teknis pada Tahun 2023 sebesar 93 kejadian sedangkan Tahun 2022 sebesar 108 kejadian).



Tabel III.1.15. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)

IKU (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKP (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	Target	1,09	0,97
				Realisasi	0,99	0,84
				Kinerja (%)	109,17	113,4

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) Keempat (4)

Untuk IKP 4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut, pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja sebesar 0,97/10.000 pelayaran dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,97/10.000 pelayaran sehingga persentase pencapaiannya sebesar 113,4% yang artinya melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena menurunnya kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut (kejadian kecelakaan kapal yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan teknis pada Tahun 2023 sebesar 93 kejadian).

Tabel III.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	0,97	0,84	113,4

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut



5) Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5) adalah “Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut”

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) Kelima (5) :

Tabel III.1.17. Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut

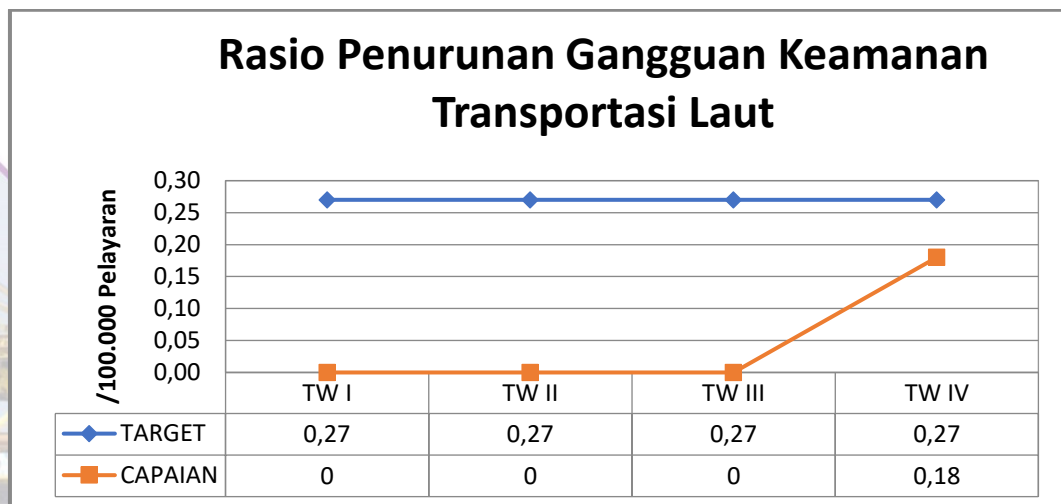
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27	0	0	0	0,18	0,18	133,33

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun target Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 0,27/100.000 Pelayaran. Pencapaian pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat 2 laporan gangguan keamanan (pencurian barang di dalam container di perairan karimun kecil pada bulan Oktober 2023 dan pencurian di atas kapal di perairan Pelabuhan Dumai pada bulan Desember 2023) sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 133,33%. Terkait 2 kejadian tersebut dari Direktur KPLP sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait mengenai Pengawasan, Keamanan, dan Keselamatan Pelayaran arahan dari Direktur KPLP agar UPT terkait apabila ada kejadian pencurian dan sebagainya untuk mengirim surat sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan pihak KSOP terkait dapat membuat SOP terkait kejadian tersebut agar tidak terulang kembali dan juga menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang dapat dilakukan seperti meminta kepada Owner agar dapat memasang CCTV di Kapal dan dapat memberikan laporan kepada Kepala Kantor KSOP terkait dan ke depannya permasalahan ini akan dirapatkan secara nasional ke Instansi terkait, dapat dilakukan patroli bersama disesuaikan di titik-titik yang rawan.



Grafik III.1.5. Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut



$$\text{Rasio Gangguan Keamanan Transportasi Laut} = \frac{2 \text{ kejadian}}{1.111.319} \times 100.000 \text{ SPB} = 0$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(0,27 - (0,27 - 0,18))}{0,27} \times 100\%$$

$$= 133,33$$

Menurut Amandemen *Safety Of Life At Sea (SOLAS)* pada Chapter XI-2 tentang *International Ship And Port Facility Security Code (ISPS Code)*/Keamanan *Maritime* yang termasuk Gangguan Keamanan adalah sebagai berikut :

- i. Perusakan terhadap atau penghancuran terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan contohnya dengan alat peledak, pembakaran dengan sengaja, tindakan sabotase atau corat coret;
- ii. Pembajakan atau penyitaan kapal atau penyanderaan orang di atas kapal;
- iii. Merusak muatan, peralatan kapal yang perlu atau sistemnya, tempat penyimpanan kapal;
- iv. Keluar masuk secara tidak sah atau menggunakannya termasuk kehadiran penumpang gelap;
- v. Penyelundupan senjata atau peralatannya termasuk senjata pemusnah massal;
- vi. Menggunakan kapal untuk membawa semua yang bermaksud menyebabkan peristiwa keamanan dan atau peralatannya;



- vii. Menggunakan kapal itu sendiri sebagai senjata atau sarana untuk membuat kerusakan atau penghancuran;
- viii. Penyerangan dari arah laut ketika di Dermaga atau di tempat labuh;
- ix. Penyerangan ketika di laut.

Dalam rangka mengurangi gangguan keamanan transportasi laut langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yaitu:

- i. Melaksanakan verifikasi manajemen keamanan fasilitas pelabuhan setiap 2.5 tahun sekali;
- ii. Melaksanakan verifikasi keempat (tambahan) manajemen keamanan fasilitas pelabuhan yang dilaksanakan sewaktu-waktu;
- iii. Menginstruksikan UPT untuk melaksanakan inspeksi bulanan sesuai dengan SE Dirjen Hubla No UM. 008/45/15/DJPL-14;
- iv. Menginstruksikan agar faspel melaksanakan training/ sosialisasi keamanan fasilitas pelabuhan sesuai dengan SE Dirjen Hubla No. UM.003/17/14/DJPL-15.

Adapun upaya yang sudah dilakukan Ditjen Perhubungan Laut dalam Pencegahan Gangguan Keamanan Pelayaran sebagai berikut :

- i. Patroli rutin yang dilaksanakan oleh unsur penegakan hukum oleh UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik di wilayah pelabuhan maupun perairan;
- ii. Melakukan patroli gabungan dengan unsur penegakan hukum dari Institusi Polri dan TNI;
- iii. Pengadaan senjata api di atas Kapal Patroli;
- iv. *Exercise* penggunaan senjata api patroli;
- v. Pembangunan Kapal Patroli KPLP.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) Kelima (5) :

Untuk IKP 5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut, yaitu pada Tahun 2023 terdapat target sebesar 0,27/100.000 pelayaran dengan realisasi 0,18 dengan 2 Kejadian sehingga persentase pencapaian sebesar 133,33% sedangkan Tahun 2022 target sebesar 0,28/100.000 pelayaran dengan realisasi 0 sehingga persentasenya sebesar 200% yang artinya tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut di area pelabuhan ataupun di atas kapal dan sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Tabel III.1.18. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program Kelima (5)

IKU (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKP (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut	/100.000 pelayaran	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 pelayaran	Target	0,28	0,27
				Realisasi	0	0,18
				Kinerja (%)	200	133,33

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) Kelima (5) :

Untuk IKP 5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut, pada Tahun 2023 terdapat realisasi sebesar 0,18 dengan 2 kejadian yaitu 0,27/100.000 pelayaran dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,27/100.000 pelayaran sehingga persentase pencapaian sebesar 200%, sedangkan Tahun 2022 target sebesar 0,28/100.000 pelayaran dengan realisasi 0 sehingga persentasenya sebesar 200% yang artinya tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut di area pelabuhan ataupun di atas kapal dan sampai dengan 31 Desember 2023 tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel III.1.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 pelayaran	0,27	0,18	133,33

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut



6) Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6) adalah “Tingkat Keandalan Kenavigasian”

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Program Tingkat Keandalan Kenavigasian (IKP 6) Keenam:

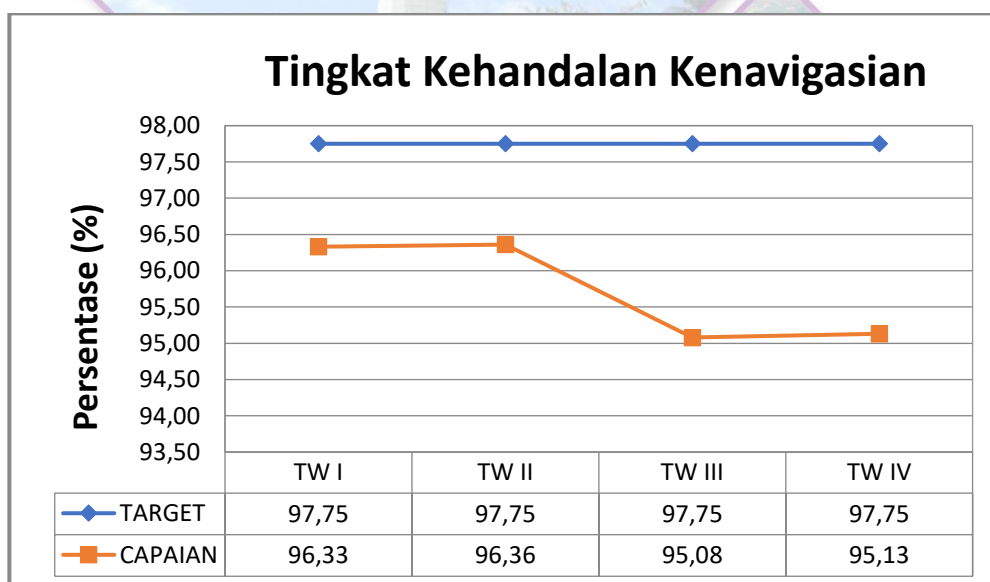
Tabel III.1.20. Tingkat Keandalan Kenavigasian

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,75	96,33	96,36	95,08	95,13	95,13	97,32

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 97,75%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 96,33%, Realisasi pada Triwulan II dan sebesar 96,36, pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 95,08 dan realisasi pada Triwulan IV adalah sebesar 95,13. Prosentase pencapaian terhadap target secara total sebesar 97,32% sehingga belum memenuhi target yang telah ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan.

Grafik III.1.6. Tingkat Keandalan Kenavigasian





Tingkat Keandalan Kenavigasian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tingkat Keandalan Kenavigasian

$$= \frac{\text{Tingkat Keandalan SBNP} + \text{Tingkat Keandalan Telkompel}}{2}$$

$$= \frac{92,43 \% + 97,83\%}{2}$$

$$= 95,13 \%$$

Tingkat Keandalan SROP dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{hari SROP yang berfungsi dalam 1 tahun}}{\sum \text{SROP eksisting} \times 365 \text{ hari}}$$

$$\text{Tingkat Keandalan SROP} = \frac{57.670}{158 \times 365} \times 100\% = \frac{57.670}{57.670} = 100\%$$

Tingkat Keandalan VTS dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\sum \text{hari VTS berfungsi dalam 1 Tahun}}{\sum \text{VTS eksisting} \times 365 \text{ hari}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Keandalan VTS} = \frac{8.030}{23 \times 365} \times 100\% = \frac{8.030}{8.395} = 95,65\%$$

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 97,75%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 96,33% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 98,55% dan belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan. Dan Realisasi pada Triwulan II dan sebesar 96,36 dan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 95,08 sehingga pencapaian kinerja terhadap target sebesar 97,27% belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan, Jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan IV tahun 2023 sebanyak 5.134 unit, terdiri dari 3.014 milik DJPL dan 2.120 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 104,993 hari. Adapun Persentase kelainan SBNP hingga saat ini sebagai berikut:



$$\frac{\text{Hari Kelainan}}{365 \text{ hari} \times \sum \text{SBNP Bersuar}} \times 100 \% = \frac{141.770}{365 \text{ hari} \times 5.134} \times 100 \% = 7,57\%$$

Sehingga Tingkat Kehandalan SBNP adalah $100\% - 7,57\% = 92,43\%$.

Sedangkan Tingkat Kehandalan Telkompel dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kehandalan Telkompel} &= \frac{\text{Tingkat Kehandalan SROP} + \text{Tingkat Kehandalan VTS}}{2} \\ &= \frac{100 \% + 95,65 \%}{2} \\ &= 97,83 \% \end{aligned}$$

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian telah melakukan upaya – upaya untuk Peningkatkan Kehandalan Kenavigasian sebagai berikut :

- i. Direktorat Kenavigasian akan berkirin surat ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut terkait Pemeliharaan SBNP yang mengalami kerusakan;
- ii. Melakukan Pemeliharaan SBNP dari masing – masing UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut yang mengalami kerusakan;
- iii. Mengupayakan dipenuhinya kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kehandalan baik SBNP maupun Telekomunikasi Pelayaran.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kehandalan Kenavigasian (IKP 6) Keenam :

Untuk IKP 6 Tingkat Kehandalan Kenavigasian, yaitu pada Tahun 2023 terdapat target sebesar 97,75 % dengan realisasi sebesar 95,13% sehingga persentase pencapaian sebesar 97,32% sedangkan Tahun 2022 target sebesar 97,75% dengan realisasi sebesar 96,33% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 98,55%. Pada Tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran yang diakibatkan karena adanya penghematan / *automatic adjustment* anggaran untuk biaya pemeliharaan.



Tabel III.1.21. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6)

IKU (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKP (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	Target	97,75	97,75
				Realisasi	96,33	95,13
				Kinerja (%)	98,55	97,32

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Keandalan Kenavigasian (IKP 6) Keenam (6) :

Untuk IKP 6 Tingkat Keandalan Kenavigasian, pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja sebesar 95,13% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 97,75% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 97,32%. Pada Tahun 2023 belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran yang diakibatkan karena adanya penghematan / *automatic adjustment* anggaran untuk biaya pemeliharaan.

Tabel III.1.22. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,75	95,13	97,32

Sumber data : Direktorat Kenavigasian Laut, Ditjen. Perhubungan Laut

**d. SASARAN PROGRAM (4)**

Sasaran Program **Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

7) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7) adalah “**Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)**”

a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) Ketujuh:**

Tabel III.1.23. Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

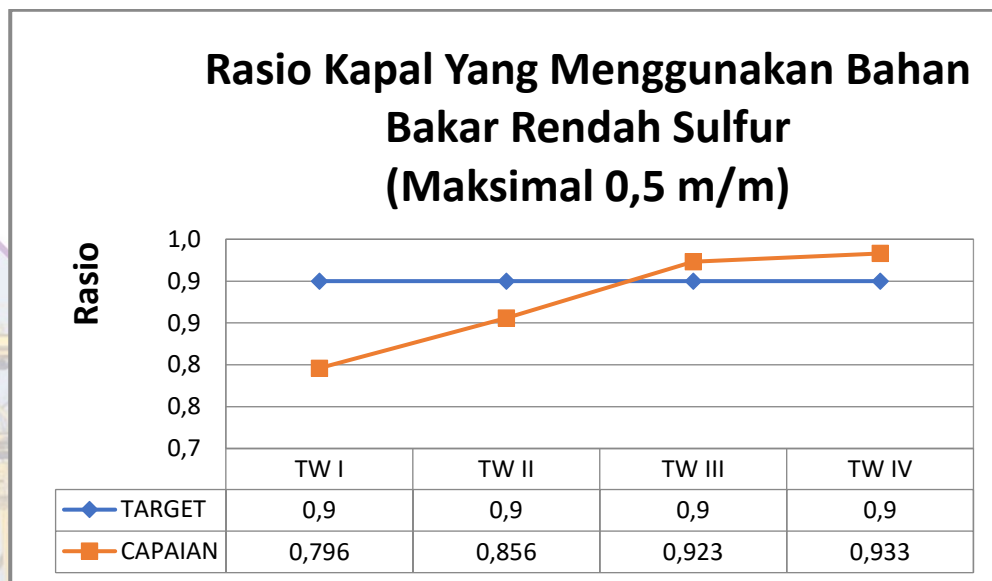
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,9	0,796	0,856	0,923	0,933	0,933	103,67

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) Tahun 2023 Rasio sebesar 0,9. Pencapaian Triwulan I rasio sebesar 0,796, pada Triwulan II tercapai sebesar 0,856 rasio, pada Triwulan III tercapai sebesar 0,923 rasio dan pada Triwulan IV terealisasi sebesar 0,933 rasio sehingga persentase pencapaian terhadap keseluruhan target saat ini sebesar 103,67%. Capaian tersebut telah melebihi target tahunan yang ditetapkan karena banyaknya permohonan penerbitan sertifikat yang masuk. Tingginya capaian kinerja pada Triwulan IV merupakan akumulasi realisasi dari periode sebelumnya yang selalu melebihi target tahunan sehingga berdampak terhadap realisasi tahun berjalan.



Grafik III.1.7. Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)



Rumus perhitungan:

Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

$$= \frac{\text{Jumlah sertifikat pencegahan pencemaran (IAPP dan SNPP)}}{\text{Jumlah kapal berbendera Indonesia > 400GT yang terdaftar}}$$

Tabel III.1.24. Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan dan Jumlah Kapal > 400 GT Terdaftar

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des	TOTAL
Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	11.076	11.635	11.983	12.264	12.593	12.038	13.284	13.647	13.986	14.061	14.094	14.134	14.134
Jumlah kapal >400GT terdaftar	15.063	15.063	15.063	15.118	15.118	15.118	15.151	15.151	15.151	15.151	15.151	15.151	15.151

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan Aplikasi *kapal.dephub.go.id*, Ditjen. Perhubungan Laut.

Note : Sertifikat pencegahan pencemaran merupakan bukti bahwa kapal yang bersangkutan memenuhi kriteria diantaranya menggunakan bahan bakar rendah sulfur.

Penerbitan sertifikat Pencegahan Pencemaran dilaporkan setiap bulan dengan memaparkan jumlah penerbitan sertifikat jenis Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) yang diperuntukkan bagi kapal-kapal berbendera Indonesia berukuran >7 GT yang memiliki daerah pelayaran dalam negeri dan/atau Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Udara (*International Air Pollution Prevention/IAPP*) untuk kapal berbendera Indonesia berukuran >400GT



yang berlayar secara internasional. Dalam sertifikat tersebut terdapat klausul yang menyatakan kadar kandungan sulfur pada bahan bakar yang dipakai oleh sebuah kapal. Persyaratan penerbitan sertifikat ini adalah sebagai berikut:

- i. Surat Permohonan;
- ii. *Copy* Sertifikat IAPP/SNPP Sementara/Sebelumnya (untuk renewal);
- iii. Buku Laporan Pemeriksaan *Marine Inspector*;
- iv. *Copy* Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal;
- v. *Copy* Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Surat Laut atau Pas Besar).

Informasi kadar sulfur diperoleh pada saat *Marine Inspector* melakukan pemeriksaan teknis kapal dibuktikan dengan nota kualitas BBM yang diperoleh dari suplier BBM saat pengisian. Apabila dirasa terdapat bias, *Marine Inspector* di lapangan dapat melakukan pengecekan langsung menggunakan alat *portable sulfur in fuel oil analyzer*. Setelah hal tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku sertifikat dapat diproses lebih lanjut. Pengecekan teknis lapangan dapat dibantu oleh *Marine Inspector* dari Unit Pelaksana Teknis DJPL di wilayah kapal tersebut bersandar dengan hasil berupa penerbitan sertifikat sementara, untuk selanjutnya perlu dilakukan penerbitan sertifikat permanen di Kantor Pusat DJPL (c.q. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan).

Selain dari sertifikat pencegahan pencemaran yang diterbitkan mulai tahun 2020, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tentang Batasan Kandungan Sulfur pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal menyatakan bahwa semua pemilik/operator kapal yang memiliki/mengoperasikan kapal yang berukuran GT 5000 atau lebih wajib mengumpulkan data pemakaian bahan bakar kapalnya selama satu tahun melalui aplikasi dcs-ditkapel.dephub.go.id.

Kendala tim teknis pada saat melakukan penerbitan sertifikat adalah sebagai berikut:

- i. Kurangnya jumlah tenaga fungsional teknis (*Marine Inspector*) pada Subdirektorat yang menangani. Banyaknya permohonan yang masuk sehingga *load* pekerjaan meningkat selain itu juga terdapat beberapa pegawai yang mengalami promosi jabatan dan belum memiliki pelaksana pengganti;
- ii. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menyampaikan permohonan sekaligus pemrosesan penerbitan sertifikat masih perlu dikembangkan dengan menambah fitur-fitur yang memudahkan pengguna juga petugas dalam mengolah data. Proses penerbitan sertifikat pencegahan pencemaran saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara *online* dikarenakan output sertifikat masih menggunakan blanko cetak sehingga masih memerlukan kontak fisik dengan pengguna jasa untuk pengambilan sertifikat yang telah diterbitkan.



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) Ketujuh (7) :

Untuk IKP 7 Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M), yaitu pada Tahun 2023 terdapat target sebesar 0,9 Rasio dengan realisasi sebesar 0,933 rasio sehingga persentase pencapaian sebesar 103,67%, sedangkan Tahun 2022 target sebesar 0,6 rasio dengan realisasi sebesar 0,715 rasio sehingga persentasenya sebesar 119,2% sehingga realisasinya melebihi target yang ditetapkan karena sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal, para pemilik Kapal berbendera Indonesia berusaha untuk segera memenuhi Peraturan tersebut.

Tabel III.1.25. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)

IKU (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKP (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	Target	0,6	0,9
				Realisasi	0,715	0,933
				Kinerja (%)	119,2	103,67

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) Ketujuh (7) :

Untuk IKP 7 Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M), pada Tahun 2023 terdapat realisasi sebesar 0,933 rasio dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,8 rasio sehingga persentasenya sebesar 116,6 % dan melebihi target yang ditetapkan karena diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar



yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal, para pemilik Kapal berbendera Indonesia berusaha untuk segera memenuhi Peraturan tersebut.

Tabel III.1.26. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,8	0,933	116,62

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut

- 8) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8) adalah “**Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan**”
- a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8) Kedelapan (8):**

Tabel III.1.27. Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2023					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan I terdapat 2 laporan kejadian pencemaran di wilayah Muara Sungai Noyo, desa Faekhuna'a, Nias Utara dan Di sekitar Perairan Dermaga PT Mcdermott Indonesia, Batam yang berhasil ditanggulangi sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%. Sedangkan pada Triwulan II terdapat 2 laporan kejadian pencemaran di Di Area Pantai nirwana Gardens Resort, Bintan dan Di Perairan Tanjung Berakit,



Riau Batam yang berhasil ditanggulangi sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100% dan pada Triwulan III dan IV tidak terdapat laporan kejadian pencemaran sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%.

Grafik III.1.8. Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan



Dari setiap adanya laporan terjadinya tumpahan minyak telah dilakukan upaya penanggulangan oleh Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan melakukan koordinasi dari Syahbandar setempat. Hal ini sesuai amanat Perpres 109 Tahun 2006 serta PM.58 Tahun 2013 bahwa Syahbandar mengkoordinasikan aset penanggulangan tumpahan minyak yang dimiliki Tersus, Tuks dan BUP di pelabuhan. Frekuensi kejadian tumpahan minyak telah dilaporkan dapat ditanggulangi, adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \rightarrow \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi = Jumlah kejadian pencemaran yang berhasil ditanggulangi

Target = Jumlah kejadian pencemaran selama periode evaluasi



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8) Kedelapan (8):

Untuk IKP 8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sama, yaitu terdapat target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga persentase pencapaian sebesar 100% artinya pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan yang dilaporkan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil ditanggulangi.

Tabel III.1.29. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2023 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8)

IKU (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	IKP (TAHUN 2023)	SATUAN TAHUN 2023	KRITERIA	TAHUN	
					2022	2023
Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	Target	100	100
				Realisasi	100	100
				Kinerja (%)	100	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8) Kedelapan :

Untuk IKP 8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan, pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 100% sehingga pencapaian kinerjanya 100% sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan artinya pada Tahun 2022 kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan yang dilaporkan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil ditanggulangi.



Tabel II.1.14. Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi

NO	KEJADIAN		NAMA KAPAL	JENIS KAPAL	PENYEBAB	TUMPAHAN MINYAK		TINDAKAN PENANGGULANGAN
	TANGGAL	LOKASI				JENIS	JUMLAH	
1.	11 FEBRUARI 2023	Muara Sungai Noyo, desa Faekhuna 'a, Nias Utara 1005'45.8 "N 97020'50.9"E	MT. AASIH		Terdapat kebocoran akibat kapal kandas	aspal	± Liter	MT AASIH berkoordinasi dengan KUPP Kelas III Lahewa melakukan pembersihan ceceran aspal di area perairan dibawah koordinator KLHK.
2.	27 MARET 2023	Di sekitar Perairan Dermaga PT Mcdermot Indonesia , Batam	MV. ARKLIFT	Motor Vessel	Terdapat kebocoran dari bilge tank denga sebaran kurang lebih 100 meter		± Liter (tidak dijelaskan)	a. MV ARKLIFT dan PT. Gesuri Lloyd Indonesia (keagenan kapal) berkoordinasi dengan KSOP Batam dalam penanggulangan pencemaran dengan memasang oilboom di sekeliling kapal, serta pemakaian oil absorbent socks dan oil absorbent pad pada area perairan yang tercemar sehingga pencemaran dapat diatas dalam kurun waktu 8 jam. Tgl 28 Maret 2023 KSOP Khusus Batam telah melakukan pemantauan dan pengawasan didaerah dermaga dan sudah tidak ditemukan pencemaran tersebut.



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

3.	12 APRIL 2023	Di Area Pantai nirwana Gardens Resort, Bintan	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Terdapat tumpahan minyak hitam			a. Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban telah sampai di lokasi tumpahan minyak dan melaksanakan koordinasi dengan pihak Nirwana Hotel Resort, Polisi Air dan Udara Polres Bintan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, dan pihak-pihak terkait lainnya; b. Tumpahan minyak masih dalam keadaan cair sehingga proses pembersihan dan pengumpulan sisa tumpahan minyak dapat dilakukan setelah minyak dalam keadaan menggumpal dengan kondisi tercampur lumpur atau pasir pantai. Rencananya minyak tersebut akan dikumpulkan dalam <i>storage tank</i> berupa drum dan kemudian akan di tindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan; Tumpahan minyak tersebut dapat ditanggulangi opoleh pihak-pihak terkait yang terlibat;
4.	1 Mei 2023	Di Perairan Tanjung Berakit, Riau Batam	MT Pablo	Motor Tanker	Terdapat kebocoran dikarenakan kapal terbakar	Minyak Hitam		a. Kementerian perhubungan dalam hal ini Direktorat KPLP beserta KLHK dan pihak-pihak terkait sedang menindaklanjuti tumpahan minyak tersebut dikarenakan masuk dalam Tier 3, karena dari kebakaran tersebut mengakibatkan tumpahan minyak yang tersebar ke lintas batas negara;



Tabel III.1.30. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut



B. KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tabel III.2.1. Kontribusi Terhadap Capaian IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET & Realisasi PK			PAGU Rp.	REALISASI		Capaian (%)
								Rp.	Fisik (%)	
				T	R	%				
1.	Meningkatnya Optimalisasi Pengelola Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai	97,40	42,23		10.425.671.349.000	6.145.013.295.784		58,94

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diakses pada tanggal 31 Desember 2023 yang diakses tanggal 25 Januari 2023



C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2023 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3.1. Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2023

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	26.399.080.000	29,710,456,00	29,327,435,490
2	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut	3.122.967.266.000	2.966.929.329.000	2.945.961.902.051
3	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut	24.371.483.000	42,273,979,000	41,974,704,080
4	Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut	6.401.368.000	5,080,296,000	4,878,480,799
5	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	1.004.504.704.000	1,241,753,970,000	1,086,200,145,872
6	Pelayanan Transportasi Laut	1.601.442.730.000	2,307,076,275,000	2,302,785,840,289
7	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	2.159.087.820.000	3,368,093,965,000	3,350,721,943,868
8	Penunjang Teknis Transportasi Laut	639.132.962.000	666,036,029,000	653,128,509,679
TOTAL		8.584.307.413.000	10,647,904,299,000	10,414,978,962,128

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Posisi dan diakses pada tanggal 12 Februari 2024)

Selama tahun 2023 Revisi Anggaran telah dilakukan sebanyak 18 (Delapan belas) kali sebagai berikut:

A. Revisi 1 (pengesahan Nomor S-990/AG/AG.3/2022 tanggal 26 Desember 2022)

Revisi anggaran berupa pemblokiran anggaran (automatic adjustment) sebesar Rp374.542.596.000,00 pada DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:



1. Belanja pegawai (sumber dana RM) dilakukan pemblokiran pada 297 satuan kerja sebesar Rp177.469.677,00 dengan mempertimbangkan pegawai yang pensiun di tahun 2023.
2. Belanja barang (sumber dana RM) sebesar Rp74.548.777.000,00 :
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam rangka efisiensi, dilakukan pemblokiran automatic adjustment sebesar Rp 69.548.481.000,- ;
 - b. Belanja barang non operasional lainnya dalam rangka efisiensi, dilakukan pemblokiran automatic adjustment sebesar Rp 5.000.296.000,-.
3. Belanja modal (sumber dana RM) sebesar Rp 40.290.524.000,00 dengan rincian:
 - a. Lanjutan Pembangunan Faspel Munse pada UPP Lapuko sebesar Rp 4.000.000.000,- dilakukan pemblokiran automatic adjustment karena merupakan sisa anggaran kontrak tahun jamak TA. 2022-2023 dan pekerjaan tersebut selesai tahun 2023.
 - b. Rehabilitasi Faspel Tana Paser pada UPP Tana Paser sebesar Rp 10.000.000.000,- dilakukan pemblokiran automatic adjustment karena merupakan sisa anggaran kontrak tahun jamak TA. 2022-2023 dan pekerjaan tersebut selesai tahun 2023.
 - c. Pembangunan Faspel Sanur pada KSOP Benoa sebesar Rp 13.000.000.000,- dilakukan pemblokiran automatic adjustment karena merupakan sisa anggaran kontrak tahun jamak TA. 2020-2023 dan pekerjaan tersebut selesai tahun 2023.
 - d. Kegiatan-kegiatan yang dapat diefisiensikan karena terdapat perubahan/penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, dapat ditunda, dan tidak mendesak antara lain:
 - 1) Pembangunan Sisi Darat Pelabuhan Daruba pada UPP Daruba sebesar Rp 9.390.524.000,-;
 - 2) Studi Penyusunan RIP dan DLKR DLKP pada Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhan Pusat sebesar Rp 1.000.000.000,-;
 - 3) Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Monitoring Pemakaian Bahan Bakar pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat sebesar Rp 2.400.000.000,-;
 - 4) Pengadaan, Perizinan, dan Distribusi Senjata Api pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebesar Rp 250.000.000;
 - 5) Pengadaan A1S (Monitoring System Kapal) untuk Kapal Kelas IV dan V pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebesar Rp 250.000.000.
4. Kegiatan yang masih terblokir/masih tercantum dalam catatan halaman IV.A DIPA (sumber dana RM) sebesar Rp 82.233.618.000,-, dengan rincian:
 - a. Pembangunan Penanggulangan Pencemaran Terminal Marine Polution (kegiatan pendukung IKN) pada KSOP Balikpapan sebesar Rp 54.033.618.000,- dilakukan pemblokiran automatic adjustment karena masih menunggu hasil penyusunan DED, status



lahan HPL Pelindo, lokasi direktif SE Menkeu terkait dukungan IKN dan posisi saat ini masih terblokir.

- b. Rehabilitasi Dermaga, Trestle dan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Penajam Paser (kegiatan pendukung IKN) pada KSOP Balikpapan sebesar Rp 28.200.000.000,- dilakukan pemblokiran automatic adjustment karena belum ada DED dan kejelasan status kepemilikan lahan, lokasi direktif SE Menkeu terkait dukungan IKN dan posisi saat ini masih terblokir.

B. Revisi 2 (pengesahan Nomor S-40/AG/AG.3/2023 tanggal 29 Januari 2023)

Revisi anggaran berupa Penambahan pagu anggaran sumber dana PLN JICA Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban, sebesar Rp607.661.436.000,00, dan ralat kode nomor register SBSN kegiatan: Pembangunan Kapal Patroli Kelas III Aluminium pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai, dan Pembangunan Dermaga Kenavigasian pada Satker Distrik Navigasi Benoa.

C. Revisi 3 (pengesahan S-79/AG/AG.3/2023 tanggal 20 Februari 2023)

Revisi anggaran berupa:

1. Pergeseran/ realokasi anggaran antar satker sebesar Rp88.951.448.000,00, terdiri dari revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp44.679.512.000,00; dan sumber PNPB sebesar Rp44.271.936.000,00, dengan rincian:
 - a. Sumber dana RM sebesar Rp 49.707.364.000,-, diperoleh dari:
 - 1) Blokir reguler sebesar Rp 5.077.251.000,-
 - 2) Efisiensi anggaran sebesar Rp 44.630.113.000,-
 - b. Sumber dana PNPB sebesar Rp 44.271.936.000,-, diperoleh dari:
 - 1) Sisa anggaran kegiatan kontraktual sebesar Rp 9.238.289.000,-
 - 2) Blokir reguler sebesar Rp 4.396.490.000,-
 - 3) Efisiensi anggaran sebesar Rp 30.637.157.000,-

Sumber realokasi anggaran tersebut direalokasi untuk:

- a. Kegiatan inaportnet di 151 pelabuhan pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebesar Rp 39.870.183.000,-.
- b. Subsidi Angkutan Laut Perintis mekanisme penugasan pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebesar Rp 45.292.704.000,-, yang diperlukan dalam rangka mencukupi kebutuhan operasional perintis mekanisme penugasan sampai dengan bulan Maret 2022.



- c. Kegiatan operasional pendukung pelabuhan Patimban pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban sebesar Rp 4.813.035.000,-.
- d. Pemeliharaan aplikasi SEHATI pada Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 4.003.378.000,-.

2. Lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN/luncuran sisa anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2022) yang dilanjutkan ke TA 2023 sebesar Rp62.831.548.000,00 sebagai tindak lanjut Berita Acara Rekonsiliasi Rapat Koordinasi Realisasi Anggaran SBSN Proyek Tahun Anggaran 2022 (TA 2022) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dengan rincian:

- a. Sisa dana SYC TA. 2022 dilanjutkan ke TA. 2023 sebesar Rp 16.451.667.000,-, yaitu pada Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Tual dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban
- b. Sisa dana MYC TA. 2022 yang diluncurkan ke TA. 2023 sebesar Rp46.379.881.000,- yaitu pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan Distrik Navigasi Benoa

3. Revisi pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam satu satker sebesar Rp1.035.657.000,00 pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Anggrek dikarenakan terdapat kesalahan/koreksi jenis akun belanja, yang semula belanja modal menjadi belanja barang.

D. Revisi 4 (Pengesahan nomor S-233/AG/AG.3/2023 tanggal 5 Mei 2023)

Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran belanja negara tetap yang meliputi:

- 1. Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2023 dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran di bidang keperintisan dan kegiatan prioritas lainnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 47.681.752.000,-, dengan rincian:
 - a. Sumber dana RM sebesar Rp 33.812.944.000,-;
 - b. Sumber dana PNBP sebesar Rp 13.868.808.000,-.
- 2. Realokasi/pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Satker TA. 2023 sebesar Rp 11.008.434.000,- dengan rincian:
 - a. Sumber dana RM sebesar Rp 9.308.434.000,-;
 - b. Sumber dana PNBP sebesar Rp 1.700.000.000,-.

E. Revisi 5 (Pengesahan nomor S-292/AG/AG.3/2023 tanggal 30 Mei 2023)

Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sebesar Rp121.656.949.000,00, terdiri dari revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp40.105.665.000,00 dan sumber



PNBP sebesar Rp81.551.284.000,00 dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran di bidang keperintisan, tol laut, dan kegiatan prioritas lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pergeseran anggaran antar Rincian Output (RO) dalam satu satker yang sama, Satker Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (UPP) Bade, sebesar Rp220.000.000,00.

F. Revisi 6 (Pengesahan nomor S-325/AG/AG.3/2023 tanggal 26 Juni 2023)

Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) *automatic adjustment* guna kegiatan Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kapal perintis mekanisme penugasan, sebesar Rp95.455.888.000,00, dan Pergeseran anggaran belanja pegawai antar satker sebesar Rp4.440.059.000,00.

G. Revisi 7 (Pengesahan nomor S-406/AG/AG.3/2023 tanggal 22 Juli 2023)

Revisi pergeseran anggaran blokir Automatic Adjustment Belanja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ke BA BUN sebesar Rp177.469.677.000,00 dalam rangka penyesuaian pagu belanja pegawai tahun anggaran 2023.

H. Revisi 8 dan 9 (Pengesahan nomor S-474/AG/AG.3/2023 tanggal 20 Agustus 2023)

Revisi tersebut berupa:

1. Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp648.829.022.000, dan perubahan prognosa/perkiraan pendapatan PNBP Ditjen Hubla bertambah sebesar Rp174.543.884.000, dari semula Rp4.400.543.180.000 berubah menjadi Rp4.575.087.064.000;
2. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sebesar Rp21.318.940.000,00, terdiri dari revisi pergeseran anggaran sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp17.239.000.000,00; dan sumber PNBP sebesar Rp4.079.940.000, dan
3. Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) guna kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis, sebesar Rp44.428.240.000;

I. Revisi 10 (Pengesahan nomor S-518/AG/AG.3/2023 tanggal 3 Oktober 2023)

Revisi anggaran tersebut berupa:

1. Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp101.617.031.000,-
2. Pergeseran/realokasi anggaran antar eselon I dalam program yang sama, yakni dari Ditjen Hubla ke Setjen Kemenhub guna memenuhi kebutuhan biaya kegiatan komunikasi publik capaian-capaian Kemenhub sebesar Rp1.560.171.000.



J. Revisi 11 (Pengesahan nomor S-598/AG/AG.3/2023 tanggal 3 Oktober 2023)

Revisi tersebut berupa:

1. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker guna memenuhi kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp40.289.579.000,00
2. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sebesar Rp55.419.155.000,00, terdiri dari revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp24.705.771.000,00; dan sumber PNBPN sebesar Rp30.713.384.000,00
3. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sumber dana SBSN dalam rangka optimalisasi anggaran guna membiayai Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Bungku, Sulawesi Tengah sebesar Rp9.600.000.000,00
4. Penambahan anggaran percepatan pelaksanaan kegiatan pinjaman/PLN JICA Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban, Phase (I-1) sebesar Rp191.314.009.563,00 dan Phase (I-2) sebesar Rp325.178.698.887,00
5. Pengesahan pencantuman pembayaran ganti rugi pengadaan tanah PSN Pelabuhan Patimban oleh LMAN Semester I TA 2023 sebesar Rp975.468.666,00

K. Revisi 12 & Revisi 13 (Pengesahan nomor S-785/AG/AG.3/2023 tanggal 5 November 2023)

Revisi anggaran berupa:

1. Pergeseran/realokasi anggaran antar unit eselon I yakni dari Ditjen Perhubungan Laut ke Setjen Kementerian Perhubungan, sebesar Rp6.200.000.000,00,
2. Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) kegiatan rehabilitasi/replacement fasilitas pelabuhan laut Bonerate dan Sofifi sebesar Rp17.000.000.000,00
3. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sebesar Rp77.834.653.000,00, terdiri dari revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp29.572.200.000,00; dan sumber PNBPN sebesar Rp48.262.453.000,00
4. Revisi administrasi berupa ralat penggunaan kode KRO/RO dengan tidak mengubah peruntukan (item tetap) berupa pengadaan BBM genset pada satker KSOP Palembang, sebesar Rp120.960.000,00, dan
5. Pergeseran/realokasi anggaran untuk memenuhi adanya reorganisasi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp8.026.884.000,00 dan pergeseran target PNBPN sebesar Rp733.241.931.000,00



L. Revisi 14 & Revisi 15 (Pengesahan nomor S-813/AG/AG.3/2023 tanggal 12 November 2023) Revisi anggaran tersebut berupa:

1. Percepatan penarikan PLN JICA Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Phase (I2) sebesar Rp130.542.308.916,00,
2. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker dengan sumber dana PNPB sebesar Rp319.692.000,00,
3. Pergeseran/realokasi anggaran dari BA BUN (BA 999.08) ke BA Kementerian Perhubungan (BA 022.04) guna tambahan belanja pegawai sebesar Rp91.894.362.000,00

M. Revisi 16 (Pengesahan nomor S-842/AG/AG.3/2023 tanggal 29 November 2023)

Revisi anggaran tersebut berupa:

1. Pergeseran/realokasi belanja pegawai antar satker untuk peruntukan yang sama sebesar Rp12.215.788.000,00,
2. Pergeseran/realokasi sisa anggaran/kontrak sumber Rupiah Murni (RM) antar satker guna memenuhi kebutuhan kekurangan belanja pegawai sebesar Rp4.797.034.000,00,
3. Pergeseran anggaran antar akun dalam satu satker yang sama guna keperluan pemenuhan belanja pegawai (tunjangan kinerja) Rp 603.250.000,00, dan
4. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sumber dana PNPB sebesar Rp1.606.073.000,00

N. Revisi 17 sesuai Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-24/PB.2/2024 tanggal 17 Januari 2023

Revisi anggaran berupa revisi realokasi/pergeseran anggaran antar Satker antar wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai TA. 2023 sebesar Rp 2.667.992.000,-

O. Revisi 18 (Pengesahan nomor S-89/PB.2/2024 tanggal 12 Februari 2024)

Revisi anggaran tersebut berupa revisi realokasi anggaran antar Eselon I dalam program yang sama (Dukungan Manajemen) di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 32.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Ditjen Perhubungan Laut berkurang sebesar Rp 20.950.000.000,-;
2. Ditjen Perkeretaapian berkurang sebesar Rp 2.550.000.000,-;
3. Ditjen Perhubungan Darat berkurang sebesar Rp 7.150.000.000,-;
4. BPSDM Perhubungan berkurang sebesar Rp 1.850.000.000,-.



Tabel III.3.4. Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO.	Indikator Kegiatan Program	Target	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	97,40%	10.626.954.299.000	10.414.978.962.128	98,01%	98,01%
TOTAL						

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut





Tabel III.3.5 Realisasi Belanja Per Program

NO	Kode		Pagu Awal	Pagu Revisi	Real	%	Sisa
1.	022.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	5.461.340.147.000	7.660.037.857.000	7.469.017.060.077	97,51%	191.007.909.923
2.	022.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.122.967.266.000	2.966.929.329.000	2.945.961.902.051	99,29%	20.967.426.949
TOTAL			8.584.307.413.000	10,647,904,299,000	10.626.954.299.000	10.414.978.962.128	98,01%

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
(Posisi 31 Desember 2023).





Tabel III.3.6. Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,94	0,94	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Pagu Awal = 44.000.000.000	44.000.000.000	0	
							Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Pagu Awal = 259,761,462,000 Pagu Revisi = 602.503.798.000 Pagu Revisi = 637.883.601.000	638.052.703.000		
							Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Pagu Awal = 926.965.031.432 Pagu Revisi = 802.125.376.401 Pagu Revisi = 816.568.893.768	803.239.072.587		



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
							Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (39 layanan)	Pagu Awal = 520,343,765,000 Pagu Revisi = 628.545.162.000 Pagu Revisi = 586.335.162.000	586.335.162.000		
							Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Pagu Awal = 63,426,377,000 Pagu Revisi = 62,219,386,000	63.226.389.000		
								Pagu Akhir : 2.147.007.042.768	2.134.853.326.587	12.153.716.181	
								-	-	-	-
		IKP2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	30	-	-	-	-	-



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	84	83	Evaluasi Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Pagu Awal :500.000.000 Pagu Revisi: 512.795.000	512.795.000		
							Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Pagu Awal 350.000.000 Pagu Revisi 349.326.000	349.326.000		
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP4	Rasio kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	0,84	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Pagu Awal : 75.000.000 Pagu Rev : 67.662.000	67,661,820	100	Jan-Des
							Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	-	-	-	-



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
						Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	Pagu Awal : 75.000.000 Pagu Revisi : 86.400.000	86,400,000	100	Jan-Des
						Sosialisasi keselamatan pelayaran	Pagu Awal : 1.134.560.000 Pagu Revisi : 1,184,560,000	1,184,558,834	100	Feb-November (sudah dilaksanakan bln february 2023 di 5 lokasi Pangkalan PLP Priok, Pangkalan PLP Tg Perak, Pangkalan PLP Tg Uban, Pangkalan PLP Bitung, Pangkalan PLP Tual) Sudah dilaksanakan bulan Juni di KSOP Padang Bay dan Agustus di Maluku, Bulan September di UPP Tg Beringin,



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
										Bulan November di Pelabuhan Sanur dan Pelabuhan Mende Padang. Bulan Desember di UPP Jepara
						Pembangunan Kapal Patroli	Pagu Awal 76.210.000.000 Pagu Revisi 105,818,403,000	105,812,672,439	99,99	Kapal Kls III MYC (2022-2023) sudah selesai (Desember), Kapal Kls IV (MYC 22-23) sudah selesai (Desember), Kapal Kelas IV (SYC) sudah selesai (Desember)
						Pengadaan AIS	Pagu Awal 5.280.120.000 Pagu Revisi	4.690.000.000	100	Selesai (Desember)



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,27	0	(Monitoring System Kapal)	4,690,000,000			
							Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Pagu Awal 320.000.000 Pagu Revisi 217,880,000	217,865,430	99,99	Dilaksanakan bulan Juli Selesai
							Penguatan Auditor ISPS Code	Pagu Awal : 224.500.000 Pagu Revisi 169,230,000	169,151,800	99.95	Dilaksanakan bulan November Selesai
							Fourth Verification ISPS Code	Pagu Awal 100.000.000 Pagu Revisi 110,000,000	110,000,000	100	Agustus (selesai)
							Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Pagu Awal 4.500.000.000 Pagu Revisi 4.008.040.000	3.908.110.000	97.51	Juni-Desember (Selesai)
							Kegiatan Operasi Patroli Terpadu				
		IKP6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	97,75	96,33	Replacement Menara Suar Tanjung Ligeta dan Replacement Rambu	Pagu Awal = 18.174.521.000 Pagu Akhir = 14.933.489.000	14.929.417.500	0,03	



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
						Pelabuhan Rajjua				
						Pengadaan Lampu Sektor Light (2 Unit)	Pagu = 281.100.000	280.275.000	0,29	
						Pengadaan Lampu Menara Suar Type Rotating 1 Unit	Pagu Awal = 900.000.000 Pagu Akhir = 843.300.000	842.247.852	0,12	
						Pengadaan Lampu SBNP Ramsu 12 NM Led, Lampu SBNP Pelsu 5 NM Led, Lampu SBNP Ramtun R/L Led	Pagu Awal = 948.281.000 Pagu Akhir = 943.650.000	943.650.000	0,00	
						Pengadaan Lampu Rambu Suar 10 Nm	Pagu Awal = 731.670.000 Pagu Akhir = 556.110.000	556.110.000	0,00	
						Pengadaan Lampu Menara Suar 21 NM Type 1 Unit, Lampu Rambu Suar	Pagu = 852.670.000	850.858.100	0,21	



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
							12 NM 3 Unit, Lampu Pelampung Suar 5 NM 2 Unit				
							Pengadaan Lampu Rambu Suar 12 NM (4 unit) dan Lampu Pelampung Suar 5 NM (6 Unit)	Pagu Awal = 785.180.000 Pagu Akhir 735.714.000	729.869.464	0,79	
							Pengadaan Lampu Menara Suar Rotating Jarak Tampak 22-24 NM (1 Unit)	Pagu Awal = 800.000.000 Pagu Akhir = 742.700.000	742.700.000	0,00	
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulan Pencemaran Laut	IKP7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,9	0,933	Penerbitan Sertifikat pencegahan pencemaran	-	-	-	
							Monitoring aplikasi pelaporan konsumsi bahan bakar kapal	-	-	-	Melalui Aplikasi <i>dcs-ditkapel.dephub.go.id</i>



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
							Pengadaan alat <i>portable sulfur in fuel oil analyzer</i>	2. 802.800.000	2.802.800.000	0	4 Unit untuk lokasi KSOP Ambon, KSOP Panjang, KSOP Tanjung Emas, KSOP Sorong
		IKP8	Persentase Keberhasilan Penanggulang an Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	Latihan Bersama Penanggulang an Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2023)	Pagu Awal : 1.800.000.000 Pagu Revisi : 1.410.880.000	1.409.639.500	99.91	Dilaksanakan oktober Selesai
							Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Pagu Awal : 132.000.000 Pagu Revisi : 105.760.000	105,760,000	100	Dilaksanakan Januari-Desember (selesai)





BAB IV

Penutup

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berikut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional

Adapun target Rasio Konektivitas Transportasi Laut pada Tahun 2023 sebesar 0,94. Jumlah pelabuhan yang penggunaannya untuk angkutan laut, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 432 Tahun 2017 tentang RIPN sebanyak 636 pelabuhan.

Pada Triwulan I di bulan Januari tahun 2023 terdapat penambahan 16 (enam belas) pelabuhan yang dilayani angkutan laut yaitu Pelabuhan Darume di Halmahera, Pelabuhan Gilimandagin di Madura, Pelabuhan Kadatua di Buton Selatan, Pelabuhan Kataloka di Buton Selatan, Pelabuhan Loleo Jaya di Halmahera, Pelabuhan Maidi di Tidore, Pelabuhan Mangga Dua di Ternate, Pelabuhan Mumugu di Ternate, Pelabuhan Nunbaun Sabu di Rote, Pelabuhan Pulau Sebesi di Sulawesi Selatan, Pelabuhan Papela di Rote, Pelabuhan Parit Rempak di Kepulauan Riau, Pelabuhan Pasean di Pamekasan, Pelabuhan Siompu di Buton Selatan, Pelabuhan Siwa di Sulawesi Barat dan Pelabuhan Tana Paser di Kalimantan Timur. Dengan demikian jumlah pelabuhan yang dilayani menjadi 592 pelabuhan, dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Januari sampai dengan Maret Tahun 2023 sebesar 0,93 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 98,94%.

Sampai dengan Triwulan II terdapat penambahan 3 pelabuhan yang dilayani angkutan laut yaitu Pelabuhan Sibigo di NAD, Pelabuhan Sungsang di Sumatera Selatan dan Pelabuhan Tanjung Berakit di Kepulauan Riau, sehingga pada Triwulan II terdapat 19 Pelabuhan.

Pada Triwulan III sampai dengan Triwulan IV tidak ada penambahan, sehingga total sampai dengan Triwulan IV sebanyak 19 pelabuhan. Dengan demikian jumlah pelabuhan yang dilayani angkutan laut menjadi 595 pelabuhan, dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 sebesar 0,94 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.



2. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur

Adapun target Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur Tahun 2023 sebesar 27% atau sebanyak 37 trayek dari 138 trayek tetap dan teratur. Pada triwulan I tahun 2023 telah diinventarisasi sebanyak 37 trayek tetap dan teratur angkutan peti kemas membentuk *loop service*. Sedangkan pada Triwulan II sampai dengan Triwulan IV mengalami peningkatan menjadi 30% atau sebanyak 41 trayek dari 138 trayek.

3. Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul

Adapun target Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul Tahun 2023 sebesar 84%. Pencapaian pada Triwulan I sebesar 94%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 94%. Pencapaian pada Triwulan II sebesar 78%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 93% pada Triwulan II sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian pada Triwulan III sebesar 83%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 98% pada Triwulan III. Pencapaian pada Triwulan IV sebesar 83%, sehingga prosentase pencapaian total terhadap target sebesar 99% pada Triwulan IV sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut

Adapun target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut target tahun 2023 sebesar 0,97/10.000 Pelayaran. Terlihat realisasi pada Triwulan I sebesar 0,81 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 3 orang), dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 116,15%. realisasi pada Triwulan II sebesar 0,86 dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 111,34% dan realisasi pada Triwulan III sebesar 0,89 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 10 orang) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 108,25% dan realisasi pada Triwulan IV sebesar 0,84 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 10 orang) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 113,4%

5. Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut

Adapun target Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 0,27/100.000 Pelayaran. Pencapaian pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat 2 laporan gangguan keamanan (pencurian barang di dalam container di perairan



karimun kecil pada bulan Oktober 2023 dan pencurian di atas kapal di perairan Pelabuhan Dumai pada bulan Desember 2023) sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 133,33%. Terkait 2 kejadian tersebut dari Direktur KPLP sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait mengenai Pengawasan, Keamanan, dan Keselamatan Pelayaran arahan dari Direktur KPLP agar UPT terkait apabila ada kejadian pencurian dan sebagainya untuk mengirim surat sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan pihak KSOP terkait dapat membuat SOP terkait kejadian tersebut agar tidak terulang kembali dan juga menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang dapat dilakukan seperti meminta kepada Owner agar dapat memasang CCTV di Kapal dan dapat memberikan laporan kepada Kepala Kantor KSOP terkait dan ke depannya permasalahan ini akan dirapatkan secara nasional ke Instansi terkait, dapat dilakukan patroli bersama disesuaikan di titik-titik yang rawan.

6. Tingkat Kehandalan Kenavigasian

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 97,75%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 96,33%, Realisasi pada Triwulan II dan sebesar 96,36, pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 95,08 dan realisasi pada Triwulan IV adalah sebesar 95,13. Prosentase pencapaian terhadap target secara total sebesar 97,32% sehingga belum memenuhi target yang telah ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan.

7. Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

Adapun target Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) Tahun 2023 Rasio sebesar 0,9. Pencapaian Triwulan I rasio sebesar 0,796, pada Triwulan II tercapai sebesar 0,856 rasio, pada Triwulan III tercapai sebesar 0.923 rasio dan pada Triwulan IV terealisasi sebesar 0,933 rasio sehingga persentase pencapaian terhadap keseluruhan target saat ini sebesar 103,67%. Capaian tersebut telah melebihi target tahunan yang ditetapkan karena banyaknya permohonan penerbitan sertifikat yang masuk. Tingginya capaian kinerja pada Triwulan IV merupakan akumulasi realisasi dari periode sebelumnya yang selalu melebihi target tahunan sehingga berdampak terhadap realisasi tahun berjalan.



8. Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan I terdapat 2 laporan kejadian pencemaran di wilayah Muara Sungai Noyo, desa Faekhuna'a, Nias Utara dan Di sekitar Perairan Dermaga PT Mcdermott Indonesia, Batam yang berhasil ditanggulangi sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%. Sedangkan pada Triwulan II terdapat 2 laporan kejadian pencemaran di Di Area Pantai nirwana Gardens Resort, Bintan dan Di Perairan Tanjung Berakit, Riau Batam yang berhasil ditanggulangi sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100% dan pada Triwulan III dan IV tidak terdapat laporan kejadian pencemaran sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%.

B. Langkah ke depan

Masih menunggu pelaksanaan Reviu Renstra 2020-2024 Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



PERJANJIAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT
djpl@dephub.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran strategis, program / kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta, Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

NIP. 19670320 199203 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Toha

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi Karya Sumadi

Jabatan : Menteri Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Menteri Perhubungan

Pihak Pertama

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

BUDI KARYA SUMADI

ARIF TOHA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP 1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,94
		IKP 2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk <i>loop</i> secara teratur	%	27
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP 3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	84
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP 4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	0,97
		IKP 5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,27
		IKP 6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75
SP 4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP 7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,9
		IKP 8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100

Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	Rp. 26.399.080.000,00
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut	Rp. 3.122.967.266.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut	Rp. 24.371.483.000,00
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut	Rp. 6.401.368.000,00
5. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	Rp. 1.006.504.704.000,00
6. Pelayanan Transportasi Laut	Rp. 1.599.442.730.000,00
7. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	Rp. 2.159.087.820.000,00
8. Penunjang Teknis Transportasi Laut	Rp. 639.132.962.000,00

Disetujui,
Menteri Perhubungan

Jakarta, Januari 2023
Direktur Jenderal Perhubungan Laut


BUDI KARYA SUMADI


ARIF TOHA



REVIU PERJANJIAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT
*djpl@dephub.go.id***

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023. Reviu Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran strategis, program / kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan reviu perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta, 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ANTONI ARIF PRIADI
NIP. 19730808 199903 1 003



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Antoni Arif Priadi
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Selanjutnya Disebut Pihak Pertama

Nama : Budi Karya Sumadi
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

Pihak Kedua
Menteri Perhubungan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perhubungan Laut


BUDI KARYA SUMADI


ANTONI ARIF PRIADI

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA (3)		SATUAN (4)	TARGET (5)
SP 1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,94
		IKP 2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP 3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	84
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP 4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	0,97
		IKP 5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,27
		IKP 6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75
SP 4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP 7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,9
		IKP 8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut
5. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut
6. Pelayanan Transportasi Laut
7. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut
8. Penunjang Teknis Transportasi Laut

Anggaran

Rp. 26.399.080.000,00-
Rp. 3.122.967.266.000,00-
Rp. 24.371.483.000,00-
Rp. 6.401.368.000,00-
Rp. 1.006.504.704.000,00-
Rp. 1.599.442.730.000,00-
Rp. 2.159.087.820.000,00-
Rp. 639.132.962.000,00-

Disetujui,
Menteri Perhubungan


BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, 2023
Direktur Jenderal Perhubungan Laut


ANTONI ARIF PRIADI

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Januari		Realisasi Bulan		Januari		% Capaian Bulan		Januari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja		Capaian Anggaran					
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,94	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1 Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16 layanan	16	100	3.666.666.667	8,3%	16	0	100	0		Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
						2 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44 layanan	44	100	50.208.649.834	8,3%	44	0	100	0		Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
						3 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73 layanan	73	100	66.843.781.367	8,3%	73	18.195.050.224	100	2,0%		Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
						4 Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39 layanan	39	100	52.378.763.500	8,3%	39	0	100	0		Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait			
		IKP2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1 Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah laporan kegiatan trayek tol laut pelayaran yang membentuk loop secara teratur	12 laporan	1	100	-	-	1	-	100	-		-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Delapan Utama dan	%	84,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1. Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni s.d. Desember 2023	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni dan Desember 2023				
						2. Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	1 kegiatan	0	0	-	0	0	0	0	0	0	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023				
						3. Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Jumlah Kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan melalui aplikasi	1 kegiatan	1	100	0	1	0	100	0								
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	5 lokasi	5		75.000.000	0	0	0	0	-		SEPANGJANG TAHUN	SD 3				
						2. Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Jumlah Kegiatan Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	5 lokasi	5		75.000.000	0	0	0	0	-		SEPANGJANG TAHUN	SD 3				
						3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing	5 lokasi	5		75.000.000	0	0	0	0	-		SEPANGJANG TAHUN	SD 3				
						4. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran	10 lokasi	10		1.134.560.000	0	0	0	0	-		FEB-NOV	SD 5				
						5. Pembangunan Kapal Patroli	Jumlah Kapal Patroli	7 unit	7		117.412.212.000	0	0	0	0	-		JAN-DES	SD 5				
						6. Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Jumlah Perlatan AIS (Monitoring System Kapal)	1 paket	1		4.713.222.000	0	0	0	0	-		APRIL-OKT	SD 5				
		IKP5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Jumlah Kegiatan Peningkatan keterampilan ISPS CODE	1 kegiatan	1		320.000.000	0	0	0	0	-		JULI	SD 1				
						2. Pengukuhan Auditor ISPS Code	Jumlah Kegiatan Pengukuhan Auditor ISPS Code	1 kegiatan	1		224.500.000	0	0	0	0	-		NOV	SD 1				
						3. Fourth Verification ISPS Code	Jumlah Lokasi Kegiatan Fourth Verification ISPS Code	3 lokasi	3		54.040.000	0	0	0	0	-		AGUSTUS-SEPTEMBER	SD 1				
IKP6	Tingkat Keahlian Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																			

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : Februari			TAHUN : 2023													Realisasi Bulan Februari		% Capaian Bulan Februari					
NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Februari				Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab			
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%	(17)	(18)	(19)					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,94	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1. Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16 layanan	16	100	7.333.333.334	16,6%	16	0	100	0	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
						2. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44 layanan	44	100	100.417.299.668	16,6%	44	0	100	0	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
						3. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73 layanan	73	100	133.687.562.734	16,6%	73	76.356.731.468	100	9,0%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
						4. Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39 layanan	39	100	104.757.527.000	16,6%	39	24.674.940.355	100	6,0%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait				
		5. Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6 layanan	6	100	10.369.897.666	16,6%	6	7.894.890.580	100	12,0%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri								
		IKP2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1. Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah laporan kegiatan trayek tol laut pelayaran yang membentuk loop secara teratur	12 laporan	1	100	-	-	1	-	100	-	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
						1. Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni s.d. Desember 2023	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni dan Desember 2023				
						2. Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional	1 kegiatan	0	0	-	0	0	0	0	0	0	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023				
3. Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan standar operasional pelabuhan	Jumlah Kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan standar operasional pelabuhan melalui aplikasi					1 kegiatan	1	100	0	1	0	100	0	0	0								
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Delapan Utama dan	%	84,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1. Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni s.d. Desember 2023	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023				
						2. Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional	1 kegiatan	0	0	-	0	0	0	0	0	0	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023				
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	5 lokasi	5		75.000.000		0	0	0	0	-	-	SEPANIANG TAHUN	SD 3			
						2. Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Jumlah Kegiatan Monitoring terkait permasalahan Surat	5 lokasi	5		75.000.000		0	0	0	0	-	-	SEPANIANG TAHUN	SD 3			
						3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelangkaan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelangkaan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	5 lokasi	5		75.000.000		0	0	0	0	-	-	SEPANIANG TAHUN	SD 3			
						4. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran	10 lokasi	10		1.134.560.000		5	0	50	0	-	-	FEB-NOV	SD 5			
						5. Pembangunan Kapal Patroli	Jumlah Kapal Patroli	7 unit	7		117.412.212.000		0	0	0	0	-	-	JAN-DES	SD 5			
						6. Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Jumlah Peralatan AIS (Monitoring System Kapal)	1 paket	1		4.713.222.000		0	0	0	0	-	-	APRIL-OKT	SD 5			
		IKP5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Jumlah Kegiatan Peningkatan keterampilan ISPS CODE	1 kegiatan	1		320.000.000		0	0	0	0	-	-	JULI	SD 1			
						2. Pengukuhan Auditor ISPS Code	Jumlah Kegiatan Pengukuhan Auditor ISPS Code	1 kegiatan	1		224.500.000		0	0	0	0	-	-	NOV	SD 1			
						3. Fourth Verification ISPS Code	Jumlah Lokasi Kegiatan Fourth Verification ISPS Code	3 lokasi	3		54.040.000		0	0	0	0	-	-	AGUSTUS-SEPTEMBER	SD 1			
						4. Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Jumlah Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api	1 paket	1		4.232.250.000		0	0	0	0	-	-	APRIL-OKT	SD 5			
						IKP6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													
										1. Replacement Menara Suar Tanjung Ligeta dan Replacement Rambu Pelabuhan Ratu	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0	Persiapan Dokumen Pelarangan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang
										2. Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Padar dan Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Rinca	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0		
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio Kapal yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	12	1	100	-	-	1	-	100	-	-	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Teloh sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan			
		2. Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	12	1	100	-	-	1	-	100	-	-	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Teloh sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan							
		IKP8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1. Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Jumlah Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	1 kegiatan	1		1.800.000.000		0	0	0	0	-	-	BLN AGUSTUS	SD IV			
2. Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Jumlah Lokasi Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut					5 lokasi	1		132.000.000		0	0	0	0	-	-	SEPANIANG TAHUN	SD IV					

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN :			Maret		TAHUN :		2023													
NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan		Maret	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,94	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16 layanan	16	100	11.000.000.000	25,0%	16	0	100	0	Dalam pelaksanaan	Koordinator lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44 layanan	44	100	150.625.949.502	25,0%	44	62.914.413.715,00	100	46%	Dalam pelaksanaan	Koordinator lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73 layanan	73	100	200.531.344.101	25,0%	73	218.340.602.682	100	27%	Dalam pelaksanaan	Koordinator lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39 layanan	39	100	157.136.290.500	25,0%	39	47.665.753.472	100	11%	Dalam pelaksanaan	Koordinator lanjut	Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait
		IKP2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah laporan kegiatan trayek tol laut pelayaran yang membentuk loop secara teratur	12 laporan	1	100	-		1	0	100	0%	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayaran transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan	%	84,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	1 kegiatan	1%	100%	500.000.000	100%	1	48.730.000	100	9,75%	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni dan Desember 2023	
						2	Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	1 kegiatan	0	0	-	0	0	0	0	0	Masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023	
						3	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan	Jumlah Kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan melalui aplikasi	1 kegiatan	1	100	0	0	1	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan melalui aplikasi SIRANI	diaksanakan setiap bulan	
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	5 lokasi	5		75.000.000		0	0	0	-		SEPANJANG TAHUN	SD 3
						2	Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Jumlah Kegiatan Monitoring terkait permasalahan Surat	5 lokasi	5		75.000.000		0	0	0	-		SEPANJANG TAHUN	SD 3
						3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelaklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelaklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	5 lokasi	5		75.000.000		2	31.284.128	40	42		SEPANJANG TAHUN	SD 3
						4	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran	10 lokasi	10		1.134.560.000		5	694.387.695	50	61		FEB-NOV	SD 5
						5	Pembangunan Kapal Patroli	Jumlah Kapal Patroli	7 unit	7		117.412.212.000		0	-	0	-		JAN-DES	SD 5
						6	Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Jumlah Peralatan AIS (Monitoring System Kapal)	1 paket	1		4.713.222.000		0	0	0	-		APRIL-OKT	SD 5
		IKP5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Jumlah Kegiatan Peningkatan keterampilan ISPS CODE	1 kegiatan	1		320.000.000		0	0	0	-		JULI	SD 1
						2	Pengukuhan Auditor ISPS Code	Jumlah Kegiatan Pengukuhan Auditor ISPS Code	1 kegiatan	1		224.500.000		0	0	0	-		NOV	SD 1
						3	Fourth Verification ISPS Code	Jumlah Lokasi Kegiatan Fourth Verification ISPS Code	3 lokasi	3		54.040.000		0	0	0	-		AGUSTUS-SEPTEMBER	SD 1
						4	Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Jumlah Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api	1 paket	1		4.232.250.000		0	0	0	-		APRIL-OKT	SD 5
IKP6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
				1	Replacement Menara Suar Tanjung Ligeta dan Replacement Rambu Pelabuhan Ratu	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0	Persiapan Dokumen Pelangan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang		
				2	Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Padar dan Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Rinca	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	1	0	0	-	0	0	0	0	0					
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio Kapal yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	12	1	100	-	-	1	-	100	-	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telah sesuai dengan Target yang Ditetapan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
						2	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	12	1	100	-	-	1	-	100	-	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telah sesuai dengan Target yang Ditetapan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
		IKP8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan														
						1	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Jumlah Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	1 kegiatan	1		1.800.000.000		0	0	0	-		BLN AGUSTUS	SD IV

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN :		TAHUN :		2023																	
NO	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan April			Realisasi Bulan April			% Capaian Bulan April		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab			
								Target Kinerja		%	Realisasi Kinerja		%	Capaian Kinerja					%		
								Volume	%		Volume	%		Volume	%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
SP 1	Meningkatnya Kinerja Konektivitas Transportasi Laut	RP1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,94	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
					1. Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	100	14.666.666.668	33,0%	16	2.557.965.360,00	100	6	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					2. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	100	200.834.599.336	33,0%	44	62.914.413.715,00	100	40%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					3. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	100	267.375.125.468	33,0%	73	218.340.602.682	100	27%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					4. Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39	100	209.515.054.000	33,0%	39	47.665.753.472	100	11%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait				
		5. Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6	100	20.736.795.332	33,0%	6	7.894.890.580	100	12%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri							
		RP2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
					1. Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah laporan kegiatan trayek tol laut pelayaran yang membentuk loop secara teratur	12	100	-		1	0	100	0%	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					SP 2	Meningkatnya kinerja pelayaran transportasi laut	RP3 Persentase On Time Performance pada Pelayaran Transporasi Laut	%	84,00	Menunjuk Dir. Kepulauan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:											
					1. Evaluasi Standar Kinerja Pelayaran Operasional					Jumlah Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayaran Operasional	1	kegiatan	1%	####	500.000.000	100%	1	78.956.000	100	15,79%	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayaran Operasional
2. Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan				1					kegiatan	0	0	-	0	0	0	0	0	Masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023	
3. Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan	Jumlah Kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan melalui aplikasi	1	kegiatan	1	100					0	0	1	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan melalui aplikasi SIRANI	dilaksanakan setiap bulan				
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	RP4 Rasio Kejadian Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
					1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	5	lokasi	5		75.000.000		0	0	0	-		SEPAUANG TAHUN	SD 3		
					2. Monitoring terkait permasalahan Surat Persewaan Berlayar	Jumlah Kegiatan Monitoring terkait permasalahan Surat	5	lokasi	5		75.000.000		0	0	0	-		SEPAUANG TAHUN	SD 3		
					3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelangkaan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelangkaan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	5	lokasi	5		75.000.000	2		31.284.128	40	42		SEPAUANG TAHUN	SD 3		
					4. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran	10	lokasi	10		1.134.560.000	5		694.387.695	50	61		FEB-NOV	SD 5		
					5. Pembangunan Kapal Patroli	Jumlah Kapal Patroli	7	unit	7		117.412.212.000	0		-	0	-		7 UNIT (2 KAPAL KELAS 3, 5 KAPAL KELAS IV)	JAN-DES	SD 5	
		RP5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
					1. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Jumlah Kegiatan Peningkatan keterampilan ISPS CODE	1	kegiatan	1		320.000.000	0		0	0	-		JULI	SD 1		
					2. Pengukuhan Auditor ISPS Code	Jumlah Kegiatan Pengukuhan Auditor ISPS Code	1	kegiatan	1		224.500.000	0		0	0	-		NOV	SD 1		
		RP6 Tingkat Kehadatan Kemargisian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kepulauan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
					3. Fourth Verification ISPS Code	Jumlah Lokasi Kegiatan Fourth Verification ISPS Code	3	lokasi	3		54.040.000	0		0	0	-		AGUSTUS-SEPTEMBER	SD 1		
					4. Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Jumlah Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api	1	paket	1		4.232.250.000	0		0	0	-		APRIL-OKT	SD 5		
		SP 4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanganan pencemaran laut	RP7 Rasio Kapal yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 mm)	%	100	Menunjuk Dir. Kepulauan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
							1. Replacement Menara Sinar Tarang Ujeta dan Replacement Rambu Pelabuhan Rata	Tingkat Kehadatan Kemargisian	1	0	0	-	0	0	2.719.437.400	0	0		Percetakan pelaksanaan kegiatan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang	
							2. Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Padar dan Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Rong	Tingkat Kehadatan Kemargisian	1	0	0	-	0	0	0	0	0		Pelaksanaan litang, persiapan pelaksanaan pekerjaan di bulan depan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang	
3. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)						12	1	100	-	-	1	-	100	-		Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan			
4. Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)						12	1	100	-	-	1	-	100	-		Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan			
RP8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kegiatan Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan	%			100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
					1. Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Jumlah Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	1	kegiatan	1		1.800.000.000		0	0	0	-		BLN AGUSTUS	SD IV		
					2. Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Jumlah Lokasi Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	5	lokasi	1		132.000.000		0	0	0	-		SEPAUANG TAHUN	SD IV		

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN :			Maret		TAHUN :		2023													
NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan		Maret	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,94	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16 layanan	16	100	11.000.000.000	25,0%	16	0	100	0	Dalam pelaksanaan	Koordinator lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44 layanan	44	100	150.625.949.502	25,0%	44	62.914.413.715,00	100	46%	Dalam pelaksanaan	Koordinator lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73 layanan	73	100	200.531.344.101	25,0%	73	218.340.602.682	100	27%	Dalam pelaksanaan	Koordinator lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39 layanan	39	100	157.136.290.500	25,0%	39	47.665.753.472	100	11%	Dalam pelaksanaan	Koordinator lanjut	Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait
		5	Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6 layanan	6	100	15.554.846.499	25,0%	6	7.894.890.580	100	12%	Dalam pelaksanaan	Koordinator lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
		IKP2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah laporan kegiatan trayek tol laut pelayaran yang membentuk loop secara teratur	12 laporan	1	100	-		1	0	100	0%	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan	%	84,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	1 kegiatan	1%	100%	500.000.000	100%	1	48.730.000	100	9,75%	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni dan Desember 2023	
						2	Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	1 kegiatan	0	0	-	0	0	0	0	0	Masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023	
						3	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Jumlah Kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan melalui aplikasi	1 kegiatan	1	100	0	0	1	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan melalui aplikasi SIRANI	diaksanakan setiap bulan	
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	5 lokasi	5		75.000.000		0	0	0	-		SEPANJANG TAHUN	SD 3
						2	Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Jumlah Kegiatan Monitoring terkait permasalahan Surat	5 lokasi	5		75.000.000		0	0	0	-		SEPANJANG TAHUN	SD 3
						3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelayaklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelayaklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	5 lokasi	5		75.000.000		2	31.284.128	40	42		SEPANJANG TAHUN	SD 3
						4	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran	10 lokasi	10		1.134.560.000		5	694.387.695	50	61		FEB-NOV	SD 5
						5	Pembangunan Kapal Patroli	Jumlah Kapal Patroli	7 unit	7		117.412.212.000		0	-	0	-		JAN-DES	SD 5
						6	Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Jumlah Peralatan AIS (Monitoring System Kapal)	1 paket	1		4.713.222.000		0	0	0	-		APRIL-OKT	SD 5
		IKP5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Jumlah Kegiatan Peningkatan keterampilan ISPS CODE	1 kegiatan	1		320.000.000		0	0	0	-		JULI	SD 1
						2	Pengukuhan Auditor ISPS Code	Jumlah Kegiatan Pengukuhan Auditor ISPS Code	1 kegiatan	1		224.500.000		0	0	0	-		NOV	SD 1
						3	Fourth Verification ISPS Code	Jumlah Lokasi Kegiatan Fourth Verification ISPS Code	3 lokasi	3		54.040.000		0	0	0	-		AGUSTUS-SEPTEMBER	SD 1
						4	Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Jumlah Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api	1 paket	1		4.232.250.000		0	0	0	-		APRIL-OKT	SD 5
IKP6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
				1	Replacement Menara Suar Tanjung Ligeta dan Replacement Rambau Pelabuhan Ratu	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0		Persiapan Dokumen Pelanggan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang	
				2	Pembangunan Rambau Pelabuhan Pulau Pader dan Pembangunan Rambau Pelabuhan Pulau Rinca	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0				
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio Kapal yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	12	1	100	-	-	1	-	100	-	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telah sesuai dengan Target yang Ditetapan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
						2	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	12	1	100	-	-	1	-	100	-	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telah sesuai dengan Target yang Ditetapan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
		IKP8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan														
						1	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Jumlah Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	1 kegiatan	1		1.800.000.000		0	0	0	-		BLN AGUSTUS	SD IV
	2	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Jumlah Lokasi Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	5 lokasi	1		132.000.000		0	0	0	-		SEPANJANG TAHUN	SD IV					

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN :		TAHUN :																				
NO	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan April			Realisasi Bulan April		% Capaian Bulan April		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab					
								Target Kinerja		%	Realisasi Kinerja		%	%								
								Volume	Volume		Volume	Volume										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
SP 1	Meningkatnya Kinerja Konektivitas Transportasi Laut	RP1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,94	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
					1. Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16 layanan	16	100	14.666.666.668	33,0%	16	2.557.965.360,00	100	6	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					2. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44 layanan	44	100	200.834.599.336	33,0%	44	62.914.413.715,00	100	40%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					3. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73 layanan	73	100	267.375.125.468	33,0%	73	218.340.602.682	100	27%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					4. Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39 layanan	39	100	209.515.054.000	33,0%	39	47.665.753.472	100	11%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait				
		5. Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6 layanan	6	100	20.739.795.332	33,0%	6	7.894.890.580	100	12%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri							
		RP2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
					1. Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah laporan kegiatan trayek tol laut pelayaran yang membentuk loop secara teratur	12 laporan	1	100	-		1	0	100	0%	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					2. Rekapitulasi laporan pencapaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan	Jumlah kegiatan Rekapitulasi laporan pencapaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan melalui aplikasi	1 kegiatan	1	100	0	0	1	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan pencapaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan melalui aplikasi SIPRAN	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni dan Desember 2023	SD 3				
					3. Rekapitulasi laporan pencapaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan	Jumlah kegiatan Rekapitulasi laporan pencapaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan	1 kegiatan	1	100	0	0	1	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan pencapaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan melalui aplikasi SIPRAN	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023	SD 3				
4. Rekapitulasi laporan pencapaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan	Jumlah kegiatan Rekapitulasi laporan pencapaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan				1 kegiatan	1	100	0	0	1	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan pencapaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan melalui aplikasi SIPRAN	akan dilaksanakan setiap bulan	SD 3						
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayaran transportasi laut	RP3 Persentase On Time Performance pada Pelayaran	%	84,00	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
					1. Evaluasi Standar Kinerja Pelayaran Operasional	Jumlah Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayaran Operasional	1 kegiatan	1%	####	500.000.000	100%	1	78.956.000	100	15,79%	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayaran Operasional	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni dan Desember 2023	SD 3				
					2. Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	1 kegiatan	0	0	-	0	0	0	0	0	Masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023	SD 3				
					3. Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan	Jumlah kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan melalui aplikasi	1 kegiatan	1	100	0	0	1	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional pelabuhan melalui aplikasi SIPRAN	akan dilaksanakan setiap bulan	SD 3				
					SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	RP4 Rasio Kejadian Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												
										1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	5 lokasi	5		75.000.000		0	0	0	-	SEPANJANG TAHUN	SD 3
										2. Monitoring terkait permasalahan Surat Persewaan Berlayar	Jumlah Kegiatan Monitoring terkait permasalahan Surat	5 lokasi	5		75.000.000		0	0	0	-	SEPANJANG TAHUN	SD 3
										3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelangkaan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelangkaan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	5 lokasi	5		75.000.000		2	31.284.128	40	42	SEPANJANG TAHUN	SD 3
										4. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran	10 lokasi	10		1.134.560.000		5	694.387.695	50	61	FEB-NOV	SD 5
										5. Pembangunan Kapal Patroli	Jumlah Kapal Patroli	7 unit	7		117.412.212.000		0	0	0	-	7 UNIT (2 KAPAL KELAS 3, 5 KAPAL KELAS IV)	JAN-DES
					RP5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
								1. Peningkatan keterampilan IPS CODE	Jumlah Kegiatan Peningkatan keterampilan IPS CODE	1 kegiatan	1		320.000.000		0	0	0	-	JULI	SD 1		
								2. Pengukuhan Auditor IPS Code	Jumlah Kegiatan Pengukuhan Auditor IPS Code	1 kegiatan	1		224.500.000		0	0	0	-	NOV	SD 1		
								3. Fourth Verification IPS Code	Jumlah Lokasi Kegiatan Fourth Verification IPS Code	3 lokasi	3		54.040.000		0	0	0	-	AGUSTUS-SEPTEMBER	SD 1		
								4. Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Jumlah Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api	1 paket	1		4.232.250.000		0	0	0	-	APRIL-OKT	SD 5		
RP6 Tingkat Kehadatan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																			
			1. Replacement Menara Suar Tanjung Ligata dan Replacement Rambu Pelabuhan Rajau	Tingkat Kehadatan Kenavigasian				1	0	0	-	0	0	2.719.437.400	0	0	Percetakan pelaksanaan kegiatan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang				
			2. Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Padar dan Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Rinta	Tingkat Kehadatan Kenavigasian				1	0	0	-	0	0	0	0	0	Pelaksanaan litang, persiapan pelaksanaan pekerjaan di bulan depan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang				
			3. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)				12	1	100	-	-	1	-	100	-	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telaah sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan			
SP 4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanganan pencemaran laut	Rasio Kapal yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 mm)	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
					2. Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	12	1	100	-	-	1	-	100	-	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telaah sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan				
					RP8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kegiatan Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
								1. Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Jumlah Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	1 kegiatan	1		1.800.000.000		0	0	0	-	BLN AGUSTUS	SD IV		
RP9 Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																			
			2. Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Jumlah Lokasi Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	5 lokasi	1		132.000.000		0	0	0	-	SEPANJANG TAHUN	SD IV							

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN :		Mei		TAHUN :		2023														
NO	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Mei				Realisasi Bulan Mei				% Capaian Bulan Mei		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
								Target Kinerja		Target Anggaran	Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran				
								Volume	%		Volume	%		%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
SP-1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	KP1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,84	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
					1. Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	100	18.333.333.335	41,0%	16	0	100	0		Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
					2. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	100	251.043.249.170	41,0%	44	62.914.413.715,00	100	40%		Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
					3. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (71 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	100	334.218.908.835	41,0%	73	218.340.602.682	100	27%		Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
					4. Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39	100	261.893.817.500	41,0%	39	47.665.753.472	100	11%		Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait		
		5. Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6	100	25.924.744.165	41,0%	6	7.894.890.580	100	12%		Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri					
		KP2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
					1. Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah laporan kegiatan trayek tol laut pelayaran yang membentuk loop secara teratur	12	100	-		1	0	100	0%		-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
SP-2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	KP3 Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Perikanan	%	84,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
					1. Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	1	100	500.000.000	100%	1	75.376.000	100	15,08%	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni dan Desember 2023				
					2. Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	1	100	-	0	0	0	0	0	Masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023				
					3. Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Jumlah Kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan melalui aplikasi SIPAN	1	100	0	0	1	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan melalui aplikasi SIPAN	diaksanakan setiap bulan				
SP-3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	KP4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
					1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	5	100	75.000.000		0	0	0	-		SEPANJANG TAHUN	SD 3			
					2. Monitoring terkait permasalahan Surat Perintah Berlayar	Jumlah Kegiatan Monitoring terkait permasalahan Surat Perintah Berlayar	5	100	75.000.000		0	0	0	-		REVISI	SD 3			
					3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelangkaan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelangkaan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	5	100	75.000.000		2	31.284.128	40	42		SEPANJANG TAHUN	SD 3			
					4. Sosialisasi keselamatan pelayaran berdasarkan peraturan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran	10	100	1.134.560.000		5	694.387.695	50	61		FEB-NOV	SD 5			
					5. Pembangunan Kapal Patroli	Jumlah Kapal Patroli	7	100	117.412.212.000		0	12.855.246.223	0	11	7 UNIT (2 KAPAL KELAS 3, 5 KAPAL KELAS IV)	JAN-DES	SD 5			
					6. Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Jumlah Peralatan AIS (Monitoring System Kapal)	1	100	4.713.222.000		0	0	0	-		AGUSTUS-DES	SD 5			
		KP5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
					1. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Jumlah Kegiatan Peningkatan keterampilan ISPS CODE	1	100	320.000.000		0	0	0	-		JULI	SD 1			
					2. Pengukuhan Auditor ISPS Code	Jumlah Kegiatan Pengukuhan Auditor ISPS Code	1	100	224.500.000		0	0	0	-		NOV	SD 1			
		KP6 Tingkat Kehandatan Kenavigasian	%	97,76	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
					3. Fourth Verification ISPS Code	Jumlah Lokasi Kegiatan Fourth Verification ISPS Code	3	100	54.040.000		0	0	0	-		AGUSTUS-SEPTEMBER	SD 1			
					4. Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Jumlah Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	1	100	4.232.250.000		0	0	0	-		APRIL-OKT	SD 5			
SP-4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penganggulangan pencemaran laut	KP7 Rasio Kapal yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
					1. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	12	100	-	-	1	-	100	-		Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telaah sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan		
					2. Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	12	100	-	-	1	-	100	-		Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telaah sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan		
					3. Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Jumlah Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	1	100	1.800.000.000		0	0	0	-		BLN AGUSTUS	SD IV			
		KP8 Persentase Kebersihan Kegiatan Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
					1. Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Jumlah Lokasi Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut	5	100	132.000.000		0	0	0	-		SEPANJANG TAHUN	SD IV			
					2. Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Jumlah Lokasi Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	5	100	132.000.000		0	0	0	-		SEPANJANG TAHUN	SD IV			
					3. Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Jumlah Lokasi Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut	5	100	132.000.000		0	0	0	-		SEPANJANG TAHUN	SD IV			

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN :		Juni		TAHUN :		2023																
NO	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Juni				Realisasi Bulan Juni				% Capaian Bulan Juni				Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja		Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	%	%	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
SP-1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	KP1 Rasio Kinerja Pelayanan Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,84	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
					1. Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	100	22.000.000.000	49,0%	16	100	10.807.621.727,00	100	24,56	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					2. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	100	301.251.899.004	49,0%	44	100	62.914.413.715,00	100	40%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					3. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	100	401.062.688.202	49,0%	73	100	218.340.602.682	100	27%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					4. Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39	100	314.272.581.000	49,0%	39	100	47.665.753.472	100	11%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait				
		5. Layanan angkutan termak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan termak	6	100	31.109.692.998	49,0%	6	100	7.894.890.580	100	12%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri							
		KP2 Pensektoran Pencapaian Trayek Pelayanan yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
					1. Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayanan yang membentuk loop secara teratur	Jumlah laporan kegiatan trayek tol laut pelayanan yang membentuk loop secara teratur	12	100	-		1	100	0	100	0%	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
SP-2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	KP3 Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Transshipment	%	84,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
					1. Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	1	kegiatan	1%	####	500.000.000	100%	1	23.226.000	100	4,65%	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni dan Desember 2023				
					2. Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	1	kegiatan	0	0	-	0	0	0	0	0	Masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023				
					3. Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Jumlah Kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan melalui aplikasi	1	kegiatan	1	100	0	0	1	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	diaksanakan setiap bulan				
SP-3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	KP4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
					1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	5	lokasi	5		75.000.000		4		69.036.820	80	87	SEPANJANG TAHUN	SD 3			
					2. Monitoring terkait permasalahan Surat Perizinan Berlayar	Jumlah Kegiatan Monitoring terkait permasalahan Surat Perizinan Berlayar	5	lokasi	5		75.000.000		0	0	0	0	-	REVISI	SD 3			
					3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelangkaan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelangkaan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	5	lokasi	5		75.000.000		3		51.860.128	60	69	SEPANJANG TAHUN	SD 3			
					4. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran	10	lokasi	10		1.134.560.000		5		694.387.695	50	61	FEB-NOV	SD 5			
					5. Pembangunan Kapal Patroli	Jumlah Kapal Patroli	7	unit	7		111.450.578.000		0		12.835.248.223	0	12	7 UNIT (2 KAPAL KELAS 3, 5 KAPAL KELAS IV)	JAN-DES	SD 5		
					6. Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Jumlah Peralatan AIS (Monitoring System Kapal)	1	paket	1		4.713.222.000		0	0	0	0	-	AGUSTUS-DES	SD 5			
					Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
					1. Peningkatan keterampilan IPS CODE	Jumlah Kegiatan Peningkatan keterampilan IPS CODE	1	kegiatan	1		320.000.000		1		92.800.000	100	29	JULI	SD 1			
					2. Pengukuhan Auditor IPS Code	Jumlah Kegiatan Pengukuhan Auditor IPS CODE	1	kegiatan	1		224.500.000		0	0	0	0	-	NOV	SD 1			
					3. Fourth Verification IPS Code	Jumlah Lokasi Kegiatan Fourth Verification IPS Code	3	lokasi	3		54.040.000		0	0	0	0	-	AGUSTUS-SEPTEMBER	SD 1			
					4. Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Jumlah Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api	1	paket	1		3.982.250.000		0	0	0	0	-	49 PUCUK LARAS PING, 6 PUCUK PISTOL	JUNI-DES	SD 5		
		KP6 Tingkat Kehandatan Kenavigasian	%	97,76	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
					1. Replacement Menara Suar Tanjung Ligata dan Replacement Rambu Pelabuhan Relau	Tingkat Kehandatan Kenavigasian	1		0	0	-	0	0	2.753.791.600	0	0	Pencapaian pelaksanaan kegiatan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang				
					2. Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Padar dan Pembangunan Bantu Pelabuhan Pulau Itura	Tingkat Kehandatan Kenavigasian	1		0	0	-	0	0	1.935.288.500	0	0	Pencapaian pelaksanaan kegiatan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang				
					1. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	12	1	100	-	-	1	-	100	-		Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telaah sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan			
					2. Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	12	1	100	-	-	1	-	100	-		Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telaah sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan			
SP-4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	Rasio Kapal yang Mengurangi Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 mmv)	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
					1. Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Jumlah Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	1	kegiatan	1		1.800.000.000		0	0	0	0	-	BLN AGUSTUS	SD IV			
					2. Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Jumlah Lokasi Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	5	lokasi	1		108.800.000		0	0	0	0	-	SEPANJANG TAHUN	SD IV			

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN : Juli **TAHUN :** 2023

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Juli		Realisasi Bulan Juli		% Capaian Bulan Juli		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab																																									
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi/ Kinerja					Realisasi/ Anggaran																																								
								Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)																																							
SP-1	Meningkatnya Konktivitas Transportasi Laut Nasional	KP1	Rasio Konktivitas Transportasi Laut Nasional	0,94	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	Jumlah kapal rede yang beroperasi	10 layanan	16	100	25.666.666.669	57,0%	16	0	100	0	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri																																							
								44	100	351.460.548.838	57,0%	44	62.914.713.715,00	100	46%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri																																							
								73	100	467.906.469.569	57,0%	73	218.340.602.682	100	27%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri																																							
								39	100	366.651.344.500	57,0%	39	47.665.753.472	100	11%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jiwa Terkait																																							
								6	100	36.294.641.831	57,0%	6	7.894.890.580	100	12%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri																																							
	KP2	Pentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk Loop Secara Tertutur	% 27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara tertutur	12 laporan	1	100	-		1	0	100	0%	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri																																								
							SP-2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	KP3	Persentase On Time Performance pada Kapal di Jalur 19 Samudra Utara	% 84,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	Evaluasi Standar Kinerja Pelayaran Operasional	1 kegiatan	1%	###	500.000.000	100%	1	48.730.000	100	9,75	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayaran Operasional	dian dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni dan Desember 2023																																	
															Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	1 kegiatan	0	0	-	0	0	0	0	Masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	dian dilaksanakan pada bulan Juni 2023																																
															Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional perubahan	1 kegiatan	1	100	0	0	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional perubahan melalui aplikasi	dilaksanakan setiap bulan																																
															SP-3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	KP4	Rasio Kejadian Kecelakaan dan Keamanan Transportasi Laut	1/10.000 Pelayaran	0,97	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Keceklaaan Kapal	5 lokasi	5		75.000.000	0	0	0	-	SEFANIANG TAHUN	SD 3																									
5		75.000.000	0	0	0	-	SEFANIANG TAHUN	SD 3																																																	
5		75.000.000	2	31.284.128	40	42	SEFANIANG TAHUN	SD 3																																																	
Sosialisasi keselamatan pelayaran	10 lokasi	10		1.134.560.000	5	694.387.695	50	61	FEB-NOV	SD 5																																															
Pembangunan Kapal Patroli	7 unit	7		117.412.212.000	0	83.320.199.138	0	71	JAN-DES	SD 5																																															
RP5	Rasio Penurunan Gerakan Komandan Transportasi Laut	1/100.000 Pelayaran	0,27	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	Penguatan AIS (Monitoring System Kapal)	1 paket	1	4.713.222.000	0	0	0	0	-	APRIL-OKT	SD 5																																										
																KPS	Rasio Penurunan Gerakan Komandan Transportasi Laut	1/100.000 Pelayaran	0,27	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	Peningkatan keterampilan SPSS	1 kegiatan	1	320.000.000	0	0	0	-	JULI	SD 1																											
																															Penguatan Auditor SPSS Code	1 kegiatan	1		224.500.000	0	0	0	-	NOV	SD 1																
																															Fourth Verification SPSS Code	3 lokasi	3		54.040.000	0	0	0	-	AGUSTUS-SEPTEMBER	SD 1																
																															Pengadaan, perizinan dan distribusi senista api larany	1 paket	1		4.232.250.000	0	0	0	-	APRIL-OKT	SD 5																
RP6	Tingkat Kehadatan Kenavigasian	% 97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	Replacement Menara Suar Tanjung Ligitte dan Replacement Rembu Pelabuhan Rakau	1	0	0	-	0	0	0	0	-	Perisian Dokumen Pelisigon	Distrik Navigasi Kelas II Kupang																																										
																Pembangunan Rembu Pelabuhan Pulau Padar dan Pembangunan Rembu Dolokunon Sulwi Drona	1	0	0	-	0	0	-	1.945.969.200	0	0	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang																													
																SP-4													Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggungan pencemaran	KP7	Rasio Kapal yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 mm)	Rasio 0,9	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	Penyerbitan Serfikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	12	1	100	-	1	-	100	-	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telah sesuai dengan Target yang ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan												
																																														Memonitori Pelaporan Konsumi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	12	1	100	-	1	-	100	-	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Teloh sesuai dengan Target yang ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
																																														KP8	Pentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan	% 100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	1 kegiatan	1	1.800.000.000	0	0	0	0
Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	5 lokasi	5		132.000.000	0	0	0	0	SEFANIANG TAHUN	SD IV																																															

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN :		Agustus		TAHUN :		2023												
NO	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Agustus			Realisasi Bulan Agustus			% Capaian Bulan Agustus		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
								Target Kinerja	Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
SP-1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut Nasional	KP1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,84	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													
					1. Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	100	29.333.333.336	65,0%	16	0	100	0	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
					2. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	100	401.669.198.672	65,0%	44	62.914.413.715,00	100	40%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
					3. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	100	534.750.250.936	65,0%	73	218.340.602.682	100	27%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
					4. Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39	100	419.030.108.000	65,0%	39	47.665.753.472	100	11%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait	
SP-2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	KP2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													
					1. Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayanan yang membentuk loop secara teratur	Jumlah laporan kegiatan trayek tol laut pelayanan yang membentuk loop secara teratur	12	100	-	1	0	100	0%	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
					2. Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	1	100	0	0	0	0	0	0	Masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni dan Desember 2023		
					3. Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Jumlah Kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan melalui aplikasi	1	100	0	0	1	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan melalui aplikasi SIPRAN	diaksanakan setiap bulan		
					4. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran	10	100	1.134.560.000	8	932.044.179	80	82	7 UNIT (2 KAPAL KELAS 3, 5 KAPAL KELAS IV)	FEV-NOV	SD 5		
SP-3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	KP4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													
					1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	5	100	75.000.000	4	69.036.820	80	87	SEPANJANG TAHUN	SD 3			
					2. Monitoring terkait permasalahan Surat Peretujuan Berlayar	Jumlah Kegiatan Monitoring terkait permasalahan Surat Peretujuan Berlayar	5	100	75.000.000	0	0	0	0	-	REVISI	SD 3		
					3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelaklutan dan Keselamatan Kapal Asing (PSCO)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelaklutan dan Keselamatan Kapal Asing (PSCO)	5	100	75.000.000	3	51.860.128	60	69	SEPANJANG TAHUN	SD 3			
					4. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran	10	100	1.134.560.000	8	932.044.179	80	82	FEV-NOV	SD 5			
					5. Pembangunan Kapal Patroli	Jumlah Kapal Patroli	7	100	111.450.578.000	0	49.447.737.745	0	44	JAN-DES	SD 5			
					6. Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Jumlah Perlatan AIS (Monitoring System Kapal)	1	100	4.713.222.000	0	0	0	0	-	AGUSTUS-DES	SD 5		
					7. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Jumlah Kegiatan Peningkatan keterampilan ISPS CODE	1	100	320.000.000	1	217.865.430	100	68	SELESAI	SD 1			
					8. Pengukuhan Auditor ISPS CODE	Jumlah Kegiatan Pengukuhan Auditor ISPS CODE	1	100	224.500.000	0	0	0	0	-	NOV	SD 1		
					9. Fourth Verification ISPS Code	Jumlah Lokasi Kegiatan Fourth Verification ISPS Code	3	100	54.040.000	0	0	0	0	-	AGUSTUS-SEPTEMBER	SD 1		
SP-6	Tingkat Kehandatan Kenavigasian	RP6 Tingkat Kehandatan Kenavigasian	%	97,76	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													
					1. Replacement Merang Suez Tanjung Ligea dan Replacement Rambu Pelabuhan Ratusa	Tingkat Kehandatan Kenavigasian	1	0	0	-	0	0	10.300.629.300	0	#DIV/0!	Pencapaian pelaksanaan kegiatan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang	
					2. Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Patir dan Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Rivas	Tingkat Kehandatan Kenavigasian	1	0	0	-	0	0	1.991.399.850	0	#DIV/0!	Pencapaian pelaksanaan kegiatan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang	
					1. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	12	1	100	-	-	1	-	100	-	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telaah sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
					2. Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	12	1	100	-	-	1	-	100	-	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telaah sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
SP-4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	KP7 Rasio Kapal yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													
					1. Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Jumlah Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	1	1	1.800.000.000	0	0	0	0	-	BLN AGUSTUS	SD IV		
					2. Penanganan Tanggap Darurat Musabah di Laut	Jumlah Lokasi Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Musabah di Laut	5	1	108.800.000	0	0	0	0	-	SEPANJANG TAHUN	SD IV		
SP-8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan	RP8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													
					1. Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Jumlah Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	1	1	1.800.000.000	0	0	0	0	-	SEPANJANG TAHUN	SD IV		
					2. Penanganan Tanggap Darurat Musabah di Laut	Jumlah Lokasi Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Musabah di Laut	5	1	108.800.000	0	0	0	0	-	SEPANJANG TAHUN	SD IV		

BULAN : September **TAHUN :** 2023

--	--	--

BULAN :		Oktober		TAHUN :		2023																	
NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Oktober				Realisasi Bulan Oktober				%Capaian Bulan Oktober				Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja		Capaian Anggaran					
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
SP 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	KP1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,94	Memnuj Di. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1 Layanan angkutan rede (35 layanan) 2 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan) 3 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan) 4 Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan) 5 Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN) Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional Jumlah trayek tol laut Jumlah trayek angkutan ternak	16 layanan 44 layanan 73 layanan 39 layanan 6 layanan	16 44 73 39 6	100 100 100 100 100	36.666.666,67 540.446.362.500 668.437.813.668 509.445.968.333 51.849.488.333	83,3% 83,3% 83,3% 83,3% 83,3%	16 44 73 39 6	27.182.715.235,00 358.594.930.526 514.407.232.145 303.940.088.473 36.982.110.496	100 100 100 111 100	61,8% 55% 64% 49,72% 59%	Dalam pelaksanaan Dalam pelaksanaan Dalam pelaksanaan Dalam pelaksanaan Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut Koordinasi lanjut Koordinasi lanjut Koordinasi lanjut Koordinasi lanjut	Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri Subdi Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri					
		KP2 Persentase Pencapaian Tayak Pelayaran yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	Memnuj Di. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1 Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah laporan kegiatan trayek tol laut pelayaran yang membentuk loop secara teratur	12 laporan	1	100	-	1	0	100	0%	-	-	Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri						
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayaran transportasi laut	KP3 Persentase On Time Performance pada	%	84,00	Memnuj Di. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Evaluasi Standar Kinerja Pelayaran Operasional 2. Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan 3. Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional perubahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayaran Operasional Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan Jumlah Kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional perubahan melalui aplikasi	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	1 1 1	100 100 100	500.000.000 350.000.000 0	100% 100% 0	1 1 1	88.160.000 0 0	100 100 0	18% 0 0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayaran Operasional Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayaran operasional perubahan melalui aplikasi SIRANI	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni dan Desember 2023 akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 dilaksanakan setiap bulan						
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	KP4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	Memnuj Di. KPPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal 2. Monitoring terkait permasalahan Surat Persejukan Berlayar 3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelangkaan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) 4. Sosialisasi keselamatan pelayaran 5. Pembinaan Kapal Patroli 6. Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Jumlah Kegiatan Monitoring terkait permasalahan Surat Persejukan Berlayar Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelangkaan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) Jumlah Kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran Jumlah Kapal Patroli Jumlah Perlatan AIS (Monitoring System Kapal)	5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 10 lokasi 7 unit 1 paket	4 5 7 10 7 1	67.662.000 75.000.000 86.400.000 1.134.560.000 105.797.603.000 4.698.000.000	4 0 5 8 3 1	67.662.000 0 71.281.799 932.044.179 65.036.823 0	100 0 71 80 43 0	96 - 83 82 0,06 -	SEPANJANG TAHUN REVISI SEPANJANG TAHUN FEB-NOV JAN-DES AGUSTUS-DES	SD 3 SD 3 SD 3 SD 5 SD 5 SD 5								
		KP5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27	Memnuj Di. KPPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Peningkatan keterampilan SPS CODE 2. Pengukuhan Auditor SPS Code 3. Fourth Verification SPS Code 4. Pengadaan, penitihan dan distribusi senjata api lainnya	Jumlah Kegiatan Peningkatan keterampilan SPS CODE Jumlah Kegiatan Pengukuhan Auditor SPS Code Jumlah Lokasi Kegiatan Fourth Verification SPS Code Jumlah Pengadaan, penitihan dan distribusi senjata api lainnya	1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 1	1% 0 1 1	100% 0 100 1	500.000.000 350.000.000 0 3.962.250.000	100% 100% 0 1	0 1 0 0	100 100 100 0	0 1,05% 0 -	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayaran (pembelian ATK) Masih dalam proses capaian pengukuhan kaproba bimtek Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni, akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 akan dilaksanakan setiap bulan							
		KP6 Tingkat Kehandalan Kemargisian	%	97,75	Memnuj Di. Kemargisian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Replacement Menara Sutar Tanjung Ligeta dan Replacement Rambu Pelabuhan Rambu 2. Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Padar dan Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Rusa	Tingkat Kehandalan Kemargisian Tingkat Kehandalan Kemargisian	1 1	0 0	12.000.000.000 4.000.000.000	0 0	12.599.529.250 3.807.454.850	0 0	105,00 95,19	Progres sudah diatas target Percepatan pelaksanaan kegiatan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang Distrik Navigasi Kelas II Kupang								
SP 4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	KP7 Rasio Kapal yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,9	Memnuj Di. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemertoran Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun) 2. Memonitori Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pemertoran Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun) Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	12 12	1 1	100 100	- -	1 1	- -	100 100	- -	Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telaah sesuai dengan Target yang Ditetapkan Telaah sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Subdi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan						
		KP8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan	%	100	Memnuj Di. KPPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022) 2. Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Jumlah Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022) Jumlah Lokasi Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	1 kegiatan 5 lokasi	1 1	1.800.000.000 105.780.000	0 0	0 0	0 0	0 -	- -	SD IV SEPANJANG TAHUN	SD IV							

BULAN :		November		TAHUN :		2023						Target Bulan November				Realisasi Bulan November				%Capaian Bulan November							
NO	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan November			Realisasi Bulan November			%Capaian Bulan November		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab									
								Target Kinerja	%	Volume	Target Anggaran	%	Volume	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran				Capaian Kinerja	%	Capaian Anggaran						
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)								
SP1	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Organisasi dan Kelembagaan Organisasi	Rasio Kinerja Kelembagaan Organisasi	Rasio	0,94	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)									
					1. Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah layanan angkutan rede yang beroperasi	16 layanan	16	100	40.333.333.337	91,7%	16	32.090.419.832,00	100	72,9%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri									
					2. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44 layanan	44	100	584.726.634.250	91,7%	44	438.933.642.274,00	100	69%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri									
					3. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73 layanan	73	100	748.521.485.954	91,7%	73	612.622.919.705	100	75%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri									
					4. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek laut perintis	39 layanan	39	100	537.473.898.500	91,7%	39	370.534.360.191	100	63,19%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdi Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait									
		5. Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6 layanan	6	100	57.034.437.167	91,7%	6	40.698.771.686	100	65%	Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri												
		Rasio Kinerja Kelembagaan Organisasi	Rasio	0,94	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)									
					1. Rekapitulasi laporan pencapaian kinerja pelayanan yang membentuk loop secara teratur	Jumlah laporan kegiatan trayek laut perintis yang membentuk loop secara teratur	12 laporan	1	100	-	1	0	100	0%	-	-	Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri										
					2. Rekapitulasi laporan pencapaian kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Jumlah laporan kegiatan trayek laut perintis yang membentuk loop secara teratur	12 laporan	1	100	-	1	0	100	0%	-	-	Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri										
					3. Rekapitulasi laporan pencapaian kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Jumlah laporan kegiatan trayek laut perintis yang membentuk loop secara teratur	12 laporan	1	100	-	1	0	100	0%	-	-	Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri										
4. Rekapitulasi laporan pencapaian kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Jumlah laporan kegiatan trayek laut perintis yang membentuk loop secara teratur				12 laporan	1	100	-	1	0	100	0%	-	-	Subdi Angkutan Laut Dalam Negeri												
SP2	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Organisasi dan Kelembagaan Organisasi	Rasio Kinerja Kelembagaan Organisasi	Rasio	0,94	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)									
					1. Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	1 kegiatan	1	100%	500.000.000	100%	1	37.554.000	100	8%	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, Juni dan Desember 2023	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023									
					2. Bimtek Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Pelayanan Operasional	1 kegiatan	1	100%	350.000.000	100%	1	114.024.000	100	33%	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023									
					3. Rekapitulasi laporan pencapaian kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Jumlah laporan kegiatan trayek laut perintis yang membentuk loop secara teratur	12 laporan	1	100	0	0	1	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan pencapaian kinerja pelayanan operasional pelabuhan	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023									
					4. Rekapitulasi laporan pencapaian kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Jumlah laporan kegiatan trayek laut perintis yang membentuk loop secara teratur	12 laporan	1	100	0	0	1	0	100	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan pencapaian kinerja pelayanan operasional pelabuhan	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023									
		Rasio Kinerja Kelembagaan Organisasi	Rasio	0,94	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)									
					1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kelembagaan Kapal	Jumlah kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kelembagaan Kapal	5 lokasi	4	80%	67.662.000	80%	4	65.036.820	100	96%	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kelembagaan Kapal	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023									
					2. Monitoring terkait permasalahan Surat Pemantauan Kapal	Jumlah kegiatan Monitoring terkait permasalahan Surat Pemantauan Kapal	5 lokasi	5	100%	75.000.000	100%	5	0	0	0	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kelembagaan Kapal	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023									
					3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemantauan Kelembagaan Kapal	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemantauan Kelembagaan Kapal	5 lokasi	7	140%	86.400.000	140%	7	71.281.799	71	83%	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kelembagaan Kapal	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023									
					4. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran	10 lokasi	10	100%	1.134.560.000	100%	8	932.044.179	80	82%	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kelembagaan Kapal	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023									
SP3	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Organisasi dan Kelembagaan Organisasi	Rasio Kinerja Kelembagaan Organisasi	Rasio	0,94	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)									
					1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kelembagaan Kapal	Jumlah kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kelembagaan Kapal	5 lokasi	4	80%	67.662.000	80%	4	65.036.820	100	96%	Masih dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kelembagaan Kapal	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023									

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN :		Desember		TAHUN :		2023																	
NO	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember				%Capaian Bulan Desember				Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja		Capaian Anggaran					
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	%	%	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
SP-1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,84	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
					1. Layanan angkutan rede (116 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	100	40.333.333.337	91,7%	16		44.000.000.000,00	100	100%				Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
					2. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	100	584.726.634.250	91,7%	44		638.052.703.000,00	100	100%				Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
					3. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	100	748.521.485.954	91,7%	73		803.239.072.587	100	100%				Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
					4. Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (55 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39	100	537.473.898.500	91,7%	39		586.335.162.000	100	100%				Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait		
		5. Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6	100	57.034.437.167	91,7%	6		63.226.389.000	100	100%				Dalam pelaksanaan	Koordinasi lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri					
		IKP2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
1. Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah laporan kegiatan trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	12	100	-		0	100	0%										Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri					
SP-2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3 Persentase On Time Performance pada Pelayaran	%	84,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
					1. Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	1	100%	512.795.000	100%	1		47.803.000	100	10%				pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional dilaksanakan pada bulan Maret, April, Mei,				
					2. Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah kegiatan Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	1	100%	349.326.000	100%	1		198.702.000	100	57%				Pelaksanaan kegiatan Bimtek Standar Kinerja dilaksanakan pada bulan September, November dan Desember				
					3. Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Jumlah Kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan melalui aplikasi	1	100	0	0	1		0	100	0				Mauih dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan melalui aplikasi SIRANI	diaksanakan setiap bulan			
SP-3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,97	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
					1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	5	lokasi	4		67.662.000		4		67.661.820	100	100			SEPANJANG TAHUN (selesai)	SD 3		
					2. Monitoring terkait permasalahan Surat Perizinan Berlayar	Jumlah Kegiatan Monitoring terkait permasalahan Surat	5	lokasi	5		75.000.000		0	0	0	-			REVISI	SD 3			
					3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelaklutan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelaklutan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)	5	lokasi	7		86.400.000		7		86.400.000	100	100			SEPANJANG TAHUN (selesai)	SD 3		
					4. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi keselamatan pelayaran	10	lokasi	10		1.184.560.000		10		1.184.558.834	100	100			FEB-Des (selesai)	SD 5		
					5. Pembangunan Kapal Patroli	Jumlah Kapal Patroli	7	unit	7		105.818.403.000		7		105.812.672.439	100	99,99			7 UNIT (2 KAPAL KELAS 3, 5 KAPAL KELAS IV)	JAN-DES (selesai)	SD 5	
		6. Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Jumlah Peralatan AIS (Monitoring System Kapal)	1	paket	1		4.690.000.000		1		4.690.000.000	100	100,00			kapal kelas II dan III yg belum memiliki AIS	AGUSTUS-DES (selesai)	SD 5				
		IKP5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,27	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
					1. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Jumlah Kegiatan Peningkatan keterampilan ISPS CODE	1	100	217.880.000	100%	1		217.865.430	100		99,99			selesai				
					2. Pengukuhan Auditor ISPS Code	Jumlah Kegiatan Pengukuhan Auditor ISPS Code	1	100	169.230.000	100%	1		169.151.800	100		99,95			selesai				
					3. Fourth Verification ISPS Code	Jumlah Lokasi Kegiatan Fourth Verification ISPS Code	1	100	110.000.000	100	1		110.000.000	100		100			selesai				
					4. Pengadaan, pelatihan dan distribusi senjata api lainnya	Jumlah Pengadaan, pelatihan dan distribusi senjata api lainnya	1	100	3.982.250.000	100	1		3.908.110.000	100		97,93			48 PUCUK LARAS PUNG, 6 PUCUK PISTOL	JUNI-DES (selesai)	SD 5		
					5. Pengadaan, pelatihan dan distribusi senjata api lainnya	Jumlah Pengadaan, pelatihan dan distribusi senjata api lainnya	1	100	3.982.250.000	100	1		3.908.110.000	100		97,93			48 PUCUK LARAS PUNG, 6 PUCUK PISTOL	JUNI-DES (selesai)	SD 5		
		IKP6 Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
					1. Replacement Menara Suar Tanjung Ligea dan Replacement Rambau Pelabuhan Ratu	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	1	0	0		12.000.000.000	0	0		12.599.529.250	0	105,00			Progres sudah diatas target	Distrik Navigasi Kelas II Kupang		
		2. Pembangunan Rambau Pelabuhan Pulau Padar dan Pembangunan Rambau Pelabuhan Pulau Rusa	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	1	0	0		4.000.000.000	0	0		3.807.454.850	0	95,19			Pencapaian pelaksanaan kegiatan	Distrik Navigasi Kelas II Kupang					
		SP-4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7 Rasio Kapal yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
							1. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	12	1	100	-	-	1	-	100	-				Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telah sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
2. Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)			12	1	100	-	-	1	-	100	-				Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu	Telah sesuai dengan Target yang Ditetapkan	Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan					
IKP8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan	%			100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
1. Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Jumlah Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	1	100	1.410.880.000	100	1		1.409.639.500	99,91							Oktober (selesai)	SD IV						
2. Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Jumlah Lokasi Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	5	lokasi	5	100	105.760.000	100	5		105.760.000	100	100				Jan-Des (selesai)	SD IV						

pelabuhan yg dilayani

**Daftar Pelabuhan Yang Disinggahi Kapal Angkutan Laut
Tahun 2023**

No.	Nama Pelabuhan Untuk Angkutan Laut Sesuai RIPN	
1	Adault	
2	Agats	
3	Air Bangis	1
4	Air Buaya	
5	Amahai	
6	Amamapare	
7	Ambalau	
8	Ambo	
9	Ambon	
10	Ampana	
11	Ampenan	
12	Amurang	
13	Anggrek	
14	Ansus	
15	Anyer Lor	
16	Arwala / Sutilarang	
17	Asiki	
18	Atapupu	
19	Atsy	
20	Awerange	
21	Baa	
22	Babang	
23	Badas	
24	Bade	
25	Bagan Asahan	2
26	Bagan Siapi-api	
27	Baing	
28	Bajoe	
29	Balauring	
30	Balikpapan	
31	Banabungi Pasarwajo	
32	Banda Besar	3
33	Banda Naira	
34	Banemo	
35	Banggai	
36	Banjarmasin	
37	Bantaeng/ Bonthain	
38	Banten	
39	Banyu Wangi/ Boom	
40	Baranusa	
41	Barus	
42	Bastiong	
43	Bataka	
44	Batam/Batu Ampar	

pelabuhan yg dilayani

45	Batang	
46	Batanjung	4
47	Batu Atas	
48	Batu Enam	
49	Batu Goyang/Kalar-Kalar	
50	Batu Merah	
51	Batu Panjang	
52	Baturube	
53	Batutua	
54	Bau-Bau/Murhum	
55	Bawean	
56	Bayun	
57	Belang - Minahasa tenggara	
58	Belang-Belang	
59	Belawan	
60	Belinyu	
61	Belopa	
62	Bemo	
63	Benete	
64	Bengkalis	
65	Benjina	
66	Benoa	
67	Beo	
68	Bere - Bere	
69	Biak	
70	Biaro	
71	Bicoli	
72	Bima	
73	Binanatu	
74	Binongko	
75	Bintuhan/Linai	
76	Bintuni	
77	Biringkasi	
78	Bisui	
79	Bitung	
80	Biu	
81	Boepinang	
82	Bojonegara	
83	Boom Baru/Palembang	
84	Branta	
85	Brebes	
86	Brondong	
87	Buano	
88	Budong-Budong	
89	Buhias	
90	Bukide	
91	Bula - Maluku Tengah	
92	Bula - Seram Bagian Timur	
93	Buleleng (Sangsit)	

pelabuhan yg dilayani

94	Buli	
95	Bulukumba/Lappe'e	
96	Bumbulan	
97	Bungku	
98	Bunta	
99	Bunyu	
100	Calabai	
101	Calang	
102	Carik	
103	Carocok Painan	
104	Celukan Bawang	
105	Cirebon	
106	Cituis	
107	Dabo Singkep	
108	Dama - Halmahera Utara	
109	Damar	
110	Dapalan	
111	Daruba	
112	Darume	
113	Dawai	
114	Dawelor	
115	Depapre	
116	Dobo	
117	Dofa	
118	Dompak	5
119	Donggala	
120	Dorosagu	
121	Dumai	
122	Eci	
123	Elat	
124	Ende	
125	Eray	
126	Ereke	
127	Essang	
128	Fak-fak	
129	Falabisahaya	
130	Fani	
131	Fogi	
132	Galela	
133	Galesong/Takalar	
134	Garongkong	
135	Geser	
136	Giliketapang	6
137	Gilimanuk	
138	Gita/Payahe	
139	Glimandangin	
140	Gorom	
141	Gorontalo	
142	Gresik	

pelabuhan yg dilayani

143	Gudang Arang	
144	Gunung Sitoli	
145	Hatu Piru	
146	Hila/Romang	
147	Idi	
148	Ilwaki	
149	Inawatan	
150	Indari	
151	Indramayu/Losarang	
152	Ippi	
153	Jailolo	
154	Jampea	
155	Janggerbun	7
156	Jayapura	
157	Jeneponto	
158	Jepara	
159	Juwana	
160	Kabare	
161	Kadatua	
162	Kahakitang	
163	Kaimana	
164	Kairatu	
165	Kaiwatu/Moa	
166	Kakorotan	
167	Kalabahi	
168	Kalama	
169	Kalaotoa	
170	Kalbut	
171	Kaledupa	
172	Kalianda	
173	Kalianget	
174	Kalibaru	
175	Kangean	
176	Kao	
177	Karang Agung	
178	Karangantu	
179	Karatung	
180	Karimata	
181	Karimun Jawa	
182	Kasipute	
183	Kataloka	
184	Kawaluso	
185	Kawio	
186	Kayuadi	
187	Kedi/Loloda	
188	Kempo	
189	Kendal	
190	Kendari/Bungkutoko	
191	Kendawangan	

pelabuhan yg dilayani

192	Kep. Seribu (P. Pramuka)	
193	Keramaian	
194	Kereng Bengkirai	
195	Kertapati	
196	Kesui	
197	Ketapang (Kalbar)	
198	Ketapang (Jatim)	
199	Kilo	8
200	Kintap	
201	Kisar	
202	Kobisadar	
203	Kobror	9
204	Koititi	
205	Kokas	
206	Kolaka	
207	Kolbano	
208	Kolonedale	
209	Komodo	
210	Korido	
211	Kota Agung/Batu Balai	
212	Kota Baru	
213	Kotabunan	10
214	Kresek/Kronjo	
215	Kroing	
216	Kuala Enok	
217	Kuala Gaung	
218	Kuala Jelay	
219	Kuala Langsa	
220	Kuala Mendahara	
221	Kuala Pembuang	
222	Kuala Semboja/Sebulu	
223	Kuala Tanjung	
224	Kuala Tungkal	
225	Kumai	
226	Kur	
227	Kwandang	
228	Labuan Amuk/Tanahampo	
229	Labuan Bajo	
230	Labuha	
231	Labuhan - Pandeglang	
232	Labuhan Haji	
233	Labuhan Lombok	
234	Labuhan Maringgai	
235	Labuhan Uki	
236	Lagundi	11
237	Lahewa	
238	Laiwui	
239	Lakara	
240	Lakor	

pelabuhan yg dilayani

241	Lamakera	
242	Lameluru	
243	Lampia	
244	Langara	
245	Lapuko	
246	Larantuka	
247	Larat	
248	Lasalimu	
249	Lawele	
250	Legon Bajak	
251	Leksula	
252	Lembar	
253	Leok	
254	Lerokis	
255	Leti	
256	Letung	
257	Lewoleba	
258	Lhok Tuan	
259	Lhokseumawe/Kreung Geukeh	
260	Liana Banggai	
261	Likupang	
262	Lipang	
263	Lirang	
264	Lirung	
265	Loleo Jaya	
266	Losseng	
267	Lurang	
268	Luwuk	
269	Maccini Baji	
270	Madopolo/Joame	
271	Mafa	
272	Mahaleta	
273	Maidi/Lifofa	
274	Majene	
275	Makalehi	
276	Makassar	
277	Makian	
278	Malahayati	
279	Malakoni/P. Enggano	
280	Malala	
281	Malarko	12
282	Malbufo	
283	Malenge	
284	Maligano	
285	Malili	
286	Maloy	
287	Mamboro	
288	Mamuju	
289	Manado	

pelabuhan yg dilayani

290	Mangarang	
291	Mangga Dua	
292	Manggar	
293	Mangoli	
294	Manipa	
295	Manitingting/Maba	
296	Manokwari	
297	Mansinam	13
298	Mantangisi	
299	Manu/Gamunu	
300	Marabatuan	
301	Marabombang	
302	Marampit	
303	Marapokot	
304	Maritaing	
305	Marlasi	
306	Marore	
307	Marsela	
308	Marunda	
309	Masalembo	
310	Mataritip	14
311	Matasiri	
312	Matui	
313	Matutuang	
314	Maumbawa	
315	Maumere /Lorens Say	
316	Maurole	
317	Mega	
318	Melonguane	
319	Mempawah	15
320	Menanga	
321	Menggala	16
322	Menui	
323	Meranti/Dorak	
324	Merauke	
325	Mesuji (Lampung)	
326	Mesuji - Ogan Komering Ilir	
327	Meulaboh	
328	Miangas	
329	Midai	
330	Molawe	
331	Moor	
332	Moru	17
333	Moti	
334	Moutong	
335	Muara Angke	
336	Muara Baru	
337	Muara Padang	
338	Muara Sabak	

pelabuhan yg dilayani

339	Muara Siberut/Simailepet	
340	Muko-Muko	
341	Mumugu	
342	Munte - Luwu Utara	
343	Munte/Likupang Barat	
344	Muntok	
345	Nabire	
346	Naikliu	
347	Namlea	
348	Namrole	
349	Natal / Sikara-kara	
350	Ndao	
351	Ngalipaeng	
352	Nipah Panjang	
353	Nunbaun Sabu (Namosain)	
354	Nunungan/Tunon Taka	
355	Nusa Penida (Toyapakeh)	
356	Oepoli	18
357	Ogoamas	
358	Oransbari	
359	Oswald Siahaan/Labuhan Angin	
360	P. Banyak	
361	P. Bonerate	
362	P. Gebe	
363	P. Jinato	
364	P. Kalukalukuang	
365	P. Mules	19
366	P. Raas	
367	P. Sabutung	20
368	P. Sailus	
369	P. Sapuka	
370	P. Sebesi	
371	P. Tabuan	
372	Pacitan	21
373	Padang Bai	
374	Pagimana	
375	Palabuhanratu	
376	Paleleh	
377	Palipi	22
378	Paloh/Sakura	
379	Palopo/Tg. Ringgit	
380	Palue	
381	Pam	
382	Pamanukan-Blanakan	
383	Pamatata	
384	Panarukan	
385	Pangandaran/Bojongsalawe	23
386	Pangkal Balam	
387	Pangkalan Brandan	

pelabuhan yg dilayani

388	Pangkalan Bun	
389	Pangkalan Dodek	
390	Pangkalan Susu	
391	Panipahan	
392	Paniti	
393	Panjang	
394	Pantai Cermin	
395	Pantoloan	
396	Papela	
397	Para	
398	Pare-Pare	
399	Parigi	
400	Parit Rempak	
401	Parlimbungan Ketek	24
402	Pasang Kayu	
403	Pasapuat	
404	Pasean	
405	Pasipalele	
406	Pasokan	
407	Pasuruan	
408	Patani	
409	Patimban	
410	Pattirobajo	
411	Pawi	25
412	Pegatan Mendawai	
413	Pehe	
414	Pekajang	
415	Pekalongan	
416	Pekanbaru	
417	Pelaihari/Swarangan	
418	Pelita	
419	Pemalang	
420	Pemenang	
421	Penajam Paser	
422	Petta	
423	Pigaraja	
424	Pomako	
425	Pomalaa/Dawi-dawi	
426	Pontianak	
427	Poom	
428	Poopongan	
429	Popolii	
430	Poso	
431	Pota	
432	Probolinggo	
433	Pulang Pisau	
434	Pulau Baai	
435	Pulau Ende	
436	Pulau Kampai	26

pelabuhan yg dilayani

437	Pulau Kayoa	
438	Pulau Laut	
439	Pulau Owi	27
440	Pulau Salura	
441	Pulau Sambu	
442	Pulau Seluan	28
443	Pulau Tello	
444	Pulau Teor	
445	Raha	
446	Raijua	
447	Rainis	29
448	Ranai	
449	Rangga Ilung	
450	Ransiki	
451	Rembang/Sluke	
452	Rembang/Tasik Agung	
453	Rengat/Kuala Cinaku	
454	Reo	
455	Riung	30
456	Sabang	
457	Sadai	
458	Sagea	
459	Saketa	
460	Salakan	
461	Samarinda	
462	Sampang	
463	Sampit	
464	Samuda	
465	Sanana	
466	Sangatta	
467	Sangkulirang	
468	Saonek	
469	Saparua/Haria	
470	Sape	
471	Sapeken	
472	Sapudi	
473	Sarmi	
474	Satui	
475	Saukorem	
476	Saumlaki	
477	Sausapor	
478	Sawang	
479	Seba	
480	Sebalang	31
481	Sebuku	
482	Sedanau	
483	Seget	
484	Segun	
485	Sei Berombang	

pelabuhan yg dilayani

486	Sei Kolak Kijang	
487	Seira	
488	Selat Lampa	
489	Selat Panjang	
490	Selayar/Benteng/Rauf Rahman	
491	Senayang	
492	Sepo	32
493	Serasan	
494	Serongga	
495	Serui	
496	Serwaru	
497	Sesayap	
498	Sibadeh	33
499	Sibigo	
500	Sibolga	
501	Sigli	
502	Sikabalan/Pokai	
503	Sikakap	
504	Sikeli	
505	Sinabang	
506	Sinaboi	
507	Singkawang	
508	Singkil	
509	Sinjai/Larea-rea	
510	Sintete	
511	Siompu	
512	Sirombu	
513	Siuban	
514	Siwa/Bangsala	
515	Soasio/Goto	
516	Sofifi	
517	Sorong	
518	Subaim/Wasile	
519	Subi	
520	Sukadana	
521	Sukamara	
522	Sunda Kelapa	
523	Sungai Guntung	
524	Sungai Lumpur	
525	Sungai Nyamuk/Sebatik	
526	Sungai Pakning	
527	Sungsang	
528	Susoh	
529	Taberfane	
530	Taddan	
531	Tagulandang	
532	Tahuna	
533	Talaga Raya	
534	Talang Duku	

pelabuhan yg dilayani

535	Tana Paser/Pondong	
536	Tangkiang	
537	Taniwel	
538	Tanjung Api-API	
539	Tanjung Balai Karimun	
540	Tanjung Batu - Berau	
541	Tanjung Batu - Kotabaru	
542	Tanjung Batu Kundur	
543	Tanjung Berakit	
544	Tanjung Beringin	
545	Tanjung Buton	
546	Tanjung Emas	
547	Tanjung Intan	
548	Tanjung Laut	
549	Tanjung Medang	
550	Tanjung Moch	34
551	Tanjung Pakis	35
552	Tanjung Pandan	
553	Tanjung Perak	
554	Tanjung Pinang	
555	Tanjung Pura	
556	Tanjung Redeb	
557	Tanjung Santan	
558	Tanjung Sarang Elang	36
559	Tanjung Satai	37
560	Tanjung Selor	
561	Tanjung Silopo/Polewali	
562	Tanjung Tiram - Tg Balai Asahan	
563	Tanjung Tiram - Tg Balai Karimun	
564	Tanjung Uban / Teluk Sasah	
565	Tanjung Wangi	
566	Tapaktuan	
567	Tarakan/Malundung	
568	Tarempa	
569	Tegal	
570	Telaga Biru	
571	Teluk Air / Padang Tikar	
572	Teluk Bayur	
573	Teluk Betung	
574	Teluk Dalam	
575	Teluk Leidong	
576	Teluk Melano/Teluk Batang	
577	Teluk Sigintung/Seruyan	38
578	Teluk Tapang	39
579	Tembilahan	
580	Teminabuan	
581	Tenau/ Kupang	
582	Tepa	
583	Tepeleo	

pelabuhan yg dilayani

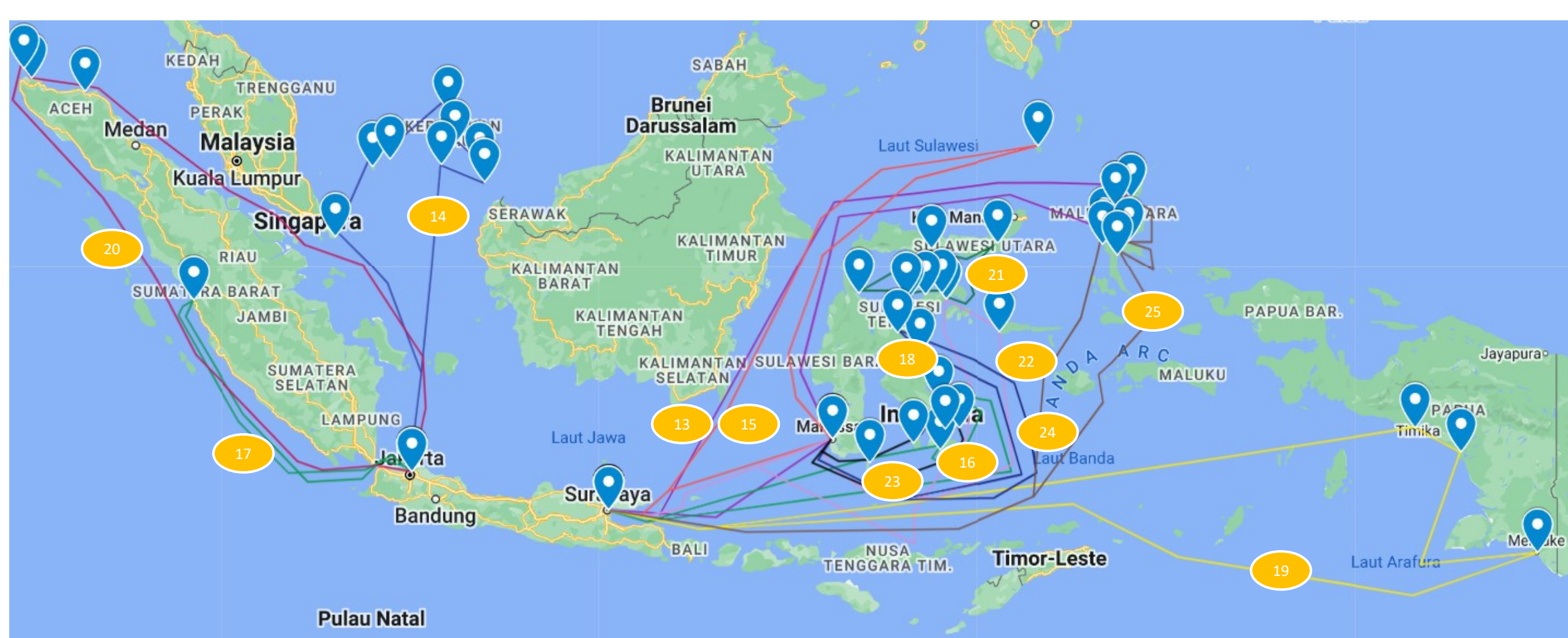
584	Ternate/A.Yani	
585	Terong/Waiwerang	
586	Tg. Balai Asahan/Teluk Nibung	
587	Tg. Priok	
588	Tg. Sidupa	
589	Tifure	
590	Tikong	
591	Tilamuta	
592	Tinombo	
593	Tobelo	
594	Tobilota	40
595	Toboali	
596	Toli-toli	
597	Torosik	
598	Toyando	
599	Tual	
600	Tuapejat	
601	Tuhaha	
602	Tulehu	
603	Tutu Kembong	
604	Ujung Jabung	41
605	Ujung Jampea	
606	Ulu Siau	
607	Una-Una	
608	Upisera	
609	Wahai	
610	Waigama	
611	Waikelo	
612	Waingapu	
613	Waisai	
614	Waisarisa	
615	Waiwadan	
616	Waiwole	
617	Waiwuring	
618	Wakai	
619	Wamengkoli	
620	Wanci	
621	Wani	
622	Waren	
623	Wasior	
624	Watunohu	
625	Waworada	
626	Wayabula	
627	Wayaua	
628	Weda	
629	Windesi	
630	Wini	
631	Wolu	
632	Wonreli	

pelabuhan yg dilayani

633	Wulandoni	
634	Wulur	
635	Wuring	
636	Yaba	



1.	Bitung-Ulu Siau-Tagulandang-Tahuna-Marore-Mianga-Marampit-Lirung-Melangoane-Mangarang-Bitung	7.	Makassar-Awerange/Barru-Garongkong-Tanjung Silopo/Polewali-Mamuju-Belang-Belang-Nunukan-Makassar
2.	Tanjung Perak-Wanci-Namrole-Pulau Obi-Tanjung Perak	8.	Tanjung Perak-Larantuka-Lembata-Kalabahi-Tanjung Perak
3.	Tanjung Perak-Rote-Sabu-Tanjung Perak	9.	Sorong-Oransbari-Wasior-Nabire/Teluk Kimi-Serui-Waren-Sarmi-Sorong
4.	Tanjung Priok-Bengkalis-Meranti/Dorak-Belawan-Lhokseumawe/Krueng Geukeh-Malahayati/Krueng Raya-Tanjung Priok	10.	Tanjung Perak-Piru-Wayaloar-Malbufa-Babang-Saketa-Gimea-Bula-Tanjung Perak
5.	Teluk Bayur-Gunung Sitoli-Sinabang-Sikakap-Bengkulu/Pulau Baai-Teluk Bayur	11.	Tanjung Perak-FakFak-Kaimana-Elat-Dobo-Tanjung Perak
6.	Tanjung Perak- Ilwaki-Kisar-Leti-Kaiwatu/Moa-Lelang/P. Sermat-Tepa-Larat-Tanjung Perak	12.	Tanjung Perak-Oransbari-Wasior-Nabire/Teluk Kimi-Serui-Waren-Sarmi-Tanjung Perak



12.	Tanjung Perak-Oransbari-Wasior-Nabire/Teluk Kimi-Serui-Waren-Sarmi-Tanjung Perak	19.	Tanjung Perak – Makassar – Bobong (Taliabu) – Luwuk – Tanjung Perak
13.	Tanjung Perak-Makassar-Jailolo-Daruba-Galela-Tanjung Perak	20.	Tanjung Perak – Merauke – Agats – Timika (Pomako) – Tanjung Perak
14.	Tanjung Priok-Kijang-Letung-Tarempa-Pulau Laut-Selat Lampa-Subi-Serasan-Midai-Tanjung Priok	21.	Tanjung Priok – Lhokseumawe – Malahayati – Sabang – Tanjung Priok
15.	Tanjung Perak-Soasio-Galela-Daruba-Galela-Buli-Maba Pura-Weda-Tanjung Perak	22.	Bitung – Luwuk – Pagimana – Bunta – Mantangisi – Ampa – Parigi/Tinombo – Tilamuta – Bitung
16.	Tanjung Perak-Makassar-Tahuna-Tanjung Perak	23.	Makassar - Bungku – Kolonodale – Makasar
17.	Tanjung Perak-Bau-Bau/Murhum-Kendari/Bungkutoko-Tanjung Perak	24.	Makasar – Ereke – Raha – Sikeli – Selayar– Makassar
18.	Tanjung Priok – Teluk Bayur - Tanjung Priok	25.	Tanjung Perak - Tidore (Soasio) – Morotai – Galela – Maba/Buli – Weda – Tanjung Perak



26.	Tanjung Perak- Wetar -Kisar – Leti - Moa – Sermata - Tapa – Larat - Tanjung Perak	35.	Tanjung Priok – Tanjung Perak – Tanjung Priok
27.	Tanjung Perak - Lembata (Lewoleba) -Tabilota/ Larantuka - Tanjung Perak	36.	Tanjung Priok – Patimban – Kijang – Letung – Tarempa – Pulau Laut – Selat Lampa – Subi – Serasan – Midai – Tanjung Priok
28.	Tanjung Perak – Makassar – Jailolo – Morotai (Daruba) – Tanjung Perak	37.	Tanjung Priok – Pekanbaru– Tanjung Priok
29.	Tanjung Perak – Saumlaki – Dobo – Tanjung Perak	38.	Tanjung perak - Wayaloar- Malbufa – Babang - Saketa- Gimea/tapeleo - Tanjung perak
30.	Tanjung Perak – Badas – Bima – Tanjung Perak	39.	Tanjung priok - Pulau baai - Tanjung priok
31.	Tanjung Perak – Tarakan – Nunukan – Tanjung Perak	40.	Tanjung perak – Makassar – Jailolo – Daruba – Galela - Tanjung Perak
32.	Tanjung Perak – Namlea – Tanjung Perak	41.	Tanjung Perak - Makassar - Tahuna - Tanjung Perak
33.	Merauke (Kelapa Lima) – Kimaam – Moor – Bade (Mapi) – Gantentiri (Bovendigul) – Merauke (Klima)		
34.	Tanjung Perak – Sorong – Tanjung Perak		